



STUDI KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014

Membangun data itu mahal dan sulit.

Tetapi lebih mahal dan sulit, membangun tanpa data.



STUDI KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN KEBUMEN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat-Nya sehingga penyusunan publikasi “STUDI KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014” dapat terselesaikan. Pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Perkapita yang cukup tinggi kurang memiliki arti jika tidak diimbangi dengan adanya pemerataan distribusi pendapatan bagi masyarakatnya.

Studi Ketimpangan dan Distribusi Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2014 dapat memberikan sedikit gambaran makro mengenai kondisi pemerataan pendapatan di Kabupaten Kebumen sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Bupati Kebumen yang telah memberikan petunjuk kepada Tim Penyusun sehingga memungkinkan terbitnya publikasi ini. Penghargaan juga disampaikan kepada semua pihak baik Bappeda Kabupaten Kebumen maupun para Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sehingga tersusunnya publikasi ini.

Publikasi ini memfokuskan telaahnya pada pengukuran ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, diharapkan publikasi ini dapat melengkapi kekurangan informasi angka pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan.

Semoga publikasi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pengguna data, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan pembangunan.

Kebumen, November 2014
BADAN PUSAT STATISITIK
KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA,

Drs. SUNARDI, MM
NIP. : 19591010 199003 1 003

SAMBUTAN

Seraya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, saya menyambut gembira atas terbitnya buku “STUDI KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014” dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini.

Dalam rangka pengembangan kehidupan masyarakat dan potensi wilayah, data statistik memiliki fungsi dan peranan penting. Salah satu fungsi yang cukup penting adalah data sebagai bahan evaluasi kegiatan pembangunan yang telah dilakukan.

Angka pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang telah dicapai. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memiliki arti yang lebih jika diikuti oleh ketimpangan pendapatan yang semakin kecil serta distribusi pendapatan yang semakin merata, baik antar golongan pendapatan maupun antar wilayah. Buku ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara makro mengenai kondisi tersebut untuk wilayah Kabupaten Kebumen. Sehingga pada akhirnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dapat menentukan perencanaan yang tepat untuk kegiatan pembangunan berikutnya.

Akhirnya kepada penerbit, saya harapkan agar terus mengembangkan data dan informasi yang disajikan, sehingga akan meningkatkan daya guna buku ini.

Kebumen, November 2014

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA,**

Drs. H. SABAR IRIANTO

NIP. : 19580304 198910 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
SAMBUTAN KEPALA BAPPEDA KAB. KEBUMEN	iii
DAFTAR ISI	iv
Bab I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	5
1.3. Sistematika Penulisan	5
Bab II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Trilogi Pembangunan	7
2.2. Teori Ketimpangan Distribusi Pendapatan	7
2.3. Konsep Tentang Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan	15
2.4. Pengaruh Distribusi Pendapatan Terhadap Kemiskinan	16
2.5. Penelitian Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Kebumen	17
Bab III. METODOLOGI	20
3.1. Ruang Lingkup.....	20
3.2. Metode Pengumpulan Data	20
3.3. Pengolahan Data	21
3.4. Metode Estimasi	21
3.5. Metode Analisis	21
3.5.1. Gini Ratio	22
3.5.2. Interpretasi Gini Ratio	22
3.5.3. Ukuran Ketimpangan Bank Dunia	22
3.5.4. Interpretasi Ketimpangan Bank Dunia	23
3.6. Konsep Definisi	23
Bab IV. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN	26
4.1 Kondisi Geografis	26

4.2. Perekonomian	28
4.3. Kependudukan	32
Bab V. RATA-RATA PENDAPATAN DAN POLA KONSUMSI PENDUDUK	
KABUPATEN KEBUMEN	37
5.1. Sumber Penghasilan Rumah tangga	37
5.2. Rata-rata Pendapatan	42
5.3. Konsumsi Penduduk	45
5.3.1. Pola Konsumsi Makanan	46
5.3.2. Pola Konsumsi Non Makanan	48
Bab VI. DISTRIBUSI PENDAPATAN	50
6.1. Ketimpangan Distribusi Pendapatan	51
6.2. Perbandingan Distribusi Pendapatan Antar Kecamatan	54
6.3. Penduduk Kategori Berpendapatan 40% Rendah	56
Bab VII. KESIMPULAN	58
7.1. Kesimpulan	58
7.2. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada umumnya setiap negara di dunia memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan seluruh rakyatnya melalui peningkatan pembangunan ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumberdaya yang ada.

Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur social, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan mutlak. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun (Tulus T.H Tambunan, Akhria Nazwar, Ghalia Indonesia, Jakarta : 2009)

Pembangunan bukan merupakan tujuan melainkan hanya alat sebagai proses untuk menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Jadi berkurangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti dari pembangunan. Selama pertumbuhan ekonomi dan hasil-hasil dari pembangunan dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat, maka masalah ketidakmerataan distribusi pendapatan tidak akan muncul. Jika kinerja ekonominya lebih baik atau mengalami kemajuan maka seluruh rakyat juga harus merasakan dampak kemajuan tersebut dalam bentuk naiknya tingkat pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi sebenarnya tidak dapat disederhanakan hanya dengan menyimak tinggi atau rendahnya angka pertumbuhan. Tetapi dibalik itu yang tak kalah penting adalah apa yang disebut sebagai kualitas pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas digerakan oleh peningkatan kapasitas produksi masyarakat, walaupun angka tidak terlalu tinggi, jauh lebih tinggi kualitasnya karena mempengaruhi

pembangunan manusia diantaranya dapat menggerakkan pendapatan perkapita, dan menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya dapat memperbaiki pola distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat sehingga banyak penduduk yang memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya untuk membeli kebutuhan makanan, pendidikan, kesehatan dan perumahan sehingga dapat mempercepat pembangunan manusia (Kajian *Aloysius Gunadi Brata 2004, LPU Univ. Atmajaya Yogyakarta*, dalam jurnalnya menguraikan adanya hubungan simultan antara kinerja ekonomi dan pembangunan manusia).

Pertumbuhan ekonomi sering kali diikuti dengan perubahan struktur pendapatan, terutama bagi negara yang sedang berkembang. Pada tahap awal perkembangan ekonomi dicirikan oleh peranan sektor pertanian yang dominan. Selanjutnya dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, peranan sektor industri dan jasa semakin besar dan sebaliknya peranan sektor pertanian menurun. Masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan.

Ketimpangan merupakan salah satu konsep lain dari kesejahteraan yang lebih luas dari kemiskinan, dalam arti bahwa ketimpangan didefinisikan terhadap seluruh populasi (penduduk/rumah tangga), dan tidak hanya pada penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Menurut World Bank Institute (2002), ketimpangan menitikberatkan pada distribusi dan variabel terukur (misalnya, pendapatan/pengeluaran) terhadap seluruh penduduk. Tingkat ketimpangan secara keseluruhan dalam suatu wilayah (dalam bentuk moneter maupun non moneter) juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan secara ringkas tentang tingkat kesejahteraan dalam kelompok tersebut.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena distribusi pendapatan merupakan ukuran kemiskinan relative. Ukuran distribusi pendapatan perorangan merupakan ukuran yang paling umum digunakan. Masalah yang umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) (Tambunan, 2001).

Untuk menilai sejauh mana ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Kebumen, indikator yang digunakan adalah Indek Gini (gini Ratio) dan kriteria Bank Dunia. Ukuran kriteria bank Dunia menggambarkan pendapatan yang diterima masyarakat desa berdasarkan kelompok pendapatan yaitu 40 % penduduk berpendapatan rendah, 40 % berpendapatan menengah dan 20 % penduduk berpendapatan tinggi.

Besar kecilnya pendapatan yang diterima tentu sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, hal inilah yang sangat dirasakan oleh sebagian besar penduduk Kabupaten Kebumen yang mana dengan berbedanya tingkat pendapatan yang diterima maka berbeda pula jumlah pengeluaran yang dikeluarkan. Akhirnya akan berpengaruh kepada jumlah pendapatan masing-masing masyarakat sesuai klasifikasi pola mata pencaharian. Indikator ini juga akan menjadi pijakan dalam mempertimbangkan ketimpangan distribusi pendapatan sebagai pertimbangan dalam strategi pembangunan dan memprioritaskan kebijakan penanggulangan kemiskinan, sehingga kajian tentang sejauh mana tingkat ketimpangan yang terjadi pada rumah tangga menurut kecamatan di Kabupaten Kebumen.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kebumen didasarkan pada visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kebumen tahun 2010-2014. Misi keempat, memperluas jaringan sosial ekonomi secara nasional maupun internasional demi kesejahteraan rakyat, pada poin 1b berbunyi meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemertaan yang meliputi indikator angka pertumbuhan ekonomi dan angka ketimpangan distribusi pendapatan (Indeks Gini). Dengan demikian tersirat bahwa pembangunan tidak hanya mengacu pada pertimbangan ekonomi semata namun harus diimbangi dengan terwujudnya peningkatan pendapatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Hal ini perlu diperhatikan dalam upaya menghindari munculnya kesenjangan sosial dan terjadinya ketidakadilan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan, yakni mengurangi kesenjangan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah dan tinggi.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu, baik antar sektor maupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan makro daerah secara efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh wilayah. Ada tiga aspek perencanaan, yaitu : (1) *makro (bappeda)*; (2) *sektoral (dinas/instansi)*; (3) *regional (kecamatan)*; yang ketiganya tersusun dalam satu kesatuan.

Pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah menghasilkan pertumbuhan yang cukup tinggi, namun belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan ataupun berbagai golongan penduduk baik dalam satu wilayah maupun antar wilayah, atau dengan kata lain masih ada permasalahan kesenjangan baik dalam satu wilayah maupun antar wilayah. Keragaman ekonomi tersebut antara lain disebabkan tingkat perbedaan yang cukup berarti, dalam hal : *laju pertumbuhan ekonomi antar wilayah, potensi antar daerah yang telah dikembangkan, laju pertumbuhan penduduk, laju inflasi, penyerapan tenaga kerja menurut sektor, kualitas sumber daya manusia, fasilitas yang tersedia antar daerah, dan tingkat produktifitas tenaga kerja antar wilayah.*

Pemerataan pendapatan masyarakat sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, akan tetapi pengamatan dan penelitian mengenai fenomena tersebut sangat penting dilaksanakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan. Apakah hasil pembangunan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok golongan atas, sedang atau bawah saja?, bagaimanakah disparitas pendapatan antara golongan bawah dan golongan atas? Penelaahan masalah distribusi pendapatan diperlukan sebagai peta kasar sebelum dilakukan analisis lebih jauh.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan serta perbaikan dalam struktur ekonomi masyarakat, Produk domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah adalah sebagai salah satu cerminannya yang lebih diperjelas dengan adanya distribusi pendapatan. Kabupaten Kebumen dengan 26 Kecamatan yang mempunyai keragaman kemajuan di berbagai sektor tentu saja memiliki dampak yang berbeda terhadap kondisi distribusi pendapatan pada masyarakat suatu wilayah. Seperti diketahui bahwa penghitungan PDRB dihasilkan dari 9 (sembilan) sektor yaitu sektor Pertanian, Pertambangan dan penggalian, Industri pengolahan, Listrik, gas dan air bersih, Bangunan/konstruksi, perdagangan, Hotel dan Rumah makan, Angkutan dan komunikasi, Lembaga keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, dan Jasa-jasa, yang tentu saja andil berbagai sektor tersebut berbeda untuk masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap pola konsumsi penduduk maupun distribusi pendapatan untuk masing-masing kecamatan.

Upaya-upaya ke arah pemerataan selama ini sudah lama dilakukan misalnya pengentasan kemiskinan melalui Alokasi Dana Desa (ADD), mewujudkan keseimbangan pembangunan antara desa dan kota, pemberian beras miskin (Raskin), pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), program pengembangan

kecamatan (PPK), Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas), program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan lain-lain. Bahkan akhir-akhir ini perhatian terhadap golongan berpendapatan rendah meningkat sebagai tindak lanjut dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Tingkat kesejahteraan masyarakat tidak semata-mata ditunjukkan oleh pendapatan yang semakin baik tetapi juga harus diikuti dengan semakin banyaknya masyarakat menikmati total pendapatan (pemerataan pendapatan). Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar pendapatan masih dinikmati oleh sebagian kecil penduduk yang berpendapatan tinggi dan hanya sebagian kecil pendapatan saja yang dinikmati sebagian besar penduduk berpendapatan rendah.

Pendapatan sering diukur dengan pengeluaran masyarakat. Hal ini dikarenakan pada umumnya pendapatan yang tinggi akan diikuti oleh berbagai kebutuhan yang semakin banyak sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi pula. Selanjutnya semakin tinggi pengeluaran, persentase pengeluaran untuk makanan cenderung semakin mengecil atau dengan kata lain dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka pola konsumsi masyarakat tersebut akan bergeser dari lebih banyak mengkonsumsi makanan menjadi lebih banyak mengkonsumsi bukan makanan. Dengan demikian dapat dikatakan apabila pola konsumsi masyarakat telah bergeser seperti tersebut di atas, maka tingkat kesejahteraan masyarakat mulai meningkat.

Penghitungan distribusi pendapatan sampai level Kecamatan di Kabupaten Kebumen sudah empat kali dilakukan yaitu pada tahun 2003, 2006, 2008 dan tahun 2013. Penghitungan distribusi pendapatan pada tahun 2014 berguna untuk memonitor dan mengevaluasi perubahan yang terjadi selama satu tahun terakhir sehingga Perencanaan Pembangunan yang dilakukan bias lebih fokus dan terarah.

1.2. Tujuan

Tujuan penghitungan/penyusunan studi ketimpangan distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Kebumen adalah tersedianya data yang dapat mencerminkan keadaan penduduk berdasarkan :

- i. Pola Konsumsi penduduk per kecamatan,
- ii. Angka Gini Rasio per kecamatan,
- iii. Kategori tingkat pemerataan menurut kriteria Bank Dunia per kecamatan,

sebagai salah satu indikator dalam kegiatan perencanaan pembangunan berikutnya.

1.3. Sistematika Penulisan

Materi penulisan ini disusun dalam 7 (tujuh) bab, yaitu :

- Bab I : Pendahuluan yang mencakup latar belakang dan maksud dan tujuan dari studi/penelitian ini.
- Bab II : Tinjauan Pustaka yang memuat studi/penelitian sejenis yang telah dilaksanakan oleh para peneliti lain beserta beberapa teori penelitian tingkat pemerataan distribusi pendapatan.
- Bab III : Metodologi, mencakup ruang lingkup, sumber data dan prosedur analisis.
- Bab IV : Gambaran Umum Kabupaten Kebumen.
- Bab V : Rata-rata Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Kebumen.
- Bab VI : Distribusi Pendapatan.
- Bab VII : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Trilogi Pembangunan

Trilogi Pembangunan adalah wacana pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan orde baru di Indonesia dalam sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Kebijakan pembangunan nasional tetap pada trilogi pembangunan dengan penekanan terhadap unsur pemerataannya. Artinya, bahwa setiap pelaksanaan pembangunan itu harus tetap memperhatikan tuntutan yang terdapat di dalam trilogi pembangunan secara selaras, terpadu, dan saling memperkuat. Ketipa unsur dalam trilogi pembangunan itu adalah :

- Stabilitas Nasional yang dinamis
- Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, dan
- Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya.

Upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya tidak mungkin tercapai/terwujud tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tidak mungkin dapat dicapai apabila tanpa adanya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Hal ini tercermin bahwa unsur-unsur dalam trilogi pembangunan harus dikembangkan secara selaras, serasi, terpadu, dan saling mengait.

Terlepas dari pro kontra tentang pemerintahan era orde baru, 'Trilogi Pembangunan' ini sebenarnya masih sangat bisa untuk dilanjutkan/dipedomani karena masih sejalan dengan kebijakan yang diambil pemerintah sekarang.

2.2. Teori Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan pada dasarnya merupakan suatu konsep mengenai penyebaran pendapatan di antara setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. Konsep pengukuran distribusi pendapatan dapat ditunjukkan oleh dua konsep pokok, yaitu konsep ketimpangan absolut dan konsep ketimpangan relatif. Ketimpangan absolut merupakan konsep pengukuran ketimpangan yang menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak. Ketimpangan relatif merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang atau

sekelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan (Ahluwalia dalam Sukirno, 1985).

Pendapatan penduduk tidak selalu merata/setara, bahkan yang sering terjadi justru sebaliknya. Kondisi merata/setara (*equality*) terjadi jika semua orang berada di atas garis kemiskinan (tidak ada yang miskin) atau semuanya berada di bawah garis kemiskinan (setiap orang adalah miskin). Sebaliknya, ketimpangan (*inequality*) terjadi ketika ada yang miskin dan ada yang tidak miskin. Jika dicontohkan dengan variabel pendapatan, maka kondisi merata/setara (*equality*) ketika setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sebaliknya, ketimpangan terjadi ketika sekelompok orang yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lainnya. Sebagian ada yang berpenghasilan kecil, dan hanya cukup untuk membeli kebutuhan makanan saja, sebaliknya ada yang berpenghasilan besar atau besar sekali dan sebagian orang penghasilannya berada diantara kedua orang/kelompok tadi. Perbedaan pendapatan tersebut antara lain disebabkan oleh tingkat pendidikan, lapangan usaha, jenis pekerjaan, status pekerjaan, kesempatan kerja, produktivitas masing-masing individu kewiraswastaan, modal dan lain-lain.

Jika pendapatan perorangan (upah/gaji) dari seluruh wilayah kabupaten dijumlahkan kemudian ditambah dengan sewa tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha (industri, perdagangan, tempat hiburan, dan lain-lain) ditambah lagi dengan bunga atas modal dan keuntungan yang diterima oleh entrepreneur/wiraswasta, akan merupakan pendapatan regional, dan ini pada hakekatnya dapat diibaratkan sebagai kue regional. Manakala kue regional dibagikan secara merata kepada seluruh penduduk di wilayah tersebut, maka dikatakan distribusi pendapatannya merata, sebaliknya jika pembagian kue regional tersebut tidak merata (ada yang kecil, ada yang sedang, dan ada yang besar) dikatakan ada ketimpangan dalam distribusi pendapatannya. Ketimpangan distribusi pendapatan dikatakan tinggi, sedang, atau rendah tergantung pada perbedaan pembagian kue pendapatan, dan semakin besar perbedaan pembagian kue pendapatan berarti semakin besar pula ketimpangan distribusi pendapatan dan seterusnya.

Ketimpangan distribusi pendapatan seperti ini menyangkut harkat hidup orang, oleh karena itu menarik para pemikir untuk mengadakan penelitian. Sampai sekarang ini belum ditemukan teori yang mapan tentang ketimpangan pendapatan tersebut, namun ada berbagai pendapat maupun ukuran tentang tingkat ketimpangan pendapatan. Beberapa contoh dapat disebutkan sebagai berikut:

- (i) V. Pareto dalam mempelajari tingkat ketimpangan pendapatan, memperhatikan adanya hubungan yang erat antara tingkat pendapatan tertentu dengan jumlah orang yang menerima pendapatan tersebut atau lebih. Hubungan ini kemudian dinyatakan dalam bentuk persamaan :

$$N = \frac{K}{X^\alpha} \quad \text{atau} \quad \log N = \log K - \alpha \log X$$

dimana:

N = Jumlah individu/keluarga yang memperoleh pendapatan

K = Koefisien Pareto yang berupa konstanta

X = Tingkat pendapatan tertentu dari keluarga atau individu yang bersangkutan

α = Konstanta

Persamaan ini merupakan hukum Pareto yang didefinisikan : “Jumlah keluarga atau individu yang setidaknya pendapatan sejumlah tertentu akan berkurang dengan persentase yang tetap bila sekiranya tingkat pendapatan tersebut bertambah 1 persen”.

Dengan perkataan lain, bila sekiranya tingkat pendapatan meningkat 1 persen, jumlah keluarga atau individu yang memperoleh pendapatan tersebut atau lebih, akan berkurang sebesar α . Dari data empiris yang digambarkan dari persamaan logaritma tersebut, diketahui bahwa kelompok individu/keluarga yang berpenghasilan rendah akan menjauhi kurva Pareto ini. Artinya, *Indeks Pareto ini tidak sensitif terhadap perubahan pendapatan yang diterima kelompok berpenghasilan rendah*.

- (ii) R. Gibrat dalam eksperimennya menemukan bahwa penyebaran pembagian pendapatan tidak mengikuti bentuk distribusi normal. Akan tetapi sekiranya pendapatan seseorang dapat dibagi-bagi menurut faktor penyebarannya, akan terdapat berbagai penyebaran yang sifatnya normal, maka secara tidak langsung distribusi pendapatan itupun berbentuk normal. Ukuran ketimpangan pembagian pendapatan yang dikemukakan Gibrat adalah :

$$C = \frac{100}{b} ; \quad b = \frac{1}{2SL}$$

dimana ;

b = Konstanta

C = Ukuran kepincangan pembagian pendapatan

SL = Standar Deviasi Logaritma

- (iii) Simon Kuznets membuat indeks ketimpangan pendapatan berdasarkan selisih absolut antara persentase bagian jumlah keluarga atau individu dalam seluruh kelas pendapatan. Indeks Kuznets diperoleh dari persamaan:

$$K = \sum_{i=1}^k (P_i - Q_i)$$

dimana ;

P_i = persentase jumlah pendapatan dalam kelas ke-i

Q_i = persentase jumlah keluarga/individu dalam kelas ke-i

k = jumlah kelas

K = Indeks Kuznets

- (iv) M. Theil menggunakan teori informasi, mengemukakan ukuran kepincangan pembagian pendapatan dengan persamaan :

$$T = \sum_{i=1}^k Q_i \cdot \log h Q_i$$

dimana;

T = Indeks Theil

H = Jumlah keluarga atau individu

Q_i = Jumlah persentase pendapatan yang diperoleh keluarga/individu ke-i

Nilai T berkisar antara 0 – log h. Bertambah besar nilai T akan bertambah pincang pembagian pendapatan keluarga/individu tersebut. Setiap ada pergeseran pendapatan dari golongan tinggi ke golongan rendah akan memperkecil nilai T. *Nilai T juga dipengaruhi sekali oleh besarnya jumlah keluarga atau individu.*

- (v) C. Gini, yang dilihat atau dikemukakan adalah hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Besarnya koefisien Gini dapat diperkirakan melalui pendekatan Pareto atau Kurva Lorentz. Koefisien Gini dengan pendekatan Pareto didapat melalui persamaan:

$$N = p \cdot A_x^\sigma,$$

atau dalam persamaan logaritma

$$\log N = \log p + \sigma \log A_x$$

dimana;

N = jumlah individu/keluarga penerima pendapatan

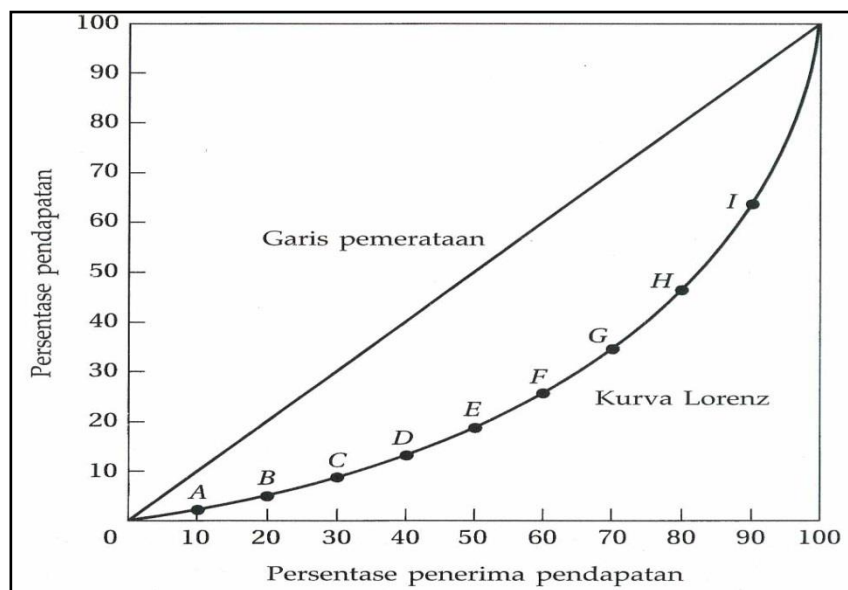
p = konstanta

σ = koefisien Gini

A = pendapatan

Koefisien Gini dengan pendekatan Kurva Lorentz lebih mudah dihitung dan dipahami. Distribusi akan disebut merata dengan sempurna apabila 10 persen penduduk termiskin menerima pendapatan sebesar 10 persen, 40 persen penduduk menerima 40 persen pendapatan, 80 persen menerima 80 persen pendapatan dan seterusnya. Distribusi pendapatan dikatakan tidak merata atau akan sangat timpang apabila 99 persen pendapatannya hanya dimiliki misalnya hanya oleh 1 persen dari jumlah penduduk.

Kurva Lorenz

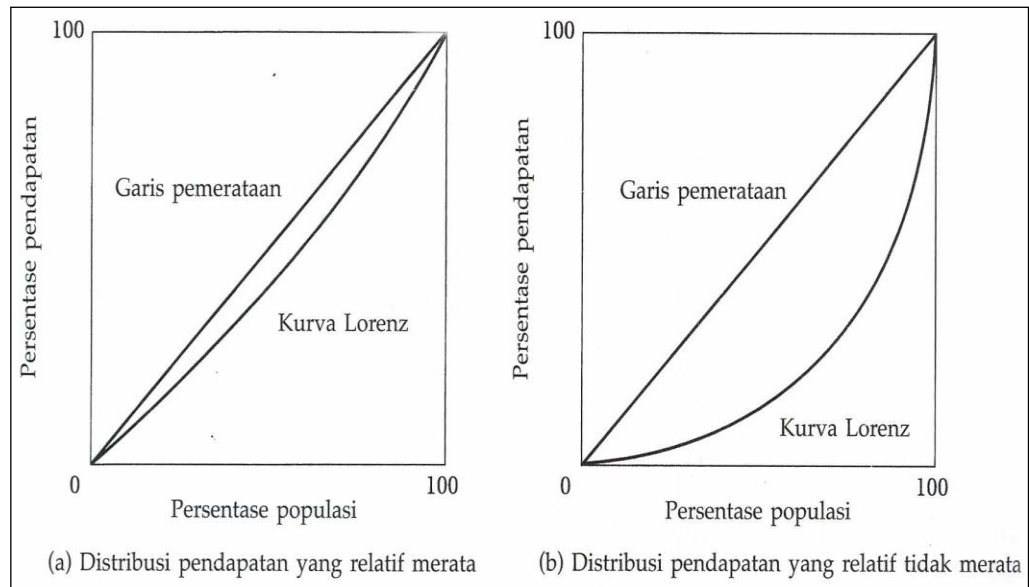


Gambar 1. Kurva Lorenz (*Lorenz Curve*)

Keterangan :

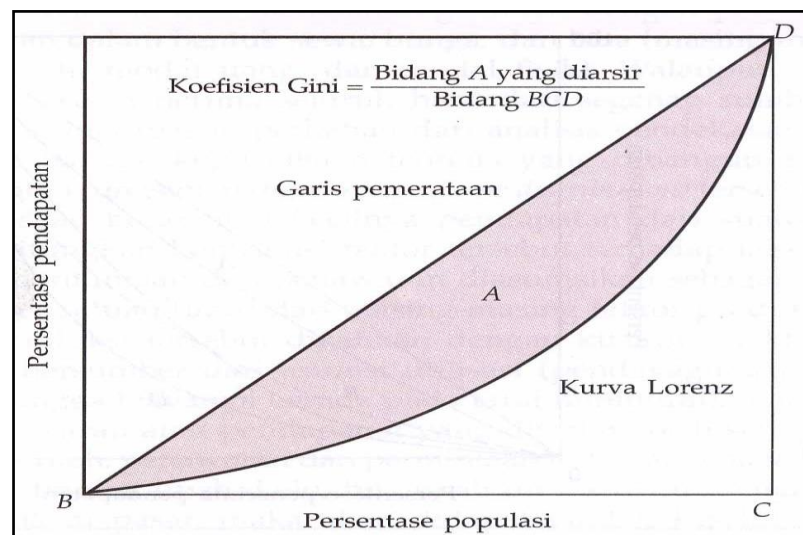
- Kurva Lorenz menggunakan data desil (populasi terbagi menjadi 10 kelompok, dengan kata lain sumbu horisontal dan sumbu vertikal dibagi menjadi 10 kelompok desil)
- Titik A menunjukkan bahwa 10% kelompok terbawah (termiskin) dari total penduduk hanya menerima 1,8% dari pendapatan total, titik B menunjukkan bahwa 20% kelompok terbawah hanya menerima 5% dari pendapatan total

- Semakin jauh jarak Kurva Lorenz dari garis diagonal (yang merupakan garis pemerataan sempurna), semakin timpang atau tidak merata distribusi pendapatannya



Gambar 2. Distribusi Pendapatan yang Relatif Merata (a) dan Distribusi Pendapatan yang Relatif tidak Merata (b)

Koefisien Gini dan Ukuran Ketimpangan Pendapatan



Gambar 3. Memperkirakan Koefisien Gini

Keterangan:

Koefisien gini=ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Koefisien gini

untuk negara-negara yang derajat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0,5–0,70. Untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata berkisar antara 0,20 – 0,35.

Beberapa kriteria untuk memenuhi koefisien gini:

1. Prinsip Anonimitas (*Anonimity Principle*) = ukuran ketimpangan tidak tergantung pada siapa yang mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi
2. Prinsip Independensi Skala (*Scale Independence Principle*) = ukuran ketimpangan tidak tergantung pada ukuran perekonomian suatu negara
3. Prinsip Independensi Populasi (*Population Independence Principle*) = pengukuran ketimpangan tidak didasarkan pada jumlah penerima pendapatan (jumlah penduduk)
4. Prinsip Transfer (*Transfer Principle*) = mengasumsikan semua pendapatan yang lain konstan, jika kita mentransfer sejumlah pendapatan dari orang kaya ke orang miskin, maka akan dihasilkan distribusi pendapatan baru yang lebih merata.

Kelemahan Gini Rasio menurut Sigit (1980) ialah besarnya nilai Gini Rasio tidak menjelaskan letak ketimpangannya. Untuk mengatasi kelemahan ini para pakar menganjurkan agar ukuran ini dilengkapi dengan ukuran lain seperti kriteria Bank Dunia, agar dapat mengetahui keadaan penduduk golongan bawah atau golongan atas yang timpang.

(vi) Kriteria Bank Dunia

Bank Dunia menggolongkan penduduk menjadi 3 golongan yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi.

Pengelompokkan seperti ini pada dasarnya sama dengan menggunakan cara desil yaitu 40 persen pertama sama dengan desil ke-4, 40 persen kedua sama dengan desil ke-8 dan 20 persen terakhir adalah desil ke-10. Dalam menentukan besarnya desil ke i digunakan rumus :

$$D_i = Q_b + \frac{(n_i + P_b)}{(P_a + P_b)}(Q_a + Q_b)$$

Dimana :

N_i : Persentase ke-i

D_i : Desil ke-i

- Q_b : % kumulatif dari kelas pendapatan sebelum D_i
 Q_a : % kumulatif dari kelas pendapatan sesudah D_i
 P_b : % kumulatif dari jumlah pendapatan sebelum D_i
 P_a : % kumulatif dari jumlah pendapatan sesudah D_i
 i : 1,2,...,10

Tingkat ketimpangan pembagian pendapatan diukur dengan besarnya bagian pendapatan yang dinikmati oleh *40 persen penduduk berpenghasilan rendah* dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tingkat ketimpangan digolongkan tinggi, apabila penduduk kelompok rendah menerima lebih kecil dari 12 persen jumlah pendapatan.
2. Tingkat ketimpangan dikategorikan sedang, apabila penduduk kelompok rendah menerima antara 12 persen - 17 persen dari jumlah pendapatan, dan
3. Tingkat ketimpangan dikatakan rendah, apabila penduduk kelompok rendah menerima lebih dari 17 persen dari jumlah pendapatan.

Ukuran ini bukan merupakan yang bersifat menyeluruh, karena hanya memperhatikan perkembangan pendapatan kelompok penduduk berpenghasilan terendah yang didapat dengan menjumlahkan 4 desile yang pertama. Desile artinya sepersepuluh, sehingga persentase pendapatan desile ke- j adalah persentase pendapatan yang diterima oleh 10 persen rumah tangga pada urutan ke j ; $j = 1, 2, 3, \dots, 10$.

- (vii) Harry T. Oshima beranggapan bahwa koefisien Gini terlalu memperhatikan golongan berpendapatan rendah dan tinggi, kurang melihat tingkat pendapatan sedang melalui proses kumulatifnya. Oleh karena itu Oshima mengemukakan ukuran kepincangan pembagian pendapatan dengan menggunakan persamaan :

$$OI = \frac{\sum_{i=1}^{10} D_i - 10}{180}$$

dimana ;

OI = Indeks Oshima

D_i = Persentase jumlah pendapatan dalam desile ke – i

Bila seluruh keluarga atau individu memperoleh pendapatan yang sama maka dalam setiap desile akan diperoleh 10 persen dari jumlah pendapatan. Bila tidak demikian berarti ada kepincangan dalam pembagian pendapatan. Mc. Cleary dan

Mangahas telah membuktikan bahwa OI (Oshima Indeks) *hanya sensitif pada middle income range (kelas pendapatan menengah)*.

2.3. Konsep Tentang Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

Todaro (2009) menjadi landasan penting dalam melihat hubungan antara distribusi pendapatan dan kemiskinan. Menurut *Gross domestic Produk/Product Domestic Bruto* (pertumbuhan ekonomi) yang cepat menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi. Namun Masalah dasarnya bukan hanya menumbuhkan Gross National Income (GNI), tetapi juga siapakah yang akan menumbuhkan GNI tersebut, sejumlah orang yang ada dalam suatu Negara ataukah hanya segelintir orang. Jika hanya segelintir orang yang menumbuhkan GNI ataukah orang-orang kaya yang berjumlah sedikit, maka manfaat dari pertumbuhan GNI itu pun hanya dinikmati oleh mereka saja sehingga kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pun akan semakin parah (Todaro dan Stephen C. Smith, 2006, Dawey, 1993). Untuk itu hal yang paling penting dalam pertumbuhan adalah siapa yang terlibat dalam pertumbuhan ekonomi tersebut atau dengan kata lain adalah tingkat kualitas pertumbuhan tersebut.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pertama kali dikemukakan oleh Simon Kusnets. Dalam Todaro (2009) Kusnets mengatakan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan berbentuk kurva *U-Shape* terbalik. Dasar dari hipotesis Kusnetz adalah ketimpangan yang rendah yang terjadi dipedesaan dengan sektor yang mendominasi adalah pertanian dibandingkan dengan perkotaan yang didominasi oleh sektor jasa dan industri yang tingkat ketimpangan pendapatannya tinggi. Ia mengatakan, terjadi transformasi ekonomi dari sektor pertanian ke sektor jasa.

Transformasi ekonomi tersebut membuat upah yang diterima oleh pekerja disektor pertanian lebih rendah dari upah yang diterima oleh pekerja disektor jasa. Untuk itu pada tahap awal pembangunan, ketimpangan pendapatan masih rendah. Kemudian pada tahap selanjutnya ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan seiring perubahan struktur ekonomi (Institut Pertanian Bogor).

Namun beberapa penelitian yang lain menemukan hal yang berbeda. Misalnya apa yang dikemukakan oleh Ravallion yang mengatakan bahwa antara distribusi pendapatan dan kemiskinan tidak terdapat hubungan yang sistematis.

2.4. Pengaruh Distribusi Pendapatan Terhadap Kemiskinan

Distribusi pendapatan menjadi gambaran tersendiri jika ingin melakukan analisis korelasi dengan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat jika distribusi pendapatan mengalami ketimpangan. Adelman dan Morris (1973) dalam Arsyad (2004) mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, diantaranya Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita, Inflasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang, ketidakmerataan pembangunan antar daerah, investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah, rendahnya mobilitas sosial, pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis, memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang ekspor negara-negara sedang berkembang dan hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga.

Signifikansi pengaruh distribusi pendapatan terhadap penurunan kemiskinan dijelaskan melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh Daniel Suryadarma, dkk (2005), dalam penelitiannya berjudul *AReassessment of Inequality and Its Role in Poverty Reduction in Indonesia*, bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan ketimpangan pada saat Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi dan saat terjadi krisis, serta menguji apakah ketimpangan berhubungan dengan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini memberikan gambaran tentang ketimpangan di Indonesia selama periode tahun 1984 hingga 2002 dengan menggunakan beberapa pengukuran ketimpangan yaitu Gini Rasio, *Generalized Entropy (GE) Index*, dan *Atkinson Index*. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa walaupun ketika terjadi krisis semua metode pengukuran menunjukkan penurunan ketimpangan, namun sebenarnya terjadi peningkatan tetapi dibawah garis kemiskinan. Penelitian ini menunjukkan adanya penjelasan penting yaitu bahwa tingkat kemiskinan menurun dengan cepat antara

tahun 1999 dan 2002, yang disebabkan karena ketimpangan selama krisis pada tahun 1999 berada pada tingkat paling rendah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh R. Gunawan Setianegara (2008), dalam penelitiannya berjudul Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Krisis Ekonomi dan Kemiskinan, bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketimpangan pendapatan yang dipengaruhi oleh krisis ekonomi mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Dalam penelitian ini juga menggambarkan bagaimana keadaan ketimpangan pendapatan Indonesia dimulai dari tahun 1960-an hingga akhir tahun 1999 menggunakan alat pengukur ketimpangan yaitu Gini Rasio. Menurut Gunawan, ada banyak analisis yang membuktikan bahwa walaupun tingkat pertumbuhan tinggi akan selalu menyebabkan tingkat ketimpangan pendapatan tinggi. Selain itu jumlah penduduk miskin di Indonesia juga akan selalu berubah seiring tinggi rendahnya tingkat ketimpangan pendapatan. Ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Perry at All (2006).

2.5. Penelitian Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Kebumen

Teori-teori ketimpangan distribusi yang telah dijelaskan di atas memang belum benar secara absolut. Namun pendekatan teori C. Gini dan kriteria Bank Dunia mempunyai keunggulan tersendiri. Selain mudah penghitungan dan pemahamannya juga paling banyak digunakan oleh peneliti. Sehingga mempermudah dalam membandingkan ketimpangan antara Kabupaten Kebumen dengan daerah lain atau dengan periode waktu yang berbeda. Untuk memudahkan pemahaman, cara membaca tabel-tabel adalah :

- a) Pada metode C. Gini. Semakin tidak merata pendapatan ditunjukkan oleh angka yang semakin besar.
- b) Pada metode Bank Dunia. Semakin tidak merata pendapatan ditunjukkan oleh angka yang semakin kecil pada golongan pendapatan rendah.

(Untuk lebih lengkap lihat subbab 2.1. rincian (v) dan (vi)).

Pada Tabel 2.5.1 berikut dapat dilihat, penghitungan distribusi pendapatan Kabupaten Kebumen tahun 1993 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen memperkirakan bahwa 40 persen penduduk Kabupaten Kebumen yang berpendapatan rendah menerima 27,22 persen dari pendapatan regional Kabupaten Kebumen, yang berarti bahwa menurut kriteria Bank Dunia tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kebumen pada tahun 1993 tergolong rendah. Begitu pula jika dilihat dari Gini Rasio yang cenderung pada kesimpulan yang serupa yaitu 0,20 persen.

Sedangkan untuk tahun 1994, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen memperkirakan bahwa 40 persen penduduk Kabupaten Kebumen yang berpendapatan rendah menerima 27,84 persen dari pendapatan regional Kabupapten Kebumen, yang berarti bahwa menurut kriteria Bank Dunia tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kebumen pada tahun 1994 tergolong rendah, namun lebih tinggi daripada tahun 1993. Begitu pula jika dilihat dari Gini Rasio yang cenderung pada kesimpulan yang serupa yaitu 0,21 persen.

Krisis ekonomi pada tahun 1997 mengakibatkan membaiknya distribusi pendapatan pendapatan penduduk Kabupaten Kebumen, hal ini terlihat dari rendahnya angka gini rasio (0,19 %) dan tingginya persentase pendapatan yang diterima penduduk berpendapatan rendah (28,49 %). Sedangkan, pemulihan ekonomi ternyata belum berpihak pada penduduk berpendapatan rendah, hal ini terlihat dari besarnya gini rasio pada tahun 2002 yang sebesar 0,23 persen dan rendahnya persentase pendapatan penduduk berpendapatan rendah yang hanya 26,52 persen. Pada tahun 2003 pada saat dilakukan SUSEDA dengan jumlah sampel yang cukup besar dihasilkan angka ketimpangan yang cukup tinggi sebesar 0,28 persen dan persentase pendapatan penduduk berpendapatan rendah hanya 20,75 persen. Sementara pada tahun 2004 dengan menggunakan data sampel Susenas angka ketimpangan cukup rendah sebesar 0,19 persen dan persentase pendapatan penduduk berpendapatan rendah mencapai 28,51 persen. Pada tahun 2005 dan 2006 angka gini ratio relatif stabil pada angka 0,23 persen, sedangkan persentase pendapatan penduduk berpendapatan rendah 26,29 persen pada tahun 2005 dan 18,82 persen pada tahun 2006. Dari angka-angka terlihat data tahun 2006 adalah makin buruk dalam hal persentase pendapatan penduduk berpendapatan rendah, tetapi mengingat perbedaan cakupan sampel yang separo lebih barangkali data tahun 2006 lebih realistis untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya terutama dikaitkan kondisi riil ekonomi tahun 2006 dengan kenaikan BBM mengakibatkan golongan berpendapatan rendah paling terkena imbasnya. Angka-angka ini sebagai petunjuk bahwa dengan perbedaan jumlah sampel yang cukup besardapat mengakibatkan pengambilan keputusan dan kebijakan yang keliru.

Tabel 2.5.1. Gini Rasio dan Persentase Pendapatan (Pengeluaran) per Kapita Kabupaten Kebumen Dirinci Menurut Golongan Pendapatan Tahun 1993-2012

Tahun	Golongan Pendapatan			
	Rendah 40 %	Sedang 40 %	Tinggi 20 %	Gini Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1993	27,22	39,70	33,01	0,20
1994	27,84	38,21	33,96	0,21
1997	28,49	39,91	31,59	0,19
2002	26,52	37,68	35,80	0,23
2003 ^{*)}	20,09	41,09	38,16	0,28
2004	28,51	39,79	31,70	0,19
2005	26,29	38,57	35,14	0,23
2006 ^{*)}	18,82	42,80	38,38	0,23
2008 ^{*)}	25,99	37,92	36,09	0,229
2010	26,73	39,74	33,53	0,23
2012	20,26	33,17	46,57	0,345

Sumber: BPS Kab. Kebumen dan BPS Prop. Jawa Tengah

Catatan : ^{*)} Hasil Olah Suseda

Dampak krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 ternyata tidak berpengaruh terhadap angka ketimpangan (Gini Rasio), hal ini diperlihatkan dengan gini rasio 0,229 pada tahun 2008 (Suseda) yang tidak menunjukkan perubahan yang berarti dibandingkan kondisi tahun 2006. Demikian juga kondisi pada tahun 2010 (Susenas) yang kondisinya relatif sama dibandingkan tahun 2008. Sedangkan pada tahun 2012 (Susenas), dengan Gini Rasio sebesar 0,345 sudah mendekati ambang batas ketimpangan sedang yang sebesar 0,35. Tingginya angka Gini Rasio pada tahun 2012 memberi sinyal bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kebumen belum dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk.

Gambaran seperti ini dibutuhkan dalam lingkup regional kabupaten agar perencanaan pembangunan, khususnya pada era Otonomi Daerah dimana Pemerintah Kabupaten diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang berujung pada laju pertumbuhan yang tinggi tetapi juga diikuti dengan ketimpangan pendapatan yang rendah.

BAB III

METODOLOGI

3. 1. Ruang Lingkup

Penghitungan pola konsumsi dan distribusi pendapatan di Kabupaten Kebumen tahun 2014 didasarkan atas data Survei Sosial Ekonomi Daerah (SUVEDA) 2014. Pelaksanaan Suseda 2014 di Kabupaten Kebumen dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2014 meliputi seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen.

Rancangan sampel yang digunakan pada Suseda 2014 adalah rancangan sampel bertahap dua dimana pemilihan sampel untuk daerah perkotaan dan daerah pedesaan dilakukan secara terpadu dengan mengurutkan blok sensus pedesaan dilanjutkan blok sensus perkotaan dalam satu kecamatan. Tahap pertama dari kerangka sampel Blok Sensus dalam satu kecamatan dipilih sejumlah Blok Sensus secara linier sistematis sampling dengan banyaknya Blok Sensus dalam tiap kecamatan adalah proporsional terhadap jumlah Blok Sensus Kabupaten. Tahap kedua dipilih 16 rumah tangga secara linier sistematis sampling pada masing-masing Blok Sensus terpilih.

Pada pelaksanaan Suseda 2014 dicakup sebanyak 180 Blok Sensus dari sebanyak 3.221 Blok Sensus. Dari masing-masing Blok Sensus dipilih sebanyak 10 rumah tangga, sehingga banyaknya rumah tangga terpilih adalah 1.800 rumah tangga.

3. 2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara langsung antara pencacah dengan responden. Wawancara dilakukan dua tahap, yaitu tahap pertama menanyakan keterangan tentang rumah tangga kepada kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang mewakilinya, tahap kedua menanyakan keterangan individu kepada masing-masing anggota rumah tangga.

Data Suseda khususnya rata-rata pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga diolah untuk melihat ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Kebumen. Dipilih pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga sebagai proksi dari pendapatan, dengan alasan pertama, dari pengalaman di lapangan wawancara pada rumah tangga terpilih, sulit untuk memperoleh jawaban yang cermat tentang pendapatan; kedua, kalau ditanyakan tentang pendapatannya rumah tangga/penduduk cenderung memberikan

jawaban yang lebih rendah dari sebenarnya sehingga sering terjadi pengeluaran konsumsi lebih besar dari pendapatannya. Dengan demikian data pendapatan yang diperoleh dari survei dikategorikan *underestimate*.

3.3. Pengolahan Data

Pada dasarnya pengolahan data dilakukan melalui dua proses, yaitu proses manual dan proses komputer. Proses manual meliputi kegiatan pengecekan awal atas kelengkapan isian daftar pertanyaan, penyuntingan (*editing*) terhadap isian yang tidak wajar termasuk hubungan keterkaitan (*konsistensi*) antara jawaban yang satu dengan jawaban yang lain, serta proses pemberian kode-kode (*coding*). Proses komputer meliputi perekaman data (*data entry*), tabulasi, pemeriksaan konsistensi antar isian dalam kuesioner dan proses komputer lanjutan.

3.4. Metode Estimasi

Sesuai dengan teknik sampling yang digunakan, maka hasil pelaksanaan Suseda 2014 diperkirakan dengan formula sebagai berikut:

$$\bar{Y}_k = \frac{1}{10 \cdot b} \sum_{i=1}^b \sum_{j=1}^{10} Y_{ij} \quad \text{dan} \quad \hat{Y}_k = P_k \bar{Y}_k$$

dimana :

$\bar{Y}_k$ = perkiraan nilai rata-rata karakteristik y di kecamatan k

$\hat{Y}_k$ = perkiraan nilai total karakteristik y di kecamatan k

Y_{ij} = nilai karakteristik pada rumah tangga ke- j , blok sensus ke- i

b = banyaknya blok sensus terpilih di kecamatan k

P_k = perkiraan jumlah rumah tangga di kecamatan ke- k

3.5. Metode Analisis

Banyak metode yang bisa digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan. Dalam penelitian ini distribusi pendapatan diukur dari nilai konsumsi rumahtangga penduduk. Metode analisis yang digunakan untuk melihat pemerataan pendapatan adalah Gini Rasio dan Kriteria Bank Dunia. Kedua metode ini digunakan mengingat bahwa kedua metode tersebut telah banyak digunakan di berbagai negara maupun daerah lain di Indonesia, sehingga hasil penelitian ini bisa dibandingkan dengan penelitian di daerah lain.

3.5.1. Gini Rasio

Gini ratio dapat digambarkan dalam kurva Lorentz yang memberi gambaran tentang distribusi pendapatan penduduk. Kurva Lorentz didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan hubungan antara persentase kumulatif banyaknya rumahtangga/penduduk dan persentase kumulatif pendapatan yang diterima, apabila unit pendapatan ditata menurut urutan naik (Nanak C. Karwani, 1980).

Rumus untuk menghitung Gini Rasio adalah sebagai berikut:

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10.000}$$

dimana :

G = Gini Ratio

P_i = Persentase rumahtangga/penduduk sampai dengan kelompok ke- (i)

Q_i = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelompok ke- (i)

Q_{i-1} = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelompok ke- (i)

k = Banyaknya kelompok pendapatan

3.5.2. Interpretasi Gini Ratio

Angka Gini Rasio bernilai antara 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio berarti ketimpangan pendapatan semakin besar . (gap/jurang pemisah antara si kaya dan si miskin lebar). Sebaliknya, semakin rendah nilai Gini Ratio berarti ketimpangan pendapatan semakin rendah

Secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

G=0 → pemerataan sempurna

0,00 < G ≤ 0,35 → pemerataan tinggi/ ketimpangan rendah

0,35 < G < 0,50 → pemerataan sedang/ ketimpangan sedang

G ≥ 0,50 → pemerataan rendah / ketimpangan tinggi

G =1 → ketimpangan sempurna

3.5.3. Ukuran Ketimpangan Bank Dunia

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok pendapatan.

Pertama : 40 persen penduduk berpendapatan rendah,

Kedua : 40 persen penduduk berpendapatan menengah,

Ketiga : 20 persen penduduk berpendapatan tinggi.

Untuk melihat pemerataan pendapatan, Bank Dunia memfokuskan perhatiannya pada perkembangan pendapatan 40 persen penduduk berpendapatan terendah saja. Pemerataan diukur berdasarkan persentase pendapatan yang diterima 40 persen penduduk berpendapatan rendah.

Dalam menentukan besarnya desil ke-*i* digunakan rumus :

$$D_i = Q_b + \frac{(n_i + P_b)}{(P_a - P_b)} (Q_a - Q_b)$$

dimana:

N_i : Persentase ke-*i*

D_i : Desil ke-*i*

Q_b : % kumulatif dari kelas pendapatan sebelum D_i

Q_a : % kumulatif dari kelas pendapatan sesudah D_i

P_b : % kumulatif dari jumlah pendapatan sebelum D_i

P_a : % kumulatif dari jumlah pendapatan sesudah D_i

i : 1,2,...,10

3.5.4. Interpretasi Ketimpangan Bank Dunia

Tingkat ketimpangan pembagian pendapatan diukur dengan besarnya bagian pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpenghasilan rendah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tingkat ketimpangan digolongkan tinggi, apabila penduduk kelompok rendah menerima lebih kecil dari 12 persen jumlah pendapatan ($I < 12\%$).
2. Tingkat ketimpangan dikategorikan sedang, apabila penduduk kelompok rendah menerima antara 12 persen - 17 persen dari jumlah pendapatan ($12\% \leq I \leq 17\%$).
3. Tingkat ketimpangan dikatakan rendah, apabila penduduk kelompok rendah menerima lebih dari 17 persen dari jumlah pendapatan ($17\% < I$).

3.6. Konsep/Definisi

Blok Sensus adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang mempunyai batas-batas alam maupun buatan dan diperkirakan tidak akan berubah dalam jangka waktu sepuluh tahun. Pada umumnya blok sensus mencakup sekitar 80 – 120 rumah tangga atau bangunan fisik bukan tempat tinggal atau dapat juga merupakan

gabungan dari keduanya. Pada wilayah tertentu, blok sensus kemungkinan tidak mempunyai batas yang jelas bila berbatasan dengan hutan, gunung, perkebunan, persawahan atau batasnya berhimpit dengan batas kecamatan, kabupaten atau propinsi.

Segmen adalah bagian dari blok sensus yang mempunyai batas-batas yang jelas. Besarnya segmen tidak dibatasi oleh banyaknya rumahtangga atau bangunan fisik.

Bangunan fisik adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik tetap maupun sementara, baik digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Bangunan yang luasnya kurang dari sepuluh meter persegi dan tidak digunakan untuk tempat tinggal dianggap bukan bangunan fisik.

Bangunan Sensus adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar masuk sendiri dan digunakan untuk satu kesatuan kegunaan.

Rumahtangga biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan satu dapur. Umumnya rumahtangga biasa terdiri dari bapak, ibu, dan anak. *Juga dianggap sebagai rumahtangga biasa* antara lain :

- 1) Seorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi makannya diurus sendiri;
- 2) Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam kelompok segmen yang sama;
- 3) Pondokan dengan makan (indekost) yang pemondoknya kurang dari 10 orang. Pemondok dianggap sebagai anggota rumahtangga induk semang;
- 4) Pengurus asrama, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan dan sejenisnya yang sendirian atau bersama anak istrinya serta anggota rumahtangga lainnya makan dari satu dapur yang terpisah dari lembaga yang diurusnya;
- 5) Masing-masing orang yang bersama-sama menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi mengurus makannya sendiri-sendiri, misalnya 3 orang mahasiswa menyewa satu kamar dan mengurus makannya sendiri-sendiri, mereka dianggap 3 rumahtangga biasa.

Kepala rumahtangga (krt) adalah seorang dari sekelompok anggota rumahtangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumahtangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala dalam rumahtangga tersebut.

Anggota rumahtangga (art) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumahtangga, baik yang berada di rumahtangga waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. Art yang telah bepergian 6 bulan atau lebih dan art yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih, tidak dianggap sebagai art. Orang yang telah tinggal 6 bulan atau lebih atau yang telah tinggal di rt kurang dari 6 bulan tetapi berniat pindah/bertempat tinggal di rt tersebut 6 bulan atau lebih dianggap sebagai art.

Pengeluaran/konsumsi rumahtangga sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rt sebulan untuk konsumsi rumahtangga. Konsumsi rumahtangga dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan bukan makanan. Konsumsi makanan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan makanan termasuk makanan jadi, rokok dan tembakau. Konsumsi bukan makanan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk biaya perumahan, pendidikan, kesehatan, aneka barang dan jasa, pakaian, dan barang tahan lama tanpa memperhatikan asal barang.

Distribusi pendapatan adalah banyaknya pendapatan yang diterima oleh masing-masing rumahtangga/penduduk suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Dalam penelitian ini distribusi pendapatan diukur dari nilai konsumsi rumahtangga/penduduk.

Gini rasio adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan suatu masyarakat/bangsa di suatu daerah.

Pola konsumsi adalah kecenderungan rumahtangga/penduduk membelanjakan pendapatannya dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga/penduduk tersebut yaitu konsumsi makanan dan bukan makanan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

4.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 128.111,50 Ha atau 1.281,115 km². Secara geografis Kabupaten Kebumen terletak diantara 7⁰27' – 7⁰ 50' Lintang selatan dan 109⁰ 22' – 109⁰ 50' Bujur timur. Sedangkan secara topografi, terletak pada ketinggian antara 5 meter - 91 meter di atas permukaan air laut. Sebagian besar wilayah terletak pada ketinggian di bawah 40 meter. Pada umumnya yang mempunyai ketinggian di atas 50 meter berada di wilayah Kabupaten Kebumen sebelah Utara bagian barat (Sempor 66 meter dan Karanggayam 91 meter).

Posisi Kabupaten Kebumen yang terletak pada bagian selatan Propinsi Jawa Tengah berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo
- Sebelah Timur : Kabupaten Purworejo
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas

Secara administratif, Kabupaten Kebumen terbagi menjadi 26 kecamatan, 449 desa, dan 11 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Karanggayam dengan luas wilayah 10.929,00 Ha atau 109,29 km². Jarak terjauh dari Ibukota kabupaten ke Ibukota kecamatan adalah Kecamatan Ayah (37 Km).

Sebagian besar lahan di Kabupaten Kebumen merupakan lahan kering yaitu mencapai 88.280,50 Ha atau 68,91 persen. Luas lahan sawah 39.831,00 Ha atau 31,09 persen, sedangkan tanah yang digunakan untuk bangunan dan sekitarnya seluas 35.931,00 Ha atau 28,05 persen, secara rinci penggunaan lahan terlihat pada tabel 4.1.2. Dari tabel tersebut dapat juga diketahui bahwa sebagian besar lahan sawah merupakan sawah irigasi teknis yaitu mencapai 18.247,00 Ha atau 45,81 persen dari total lahan sawah. Sawah tadah hujan luasnya 13.486,00 Ha atau 33,86 persen dari total lahan sawah.

Tabel 4.1.1 Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten, Luas Wilayah dan Banyaknya Desa/Kelurahan di Kabupaten Kebumen

Kecamatan	Jarak Ke Ibukota Kabupaten (Km)	Luas Wilayah (Km ²)	Banyaknya		
			Desa	Kelurahan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Ayah	37,00	76,370	18	-	18
02 Buayan	31,00	68,420	20	-	20
03 Puring	37,50	61,970	23	-	23
04 Petanahan	15,00	44,840	21	-	21
05 Klirong	10,00	43,250	24	-	24
06 Buluspesantren	14,00	48,770	21	-	21
07 Ambal	20,00	62,410	32	-	32
08 Mirit	28,00	52,350	22	-	22
09 Bonorowo	25,00	20,910	11	-	11
10 Prembun	21,00	22,960	13	-	13
11 Padureso	38,00	28,950	9	-	9
12 Kutowinangun	12,00	33,730	19	-	19
13 Alian	12,00	57,750	16	-	16
14 Poncowarno	13,00	27,370	11	-	11
15 Kebumen	-	42,040	24	5	29
16 Pejagoan	2,00	34,580	13	-	13
17 Sruweng	6,00	43,680	21	-	21
18 Adimulyo	19,00	43,430	23	-	23
19 Kuwarasan	28,00	33,840	22	-	22
20 Rowokele	35,00	53,795	11	-	11
21 Sempor	29,00	100,150	16	-	16
22 Gombong	21,00	19,480	12	2	14
23 Karanganyar	13,00	31,400	7	4	11
24 Karanggayam	19,00	109,290	19	-	19
25 Sadang	33,00	54,230	7	-	7
26 Karangsambung	20,00	65,150	14	-	14
Kabupaten Kebumen	XXX	1.281,115	449	11	460

Sumber : Kebumen Dalam Angka 2014

Tabel 4.1.2. Luas Penggunaan Tanah/Lahan di Kabupaten Kebumen Tahun 2014

Jenis Penggunaan	Luas (Ha)	Persen (%)
(1)	(2)	(3)
TANAH SAWAH / Wetlands	39.748,00	31,03
1. Irigasi Teknis / <i>Technical Irrigation</i>	20.000,00	15,61
2. Irigasi Setengah Teknis / <i>Semi Technical Irrigation</i>	3.669,00	2,86
3. Irigasi Sederhana PU / <i>PU Simple Irrigation</i>	2.293,00	1,79
4. Irigasi Desa / <i>Villages Irrigation</i>	1.130,00	0,88
5. Tadah hujan dan pasang surut / <i>Non Irrigational</i>	12.656,00	9,88
TANAH KERING / Drylands	88.343,50	68,97
1. Untuk Pertanian / Farmland	42.799,50	33,41
- Tegalan/kebun / <i>Dry plantations</i>	27.629,00	21,57
- Ladang/huma	745,00	0,58
- Perkebunan / <i>Plantation</i>	1.159,00	0,90
- Hutan rakyat / <i>Private forest</i>	3.011,00	2,35
- Tambak / <i>Brackish ponds</i>	24,00	0,02
- Kolam/tebat/empang / <i>Ponds</i>	53,50	0,04
- Padang penggembalaan/rumput / <i>Meadow</i>	33,00	0,03
- Sementara tdk diusahakan / <i>Temporary fallow lands</i>	231,00	0,18
- Lainnya / <i>Others</i>	9.914,00	7,74
2. Bukan untuk Pertanian / Not for Agriculture use	45.544,00	35,56
- Rumah/bangunan dan lahan sekitarnya / <i>Structure and surroundings</i>	26.021,00	20,31
- Hutan negara / <i>State forest</i>	16.861,00	13,16
- Rawa-rawa / <i>Marshland</i>	12,00	0,01
- Lainnya / <i>Others</i>	2.650,00	2,07
JUMLAH	128.091,50	100,00

Sumber : Kebumen Dalam Angka 2014

4.2. Perekonomian

Indikator perekonomian yang dikenal luas untuk mengukur hasil-hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB tersebut selain dapat diketahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga dapat dilihat kontribusi masing-masing sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diperlihatkan dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan 2000.

Tingkat pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh perubahan nilai total PDRB tahun bersangkutan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari Tabel 4.2.1. dibawah dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 secara agregat PDRB Kabupaten Kebumen menurut harga berlaku naik sebesar 923,94 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 11,68

persen. Angka laju pertumbuhan ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun 2012 yang tercatat sebesar 10,80 persen. Sedangkan menurut harga konstan 2000, PDRB tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar 136,05 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 4,20 persen dibandingkan tahun 2012. Pertumbuhan ekonomi riil sebesar 4,20 persen pada tahun 2013 ini lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2012 yang sebesar 5,59 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya pelambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 yang salah satu sebabnya adalah pada sektor pertanian. Tabel 4.2.1. juga menunjukkan rata-rata pertumbuhan ekonomi selama empat tahun terakhir (2009 - 2013) atas dasar harga berlaku sebesar 10,76 persen dan atas dasar harga konstan 2000 sebesar 4,54 persen.

Tabel 4.2.1. PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013

Tahun	PDRB (Miliar Rupiah)		Laju Pertumbuhan (%)	
	Berlaku	Konstan 2000	Berlaku	Konstan 2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2009	5.855,36	2.828,40	-	-
2010	6.484,24	2.945,83	10,74	4,15
2011	7.122,25	3.070,38	9,84	4,23
2012	7.911,38	3.242,11	10,80	5,59
2013	8.835,32	3.378,16	11,68	4,20

Sumber : PDRB Kabupaten Kebumen Tahun 2013

Pada penghitungan PDRB, kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) sektor, yaitu : Pertanian; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Listrik, Gas dan Air Bersih; Konstruksi/Bangunan; Perdagangan; Hotel dan Rumah Makan; Angkutan dan Komunikasi; Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; Jasa-jasa.

Tabel 4.2.2. Struktur Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2013 Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)

No	LAPANGAN USAHA	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertanian	33,60	34,23	32,56
2	Pertambangan dan Penggalian	7,83	7,68	7,57
3	Industri Pengolahan	10,54	10,43	10,74
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	1,02	0,98	1,05
5	Bangunan & Konstruksi	4,34	4,40	4,36
6	Perdagangan	11,27	11,28	11,84
7	Angkutan dan Komunikasi	5,37	5,21	5,75
8	Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4,77	4,71	4,65
9	Jasa-jasa	21,26	21,08	21,48
PDRB		100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Kabupaten Kebumen Tahun 2013

Peranan sektor-sektor di atas dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kebumen disajikan pada Tabel 4.2.2. dan terlihat pada tahun 2013 sektor pertanian masih memberikan kontribusi yang paling besar (32,56 %), diikuti sektor jasa-jasa (21,48 %), dan sektor perdagangan, hotel dan rumah makan (11,22 %). Dalam setahun terakhir sektor pertanian menunjukkan penurunan peranan yang cukup besar (1,67 %), hal ini sejalan dengan melambatnya ekonomi Kabupaten Kebumen dari 5,59 pada tahun 2012 menjadi 4,20 persen pada tahun 2013.

Salah satu sisi untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pendapatan perkapita yang didekati dengan nilai PDRB perkapita. Perkembangan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku, selama ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 PDRB perkapita Kabupaten Kebumen mencapai 5,04 juta rupiah, dan pada tahun 2013 sudah mencapai 7,51 juta rupiah.

Berdasarkan harga konstan 2000, nilai PDRB perkapita meningkat dari 2,44 juta rupiah pada tahun 2009 menjadi 2,87 juta rupiah pada tahun 2013. Selama 4 tahun terakhir terlihat bahwa PDRB perkapita atas dasar harga berlaku meningkat 2,47 juta rupiah atau tumbuh sebesar 48,84 persen, sedangkan atas dasar harga konstan meningkat 0,43 juta rupiah atau tumbuh sebesar 17,81 persen.

Tabel 4.2.3. Pendapatan per Kapita Kabupaten Kebumen Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 Tahun 2009-2013

Tahun	Pendapatan per Kapita (Rupiah)		Pertumbuhan (Persen)	
	Berlaku	Konstan 2000	Berlaku	Konstan 2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2009	5.044.776	2.436.849	-	-
2010	5.581.594	2.535.750	10,64	4,06
2011	6.102.718	2.630.863	9,34	3,70
2012	6.750.116	2.766.222	10,61	5,15
2013	7.508.797	2.870.969	11,24	3,79

Sumber : PDRB Kab. Kebumen Tahun 2013

Dalam beberapa analisis, kegiatan ekonomi sering dikelompokkan berdasarkan output maupun input dari asal terjadinya proses produksi yang meliputi 3 kelompok sektor, yaitu :

1. Sektor primer, yang mencakup sektor Pertanian dan sektor Pertambangan/ penggalan. Kelompok sektor ini inputnya dari alam.
2. Sektor Sekunder, mencakup sektor Industri, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, dan Sektor Bangunan. Input sektor ini berasal dari sektor primer.
3. Sektor Tersier, mencakup sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah makan, sektor Angkutan dan Komunikasi, sektor Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta sektor Jasa-jasa. Umumnya sektor ini inputnya berasal dari sektor sekunder dan outputnya berupa service (jasa).

Berdasarkan harga berlaku sektor tersier menopang paling besar pembentukan PDRB Kabupaten Kebumen tahun 2013 yaitu sebesar 43,72 persen, diikuti oleh sektor primer 40,13 persen, dan sektor sekunder paling rendah kontribusinya yaitu hanya sebesar 16,15 persen. Peranan sektor tersier pada tahun 2013 yang meningkat salah satu sebabnya adalah turunnya produksi sektor pertanian pada sektor primer.

Tabel 4.2.4. Distribusi Persentase Kelompok Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2013

Kelompok Sektor	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
Primer	41,43	41,91	40,13
Sekunder	15,90	15,81	16,15
Tersier	42,67	42,28	43,72

Sumber : PDRB Kabupaten Kebumen Tahun 2013

4.3. Kependudukan

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan, penduduk menjadi faktor penentu, karena penduduk tidak saja berperan sebagai pelaku tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Oleh karena itu manajemen kependudukan perlu diarahkan pada *pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas* serta *pengarahan mobilitas* sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan.

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen tergolong besar. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 1980 jumlah penduduk Kabupaten Kebumen tercatat 1.032.226 jiwa, kemudian pada tahun 1990 bertambah menjadi 1.120.882 jiwa, dan pada Sensus Penduduk tahun 2000 meningkat menjadi 1.164.940 jiwa. Dari data tersebut terlihat secara absolut jumlah penduduk Kabupaten Kebumen terus bertambah, tetapi bila dilihat dari persentase pertumbuhan dari tahun ke tahun cenderung menurun. Rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun pada periode 1980 - 1990 sebesar 0,78 persen, dan pada periode 1990 - 2000 menurun menjadi 0,39 persen. Pada tahun 2014 penduduk Kabupaten Kebumen telah bertambah menjadi 1.185.544 jiwa, atau tumbuh sebesar 0,13 persen per tahun selama 13 tahun terakhir.

Tabel 4.3.1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Kebumen Tahun 2014

Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Penduduk		Kepadatan Penduduk
		Jumlah	Persen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Ayah	76,37	56.498	4,77	740
02 Buayan	68,42	55.074	4,65	805
03 Puring	61,97	52.873	4,46	853
04 Petanahan	44,84	53.327	4,50	1.189
05 Klirong	43,25	54.366	4,59	1.257
06 Buluspesantren	48,77	52.574	4,43	1.078
07 Ambal	62,41	54.757	4,62	877
08 Mirit	52,35	43.955	3,71	840
09 Bonorowo	20,91	18.537	1,56	887
10 Prembun	22,96	26.334	2,22	1.147
11 Padureso	28,95	13.343	1,13	461
12 Kutowinangun	33,73	42.197	3,56	1.251
13 Alian	57,75	54.069	4,56	936
14 Poncowarno	27,37	14.945	1,26	546
15 Kebumen	42,04	121.797	10,27	2.897
16 Pejagoan	34,58	48.924	4,13	1.415
17 Sruweng	43,68	53.477	4,51	1.224
18 Adimulyo	43,43	34.196	2,88	787
19 Kuwarasan	33,84	44.670	3,77	1.320
20 Rowokele	53,795	42.356	3,57	787
21 Sempor	100,15	59.205	4,99	591
22 Gombong	19,48	47.362	3,99	2.431
23 Karanganyar	31,4	34.090	2,88	1.086
24 Karanggayam	109,29	48.452	4,09	443
25 Sadang	54,23	18.163	1,53	335
26 Karangsambung	65,15	37.487	3,16	575
Kab. Kebumen	1.281,12	1.183.028	100,00	925

Sumber : Kebumen Dalam Angka 2013 dan Suseda 2014

Distribusi penduduk menurut kecamatan memperlihatkan bahwa Kecamatan Kebumen mempunyai penduduk terbanyak yaitu mencapai 122.070 jiwa atau 10,30 persen dari total penduduk Kabupaten Kebumen. Sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Padureso (pecahan kecamatan Prembun) yaitu sebanyak 13.384 jiwa atau 1,13 persen dari total penduduk Kabupaten Kebumen.

Kepadatan penduduk (*Population Density*) merupakan suatu rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah, ukuran ini dapat digunakan untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan wilayah dalam memberikan daya tampung dan daya dukung terhadap penduduk yang ada. Seiring bertambahnya penduduk, kepadatan penduduk juga meningkat pula. Pada tahun 2013 diperoleh kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen sebesar 925 jiwa/km²

Bila dilihat kepadatan penduduk menurut kecamatan seperti yang disajikan pada tabel 4.3.1. tampak berfluktuatif. Terdapat 12 kecamatan dengan kepadatan penduduk diatas kepadatan penduduk Kabupaten. Kecamatan-kecamatan tersebut rata-rata terletak disekitar pusat-pusat pengembangan seperti Kecamatan Kebumen, Gombong, Pejagoan, Kuwarasan, Klirong, Kutowinangun, Sruweng, Petanahan, Prembun, Karanganyar, Buluspesantren, dan Alian. Kecamatan Kebumen mempunyai kepadatan penduduk tertinggi (2.897 jiwa/km²), sedangkan Kecamatan Sadang dengan kepadatan penduduk terendah (335 jiwa/km²).

Komposisi penduduk menurut umur, antara lain digunakan untuk melihat struktur penduduk suatu daerah apakah termasuk Struktur penduduk muda (penduduk berusia di bawah 15 tahun sebesar 40 persen atau lebih), Struktur penduduk tua (penduduk dibawah 15 tahun proporsinya kurang dari 30 persen), Struktur penduduk sedang (penduduk dibawah 15 tahun proporsinya antara 30-40 persen dan penduduk berusia 65 tahun keatas proporsinya mencapai 10 persen atau lebih).

Penentuan struktur umur penduduk seringkali dilihat dari ***umur median***, yaitu suatu statistik yang dapat ditafsirkan sebagai umur yang membagi penduduk tepat menjadi dua bagian, struktur umur penduduk menurut umur median adalah sebagai berikut :

- Penduduk muda : Umur median < 20 tahun
- Penduduk tua : Umur median > 30 tahun
- Penduduk sedang (intermedian) : Umur median 20 – 30 tahun

Berdasarkan umur penduduk kabupaten kebumen, diperoleh jumlah penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun sebesar 311.952 jiwa atau 26,60 persen dari total penduduk, dan yang berusia 65 tahun keatas sebesar 112.158 jiwa atau 9,48 persen dari total penduduk, sedangkan umur median adalah 32,6 tahun. Dari data tersebut, maka

dapat disimpulkan bahwa struktur umur penduduk Kabupaten Kebumen termasuk kategori *tua*.

Dari umur penduduk dapat pula diketahui rasio ketergantungan (dependency ratio) sebesar 55,88 persen, yang berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun) rata-rata mempunyai beban tanggungan sebanyak 55 sampai 56 orang penduduk usia non produktif.

Komposisi penduduk Kabupaten Kebumen menurut jenis kelamin memperlihatkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dari penduduk laki-laki yang ditunjukkan oleh sex ratio sebesar 99. Terdapat 10 kecamatan yang memiliki sex ratio diatas sex ratio Kabupaten, yaitu Kecamatan, Buluspesantren, Pejagoan, Klirong, Ayah, Ambal, Puring, Petanahan, Mirit, Karanggayam, dan Sadang.

Tabel 4.3.2. Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Kebumen Tahun 2014

Kelompok Umur	Jenis kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	50.944	47.795	98.739
5-9	54.401	50.174	104.575
10-14	57.172	51.466	108.638
15-19	53.756	48.137	101.893
20-24	36.899	36.038	72.937
25-29	31.771	34.486	66.257
30-34	35.650	38.572	74.222
35-39	38.744	41.133	79.877
40-44	41.368	43.723	85.091
45-49	40.895	43.883	84.778
50-54	37.545	40.372	77.917
55-59	32.538	33.147	65.685
60-64	25.488	24.773	50.261
65-69	18.256	19.762	38.018
70-74	14.388	16.133	30.521
75 +	19.376	24.243	43.619
Jumlah	589.191	593.837	1.183.028

Sumber : Suseda Kabupaten Kebumen 2014

Tabel 4.3.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Kabupaten Kebumen Tahun 2014

No.	Kecamatan	Jenis kelamin		Sex Rasio
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	Ayah	28.839	27.659	101
02.	Buayan	26.981	28.093	99
03.	Puring	26.649	26.224	101
04.	Petanahan	26.901	26.426	102
05.	Klirong	27.266	27.100	101
06.	Buluspesantren	26.326	26.248	100
07.	Ambal	27.590	27.167	101
08.	Mirit	22.198	21.757	102
09.	Bonorowo	9.198	9.339	98
10.	Prembun	12.925	13.409	96
11.	Padureso	6.576	6.767	97
12.	Kutowinangun	20.626	21.571	96
13.	Alian	26.961	27.108	99
14.	Poncowarno	7.271	7.674	95
15.	Kebumen	60.682	61.115	99
16.	Pejagoan	24.560	24.364	101
17.	Sruweng	26.411	27.066	98
18.	Adimulyo	16.698	17.498	95
19.	Kuwarasan	22.213	22.457	99
20.	Rowokele	20.932	21.424	98
21.	Sempor	29.171	30.034	97
22.	Gombong	23.115	24.247	95
23.	Karanganyar	16.727	17.363	95
24.	Karanggayam	24.482	23.970	102
25.	Sadang	9.253	8.910	104
26.	Karangsambung	18.640	18.847	99
Kabupaten Kebumen		590.051	595.493	99

Sumber : Suseda Kabupaten Kebumen 2014

BAB V

RATA-RATA PENDAPATAN DAN POLA KONSUMSI PENDUDUK KABUPATEN KEBUMEN

5.1. Sumber Penghasilan Rumah Tangga

Sebelum membahas tentang pemerataan pendapatan akan dibahas terlebih dahulu masalah angkatan kerja, karena ada keterkaitan yang erat antara sumber penghasilan rumahtangga, pendapatan dan angkatan kerja. Konsep angkatan kerja yang digunakan dalam Survei Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA) 2014 adalah konsep kegiatan seminggu sebelum pencacahan (seminggu yang lalu) bagi penduduk berumur 10 tahun ke atas. Mengacu pada Undang Undang Ketenagakerjaan maka dalam publikasi ini cakupan penduduk usia kerja merujuk pada usia 15 tahun ke atas. Berdasarkan hasil SUSEDA jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Kebumen adalah 871.076 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut sebagian dikelompokkan sebagai **angkatan kerja** (70,87 %) dan sebagian lagi dikelompokkan sebagai **bukan angkatan kerja** (29,12 %). Komposisi penduduk berumur 15 tahun ke atas seperti tercantum pada Tabel 5.1.1.

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat daya serap tenaga kerja sektor-sektor perekonomian yang ada di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan gambaran tersebut akan terlihat hubungan antara sektor ekonomi dan pendapatan rumahtangga/penduduk Kabupaten Kebumen. Hasil pengolahan Suseda 2014 memperlihatkan bahwa sekitar 35,22 persen dari penduduk yang bekerja ada pada sektor pertanian meningkat dibandingkan kondisi tahun 2013 yang sebesar 34,01 persen. Sedangkan sektor lain, untuk sektor perdagangan menyerap tenaga kerja sebesar 19,62 persen menurun dari sebelumnya pada tahun 2013 yang sebesar 20,47 persen, untuk sektor industri menurun dari sebelumnya sebesar 18,84 persen pada tahun 2013 menjadi sebesar 16,59 persen, dan sektor jasa-jasa yang sebesar 12,34 persen meningkat tipis dari sebelumnya 12,14 persen pada tahun 2013.

Tabel 5.1.1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kecamatan dan Kegiatan Seminggu Yang Lalu Di Kabupaten Kebumen Tahun 2013

No	Kecamatan	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja	Total
		Bekerja	Mencari Pekerjaan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Ayah	78,54	8,36	13,10	100
02.	Buayan	64,30	3,07	32,63	100
03.	Puring	70,96	1,10	27,94	100
04.	Petanahan	73,04	2,84	24,12	100
05.	Klirong	77,79	5,16	17,04	100
06.	Buluspesantren	71,49	3,36	25,14	100
07.	Ambal	81,87	13,32	4,81	100
08.	Mirit	67,34	5,79	26,87	100
09.	Bonorowo	70,92	7,27	21,81	100
10.	Prembun	67,25	7,29	25,46	100
11.	Padureso	79,17	0,00	20,83	100
12.	Kutowinangun	69,91	0,47	29,63	100
13.	Alian	65,44	6,13	28,43	100
14.	Poncowarno	87,98	0,00	12,02	100
15.	Kebumen	64,16	2,72	33,12	100
16.	Pejagoan	60,10	1,05	38,85	100
17.	Sruweng	50,25	0,00	49,75	100
18.	Adimulyo	64,95	9,51	25,54	100
19.	Kuwarasan	65,74	7,07	27,18	100
20.	Rowokele	59,72	9,49	30,79	100
21.	Sempor	56,10	8,48	35,42	100
22.	Gombong	58,11	8,04	33,85	100
23.	Karanganyar	63,18	0,00	36,82	100
24.	Karanggayam	57,90	1,45	40,65	100
25.	Sadang	61,41	1,76	36,83	100
26.	Karangsambung	79,48	3,39	17,13	100
Kabupaten Kebumen		66,22	4,65	29,12	100

Sumber : Suseda Kabupaten Kebumen 2014

Tabel 5.1.2. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kecamatan dan Lapangan Usaha Utama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Kebumen Tahun 2014

No	Kecamatan	Lapangan Pekerjaan					Total
		Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01.	Ayah	14,24	50,44	17,04	9,90	8,39	100
02.	Buayan	24,75	22,78	25,62	10,56	16,29	100
03.	Puring	63,18	6,34	19,45	6,30	4,74	100
04.	Petanahan	28,25	18,33	29,13	6,39	17,90	100
05.	Klirong	42,68	31,97	9,75	3,16	12,44	100
06.	Buluspesantren	48,38	13,70	22,15	13,33	2,43	100
07.	Ambal	52,59	12,51	11,16	14,97	8,77	100
08.	Mirit	52,09	7,21	17,91	13,36	9,43	100
09.	Bonorowo	57,63	18,99	11,53	6,38	5,47	100
10.	Prembun	25,78	8,30	27,69	19,90	18,34	100
11.	Padureso	81,40	7,97	1,89	2,94	5,81	100
12.	Kutowinangun	48,10	0,96	30,23	10,72	10,00	100
13.	Alian	35,80	5,91	23,35	14,58	20,35	100
14.	Poncowarno	89,08	4,04	1,84	4,03	1,01	100
15.	Kebumen	8,80	11,03	29,14	24,65	26,38	100
16.	Pejagoan	13,54	32,30	14,77	17,76	21,62	100
17.	Sruweng	8,40	33,16	13,74	16,56	28,15	100
18.	Adimulyo	44,94	7,48	15,36	10,66	21,56	100
19.	Kuwarasan	21,32	28,86	19,04	11,68	19,11	100
20.	Rowokele	43,13	20,95	10,60	9,48	15,84	100
21.	Sempor	21,62	7,15	32,50	11,47	27,26	100
22.	Gombong	14,50	2,59	27,81	20,43	34,67	100
23.	Karanganyar	20,48	24,73	23,73	14,89	16,17	100
24.	Karanggayam	48,68	14,33	13,98	6,93	16,08	100
25.	Sadang	82,07	0,00	5,77	3,50	8,66	100
26.	Karangsambung	54,25	8,92	9,11	7,14	20,57	100
Kab. Kebumen		35,22	16,59	19,62	12,34	16,24	100

Sumber : Suseda Kabupaten Kebumen 2014

Tabel 5.1.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penghasilan Utama Rumahtangga di Kabupaten Kebumen Tahun 2014

No	Kecamatan	Lapangan Pekerjaan					Penerima Pendapatan	Total
		Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa	Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01.	Ayah	20,00	16,25	18,75	8,75	33,75	2,50	100,00
02.	Buayan	24,44	12,22	25,56	6,67	27,78	3,33	100,00
03.	Puring	43,75	6,25	25,00	3,75	6,25	15,00	100,00
04.	Petanahan	20,00	12,50	28,75	3,75	27,50	7,50	100,00
05.	Klirong	42,22	23,33	5,56	2,22	22,22	4,44	100,00
06.	Buluspesantren	48,75	15,00	16,25	6,25	6,25	7,50	100,00
07.	Ambal	48,75	8,75	8,75	13,75	13,75	6,25	100,00
08.	Mirit	51,43	5,71	20,00	14,29	8,57	0,00	100,00
09.	Bonorowo	27,78	22,22	11,11	8,33	25,00	5,56	100,00
10.	Prembun	22,00	8,00	20,00	18,00	24,00	8,00	100,00
11.	Padureso	83,33	6,67	0,00	3,33	6,67	0,00	100,00
12.	Kutowinangun	41,18	1,47	25,00	10,29	13,24	8,82	100,00
13.	Alian	28,33	10,00	20,00	10,00	25,00	6,67	100,00
14.	Poncowarno	94,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	100,00
15.	Kebumen	8,89	11,11	24,44	14,44	30,00	11,11	100,00
16.	Pejagoan	8,75	27,50	15,00	15,00	26,25	7,50	100,00
17.	Sruweng	8,33	23,33	11,67	13,33	35,00	8,33	100,00
18.	Adimulyo	41,43	10,00	11,43	14,29	21,43	1,43	100,00
19.	Kuwarasan	31,67	16,67	6,67	10,00	26,67	8,33	100,00
20.	Rowokele	42,86	15,71	10,00	7,14	18,57	5,71	100,00
21.	Sempor	18,75	5,00	30,00	13,75	25,00	7,50	100,00
22.	Gombong	12,86	1,43	34,29	12,86	25,71	12,86	100,00
23.	Karanganyar	37,50	12,50	8,33	6,25	12,50	22,92	100,00
24.	Karanggayam	50,72	14,49	10,14	2,90	15,94	5,80	100,00
25.	Sadang	74,00	0,00	6,00	6,00	10,00	4,00	100,00
26.	Karangsambung	35,00	5,00	11,67	6,67	38,33	3,33	100,00
Kabupaten Kebumen		34,95	11,65	16,68	9,14	20,79	6,80	100,00

Sumber : Suseda Kabupaten Kebumen 2014

Tabel 5.1.4 Rata-rata Pengeluaran Penduduk Perkapita Menurut Sumber Penghasilan Utama Rumah tangga Tahun 2013 di Kabupaten Kebumen

No	Kecamatan	Lapangan Pekerjaan					Penerima Penda patan	Total
		Perta nian	Industri	Perdaga ngan	Jasa	Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01.	Ayah	540.382	404.228	555.491	633.832	462.945	819.479	492.039
02.	Buayan	417.707	370.432	570.199	539.027	414.947	568.409	462.972
03.	Puring	418.956	382.588	400.638	514.330	601.526	477.512	432.661
04.	Petanahan	547.287	501.817	559.448	674.445	518.914	684.645	540.321
05.	Klirong	470.882	402.174	669.184	851.636	434.711	1.141.108	479.897
06.	Buluspesantren	467.893	610.642	560.092	568.532	815.879	786.180	542.251
07.	Ambal	510.020	365.920	750.544	701.884	482.946	784.433	539.346
08.	Mirit	392.823	507.180	401.353	605.093	353.769	NA	421.941
09.	Bonorowo	427.152	451.924	672.614	776.018	467.547	769.486	511.891
10.	Prembun	420.543	538.439	865.753	526.647	506.951	836.552	582.799
11.	Padureso	317.784	358.124	NA	437.406	558.838	NA	358.331
12.	Kutowinangun	416.447	937.194	459.803	629.801	491.482	735.536	493.286
13.	Alian	377.049	426.809	395.515	607.716	409.843	692.071	439.422
14.	Poncowarno	505.006	596.304	NA	700.655	NA	NA	500.406
15.	Kebumen	434.212	398.189	571.501	913.520	472.039	894.616	571.364
16.	Pejagoan	326.328	457.561	479.530	759.880	385.214	605.654	462.230
17.	Sruweng	401.746	469.703	404.281	563.337	407.966	515.559	433.884
18.	Adimulyo	471.619	584.249	516.933	512.450	510.300	311.974	498.108
19.	Kuwarasan	427.958	382.858	434.845	422.267	516.209	369.634	445.629
20.	Rowokele	388.881	316.409	303.716	515.246	368.142	614.300	465.630
21.	Sempor	448.224	547.940	505.568	901.629	478.039	650.970	537.996
22.	Gombong	502.929	617.011	548.865	695.610	496.467	682.841	523.151
23.	Karanganyar	388.553	425.980	287.882	398.815	382.939	733.700	398.865
24.	Karanggayam	386.267	288.506	537.883	385.372	355.222	537.585	367.597
25.	Sadang	366.594	NA	473.838	355.263	453.244	621.870	378.908
26.	Karangsambung	512.928	507.194	498.785	641.120	563.850	662.396	537.796
Kabupaten Kebumen		436.061	433.480	514.184	650.423	461.339	672.390	486.232

Sumber : Suseda Kabupaten Kebumen 2014

Berdasarkan sumber penghasilan utama rumah tangga terlihat bahwa sektor pertanian masih dominan karena sekitar 34,95 persen lebih rumah tangga di Kabupaten Kebumen mengandalkan sektor pertanian sebagai tumpuan utama penghasilan utama

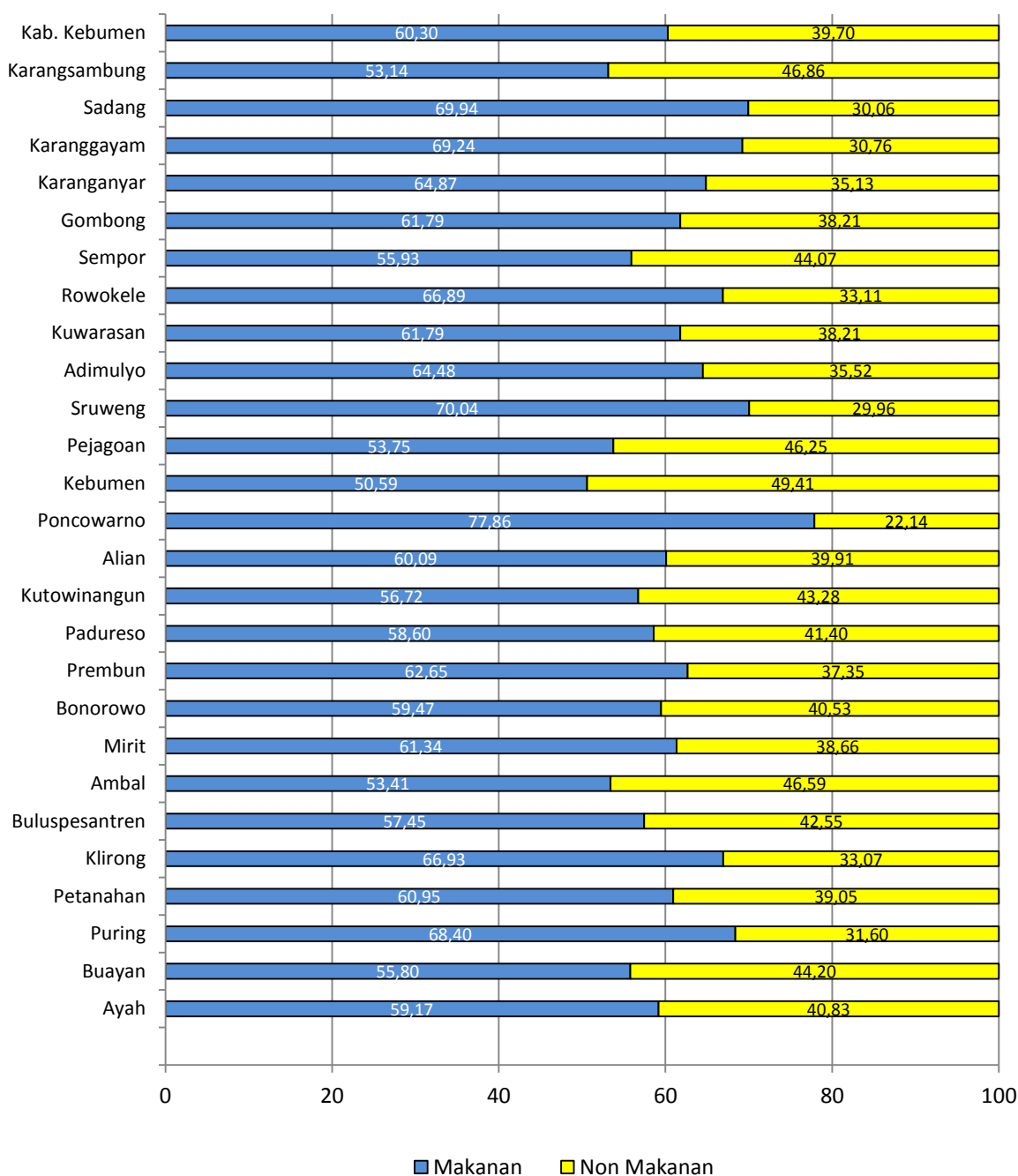
rumah tangga. Kemudian, berturut turut sektor-sektor sebagai sumber penghasilan utama rumah tangga adalah sektor perdagangan, hotel dan rumah makan sebesar 16,68 persen, sektor jasa-jasa sebesar 9,14 persen, sektor lainnya 20,79 persen, dan penerima pendapatan 6,80 persen

Hasil Suseda 2014 memperlihatkan fenomena yang cukup menarik terutama rumahtangga yang mengandalkan sektor jasa sebagai sumber penghasilan, pengeluaran perkapita untuk rumahtangga jasa meningkat tajam sebesar 46,94 persen menjadi 650.423 rupiah dari sebelumnya 442.646 rupiah perkapita perbulan, Hal sebaliknya terjadi pada sektor industri yang tumbuh minus 1,59 persen dari sebelumnya 440.504 rupiah perkapita perbulan menjadi 433.480 rupiah perkapita perbulan. Sektor perdagangan, rumah makan dan hotel juga menunjukkan peningkatan sebesar 13,91 persen, sedangkan untuk sektor pertanian meningkat sebesar 8,64 persen menjadi 436.061 rupiah dari sebelumnya 401.391 rupiah perkapita perbulan pada tahun 2013.

5.2. Rata-rata Pendapatan

Rata-rata pendapatan penduduk yang dimaksud disini adalah rata-rata pendapatan perkapita sebulan yang diasumsikan sama dengan rata-rata pengeluaran rumahtangga sebulan. Penggunaan data pengeluaran sebagai pendekatan pendapatan disebabkan oleh sulitnya pengumpulan data pendapatan penduduk/rumahtangga. Hasil Suseda 2014 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk perkapita sebulan di Kabupaten Kebumen adalah 486.232 rupiah. Angka ini lebih tinggi sebesar 14 persen dibandingkan rata-rata pengeluaran penduduk perkapita sebulan tahun 2013 yang tercatat sebesar 426.518 rupiah perkapita sebulan. Kenaikan pendapatan/pengeluaran perkapita ini dimungkinkan karena kenaikan harga berbagai jenis kebutuhan pokok penduduk selama lima tahun terakhir sebagai akibat dari kenaikan/perubahan harga/tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah diantaranya kenaikan secara berkala tarif listrik yang mengakibatkan efek berantai (multiplier effect) kebutuhan pokok lainnya..

Gambar 5.2.1. Distribusi Persentase Pengeluaran Penduduk Menurut Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Kebumen Tahun 2014



Dari gambar 5.2.1 tersebut terlihat bahwa pada tahun 2014, sebesar 60,30 persen (293.179,68 rupiah) pengeluaran penduduk di Kabupaten Kebumen digunakan untuk kebutuhan makanan, sedangkan sisanya sebesar 39,70 persen (193.052,67 rupiah) digunakan untuk kebutuhan non makanan. Secara relatif, terjadi penurunan kebutuhan makanan sebesar 3,40 persen dibandingkan kondisi pada tahun 2013, namun secara

nominal terjadi peningkatan sebesar 7,90 persen dibandingkan kondisi pada tahun 2013. Sedangkan, untuk kebutuhan non makanan baik secara relatif maupun nominal terjadi peningkatan sebesar 3,40 persen (38.240,47 rupiah). Sehingga, secara agregat hal ini mengindikasikan terjadinya pergeseran pola pengeluaran dari konsumsi makanan ke konsumsi non makanan.

Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan pokok/primer yang mutlak harus terpenuhi, sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan ini akan lebih besar mengingat rata-rata pendapatan penduduk Kebumen masih tergolong rendah. Sebenarnya, kebutuhan makanan pada tingkat pendapatan berapapun cenderung tetap sehingga semakin tinggi pendapatan seseorang, pengeluaran untuk non makanan semakin besar. Oleh karena itu, persentase pengeluaran makanan dan non makanan dapat digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan penduduk. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat distribusi pengeluaran menurut kelompok pendapatan. Bagi penduduk yang mempunyai pendapatan tinggi umumnya persentase pengeluaran untuk kebutuhan makanan semakin rendah dan sebaliknya kebutuhan untuk non makanan semakin tinggi. Menurunnya persentase pengeluaran makanan mengindikasikan bergesernya prioritas pengeluaran penduduk dari makanan ke non makanan. Kondisi ini dapat digunakan untuk dapat melihat tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Kebumen selama setahun terakhir.

Berdasarkan wilayah kecamatan, ada dua belas kecamatan dengan rata-rata pendapatan perkapita diatas rata-rata Kabupaten. Angka tertinggi ada pada Kecamatan Prembun sebesar 582.799 rupiah, diikuti Kecamatan Kebumen sebesar 571.364 rupiah, dan Kecamatan Buluspesantren sebesar 542.251 rupiah. Kecamatan Prembun yang rata-rata pendapatan pada tahun 2013 berada pada posisi ketiga menggeser posisi kecamatan Kebumen menjadi tertinggi pada tahun 2014. Sedangkan untuk pendapatan/pengeluaran perkapita paling rendah adalah Kecamatan Padureso (358.331 rupiah), kecamatan Karanggayam (367.597 rupiah) dan kecamatan Sadang (378.908 rupiah). Pada tahun 2013 ketiga kecamatan tersebut juga menempati tiga terbawah dengan urutan kecamatan Sadang, Padureso dan Karanggayam. Jika dicermati tiga kecamatan dengan pendapatan terbawah berada pada tipologi wilayah pegunungan di bagian utara Kabupaten Kebumen.

Tabel 5.2.1. Rata-rata Pengeluaran Perkapita dan Persentase Pengeluaran Makanan/Non Makanan Kabupaten Kebumen Dirinci menurut Kecamatan Tahun 2014

No	Kecamatan	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	Ayah	492.039	59,17	40,83
02.	Buayan	462.972	55,80	44,20
03.	Puring	432.661	68,40	31,60
04.	Petanahan	540.321	60,95	39,05
05.	Klirong	479.897	66,93	33,07
06.	Buluspesantren	542.251	57,45	42,55
07.	Ambal	542.932	53,41	46,59
08.	Mirit	421.941	61,34	38,66
09.	Bonorowo	511.891	59,47	40,53
10.	Prembun	582.799	62,65	37,35
11.	Padureso	358.331	58,60	41,40
12.	Kutowinangun	493.286	56,72	43,28
13.	Alian	439.422	60,09	39,91
14.	Poncowarno	500.406	77,86	22,14
15.	Kebumen	571.364	50,59	49,41
16.	Pejagoan	462.230	53,75	46,25
17.	Sruweng	433.884	70,04	29,96
18.	Adimulyo	496.696	64,48	35,52
19.	Kuwarasan	445.629	61,79	38,21
20.	Rowokele	465.630	66,89	33,11
21.	Sempor	537.996	55,93	44,07
22.	Gombang	523.151	61,79	38,21
23.	Karanganyar	398.865	64,87	35,13
24.	Karanggayam	367.597	69,24	30,76
25.	Sadang	378.908	69,94	30,06
26.	Karangsambung	537.796	53,14	46,86
Kab. Kebumen		486.232	60,30	39,70

Sumber : Suseda Kabupaten Kebumen Tahun 2014

5.3. Konsumsi Penduduk

Konsumsi penduduk dapat dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi untuk makanan termasuk makanan jadi dan konsumsi non makanan. Konsumsi makanan

antara lain meliputi konsumsi beras, umbi-umbian, daging/ikan, sayur-mayur, buah-buahan, kacang-kacangan, susu dan telur, bahan minuman, tembakau sirih dan rokok, makanan jadi dan lainnya, sedangkan konsumsi non makanan dikelompokkan menjadi perumahan, aneka barang dan jasa, biaya pendidikan, biaya kesehatan, pakaian dan alas kaki, barang tahan lama, pajak dan asuransi serta keperluan pesta.

Kecenderungan seseorang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan dan non makanan disebut sebagai pola konsumsi. Pola konsumsi biasanya akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, selera dan lingkungan. Umumnya konsumsi makanan pada suatu saat akan mencapai titik statis, sedangkan konsumsi non makanan akan terus berkembang mengikuti tingkat pendapatan penduduk.

Kecilnya ketimpangan pendapatan akan mengakibatkan tumbuhnya keadaan masyarakat yang lebih stabil yang merupakan modal sosial bagi terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ekonomi kesejahteraan (*welfare economics*), persentase pengeluaran non makanan akan dapat melihat adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana pengeluaran konsumsi non makanan ≥ 50 persen, menunjukkan kondisi rumahtangga baik sedangkan pengeluaran konsumsi non makanan < 20 persen, menunjukkan kondisi rumah-tangga buruk dan pengeluaran konsumsi non makanan 20-49 persen, menunjukkan kondisi rumahtangga sedang (Kantor Menko Kesra, *Buku Panduan Penyusunan IKKA*, 1992).

Pola konsumsi penduduk dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan rumahtangga/penduduk yang ditunjukkan oleh makin membesarnya nilai konsumsi untuk non makanan dan menurunnya konsumsi makanan.

5.3.1. Pola Konsumsi Makanan

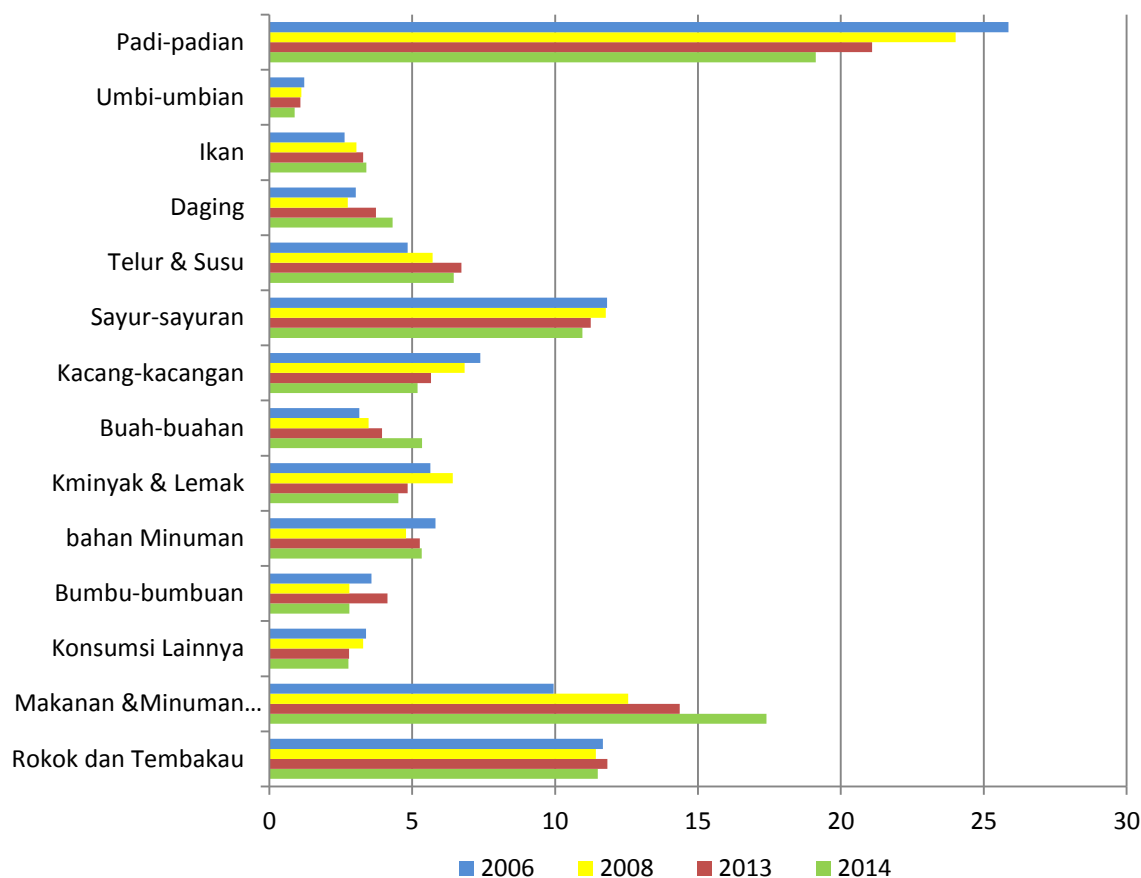
Selama setahun terakhir besarnya konsumsi untuk makanan turun cukup signifikan sebesar 3,4 persen, hal ini menunjukan bahwa sebagian besar pendapatan penduduk/rumahtangga sudah mulai dialihkan untuk memenuhi kebutuhan non makanannya. Namun demikian, dengan konsumsi makanan yang masih menyentuh angka diatas 60 persen mengindikasikan bahwa konsumsi makanan masih menjadi prioritas menyikapi pendapatan perkapita yang belum kokoh (1,5 kali diatas garis kemiskinan). Kondisi perekonomian Kabupaten Kebumen khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya sangat mudah dipengaruhi kondisi

perekonomian global seperti naiknya secara berkala tarif dasar listrik (TDL) dan tidak stabilnya sektor pertanian yang menjadi soko guru perekonomian kabupaten Kebumen berimbas pada meningkatnya harga kebutuhan pangan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Konsumsi makanan penduduk Kabupaten Kebumen mencapai 293.179,68 rupiah atau 60,30 persen dari total pengeluaran, sebesar 19,12 persen diantaranya digunakan untuk konsumsi padi-padian atau turun 1,87 persen dibandingkan kondisi tahun 2013 yang sebesar 21,09 persen. Yang menarik hasil Suseda 2014 mencatat mulai terjadinya pergeseran pola konsumsi makanan pada makanan dan minuman jadi. Konsumsi makanan jadi dan minuman jadi meningkat cukup tajam sebesar 3,04 persen dari sebelumnya 14,36 persen pada tahun 2013 menjadi sebesar 17,40 persen pada tahun 2014.

Pengeluaran konsumsi makanan yang relatif besar lainnya adalah rokok dan tembakau yang mencapai 11,50 yang turun 0,33 persen dibandingkan kondisi tahun 2013 yang sebesar 11,83 persen dan sayur-sayuran yang sebesar 10,96 persen dari sebelumnya tahun 2013 yang sebesar 11,25 persen. Dari gambar dibawah maupun tabel lampiran terlihat ada perubahan pola jenis makanan yang dikonsumsi, karena terlihat pada 2014 ada penurunan pada konsumsi padi-padian dan sayur-sayuran diikuti dengan kenaikan pada konsumsi makanan dan minuman jadi hal ini menandakan semakin banyak rumah tangga yang mengkonsumsi di luar rumah (membeli) dibandingkan yang memasak sendiri, karena dianggap lebih praktis atau dengan kata lain terjadi pergeseran kebiasaan dari memasak sendiri ke membeli.

Secara rinci pengeluaran menurut kelompok makanan dapat dilihat pada lampiran.

Gambar 5.3.1.1. Pola Konsumsi Makanan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2006, 2008, 2013 dan 2014



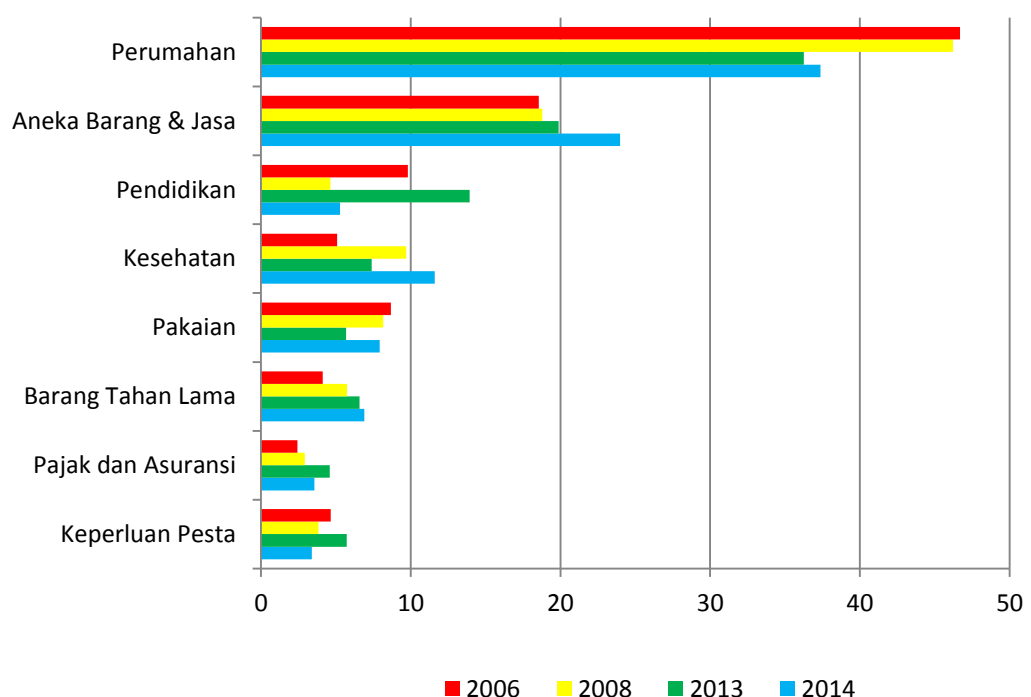
5.3.2. Pola Konsumsi Non Makanan

Semakin tinggi pendapatan, maka secara relatif semakin tinggi pengeluaran penduduk untuk kebutuhan non makanan. Hal ini umum terjadi pada masyarakat modern/maju yang kebutuhan sekunder bahkan tersiernya sudah mulai terpenuhi. Pengeluaran untuk non makanan penduduk Kabupaten Kebumen sebesar 193.052,67 rupiah atau 39,70 persen meningkat tajam secara relatif dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 154.812,20 rupiah atau 36,30 persen dari total pengeluaran. Secara relatif ada peningkatan konsumsi non makanan sebesar 3,40 persen, artinya terjadi peningkatan konsumsi non makanan pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013. Berdasarkan data tersebut dengan konsumsi non makanan sebesar 39,7 persen kabupaten Kebumen termasuk kategori kesejahteraan sedang menuju kategori kesejahteraan baik yang ditunjukkan dengan meningkatnya konsumsi non makanan sebesar 3,4 persen. Pengeluaran non makanan bagian terbesar digunakan untuk keperluan perumahan

sebesar 37,37 persen atau meningkat sebesar 1,11 persen dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 36,26 persen. Besarnya pengeluaran untuk perumahan dapat dimengerti mengingat perumahan merupakan salah satu kebutuhan primer selain pangan dan sandang. Pengeluaran yang relatif besar lainnya adalah pengeluaran untuk aneka barang dan jasa yang mencapai 23,98 persen atau meningkat 4,11 persen dibandingkan kondisi tahun 2013 yang sebesar 19,87 persen yang mencakup antara lain pengangkutan, kecantikan, sabun mandi, rekreasi dan lain-lain. Kesehatan menjadi prioritas ketiga dengan 11,60 persen meningkat cukup tinggi sebesar 4,21 persen dari sebelumnya 7,39 persen pada tahun 2013, disusul kemudian pengeluaran untuk pakaian pada posisi keempat dengan 7,92 persen. Kebutuhan pokok lain yaitu untuk pendidikan sebesar 5,28 persen menjadi prioritas keenam setelah barang tahan lama (6,89 %).

Perbandingan antar Kecamatan, memperlihatkan konsumsi non makanan berkisar antara 22,14 persen (Kecamatan Poncowarno) dan 49,41 persen (Kecamatan Kebumen). Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh kecamatan di kabupaten Kebumen masuk pada kategori kesejahteraan sedang (konsumsi non makanan antara 20 dan 49 persen).

Gambar 5.3.2.1. Pola Konsumsi Non Makanan Penduduk di Kabupaten Kebumen Tahun 2006, 2008, 2013 dan 2014



BAB VI

DISTRIBUSI PENDAPATAN

Upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak dapat diukur hanya dari aspek pertumbuhan ekonomi semata tetapi yang lebih penting seberapa jauh geliat perekonomian dapat dinikmati oleh masyarakat sehingga aspek pemerataan dan pola konsumsi masyarakat merupakan hal yang selalu terkait untuk dicermati. Asumsi bahwa laju pertumbuhan ekonomi akan mampu meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat terkadang masih memiliki suatu peluang untuk memunculkan suatu masalah ketimpangan pendapatan. Dari pengukuran disparitas (ketimpangan) pendapatan penduduk dengan menerapkan indeks GINI (Gini ratio) yang dikembangkan *Corrado Gini*, masyarakat Kabupaten Kebumen relatif memiliki ketimpangan yang rendah ini ditunjukkan pada kurun waktu 2013-2014 Indeks gini cenderung menurun dari 0,26 tahun 2013 menjadi 0,24 pada tahun 2014 (nilai gini antara 0,20 - 0,35 menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan dinyatakan tidak timpang/pemerataan pendapatannya relatif sama (*Todaro P. Michael, 1994*)). Meskipun secara riil angka Gini masih dalam rentang tidak timpang, tetapi peningkatan angka Gini menunjukkan ada potensi ketimpangan di masa depan jika kondisi ini tidak mendapat perhatian. Dilihat dari *Kriteria Bank Dunia* (KBD.) di mana bila 40 % penduduk yang berpendapatan rendah mendapatkan porsi di atas 17 persen (> 17 persen), maka disimpulkan wilayah tersebut memiliki derajat ketimpangan pendapatan yang rendah, di Kabupaten Kebumen nilai 40 % penduduk yang berpendapatan rendah sekitar 25,75 persen pada tahun 2014 meningkat dibandingkan pada tahun 2013 yang sebesar 25,22 persen, maka disimpulkan bahwa secara umum Kabupaten Kebumen memiliki derajat ketimpangan pendapatan yang rendah, atau dengan perkataan lain derajat kesejahteraan dari aspek sebaran pendapatan relatif cukup baik. Dengan kondisi seperti ini diharapkan masyarakat memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan, dengan kondisi lebih baik dibandingkan tahun 2013

Salah satu keuntungan ketika periode pertumbuhan ekonomi yang cepat berakhir adalah relatif meratanya distribusi pendapatan. Disparitas di daerah perkotaan tidak terlalu besar mengingat lapangan pekerjaan di daerah perkotaan menyediakan sedikit kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan produktifitas tinggi di sektor industri atau sektor perdagangan. Kesempatan terbaik untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi adalah dengan bekerja pada lembaga pemerintah, yang merupakan pilihan yang

hanya terbuka bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan tinggi. Dalam situasi seperti ini, cara yang paling dapat diandalkan bagi rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi adalah dengan mempekerjakan lebih banyak anggota keluarganya.

6.1. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Pembangunan selama ini terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut belum menjamin adanya pemerataan pendapatan diantara kelompok-kelompok masyarakat yang menikmatinya. Terjadinya kesenjangan pendapatan antara masyarakat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan politik masyarakat. Membicarakan pemerataan pendapatan sama halnya membicarakan ketimpangan pendapatan. Dengan kata lain, jika pemerataan pendapatan tinggi, maka ketimpangan pendapatan rendah, atau sebaliknya.

Pada Suseda maupun Susenas untuk mendapatkan besarnya ketimpangan, data pengeluaran konsumsi (makanan dan non makanan) penduduk digolongkan menjadi 11 kelompok pengeluaran. Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa data mengenai pendapatan sangat sulit didapat, maka penghitungan distribusi pendapatan didekati dengan pengeluaran konsumsi penduduk. Pendekatan pengeluaran mengenai konsumsi memang akan menghasilkan angka Gini Ratio yang underestimate, karena adanya savings untuk golongan atas dan dissavings untuk golongan bawah.

Pengeluaran konsumsi untuk golongan bawah biasanya merupakan kebutuhan hidup yang paling minimum yang harus dipenuhi, dan apabila kurang mereka akan berusaha harus menutupinya dengan berbagai cara, diantaranya meminjam atau menjual barang yang memiliki nilai ekonomi. Pengumpulan data konsumsi seringkali terkendala pihak responden lupa akan barang yang dibeli/dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Namun demikian, usaha penghitungan Gini Ratio dan penggunaan Kriteria Bank Dunia Kecamatan dengan segala kelemahannya menjadi suatu terobosan untuk melengkapi penghitungan penduduk miskin. Penghitungan penduduk miskin yang selama ini dilakukan kurang memperhatikan kue yang diterima oleh kelompok-kelompok masyarakat. Untuk itu hasil dari penghitungan ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu input awal untuk mengetahui ketimpangan yang terjadi dan dapat digunakan sebagai bahan perencanaan, evaluasi maupun pengambilan keputusan.

Masalah pemerataan pendapatan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan disamping pertumbuhan ekonomi. Distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat idealnya harus merata, dimana menurut Kuznet's bahwa distribusi pendapatan dikatakan merata apabila setiap kelompok penduduk dalam setiap desil, proporsi pendapatannya juga harus sama dengan sepersepuluh (10 %). Hal tersebut berarti bahwa mereka yang menerima pendapatan 10 persen paling bawah jumlahnya sama dengan 10 persen penduduk, yang menerima pendapatan 20 persen paling bawah jumlahnya sama dengan 20 persen jumlah penduduk, dan seterusnya.

Tabel 6.1.1. Persentase Pendapatan Per Golongan Pendapatan dan Nilai Gini Rasio Menurut Tipe Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2014

Golongan	Kota	Pedesaan	Kota+Pedesaan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
40%	23,87	26,88	25,75
40%	37,09	37,47	38,70
20%	39,04	35,65	35,55
Gini Rasio	0,26	0,22	0,24

Sumber : Diolah dari Suseda 2014

Secara umum, baik untuk daerah kota/urban maupun perdesaan/rural menunjukkan tingkat ketimpangan rendah. Namun demikian, jika dicermati lebih dalam terlihat bahwa terdapat rentang yang cukup tinggi angka Gini dimana untuk daerah perkotaan sebesar 0,26 atau meningkat sebesar 0,03 dibandingkan angka Gini tahun 2013. Sedangkan untuk daerah pedesaan angka Gini sebesar 0,22 meningkat sebesar 0,01 sehingga terbentuk angka Gini Kabupaten Kebumen sebesar 0,24. Besarnya angka Gini daerah perkotaan disebabkan oleh daerah perkotaan lebih heterogen dalam seluruh aspek kehidupannya dibandingkan daerah pedesaan yang relatif lebih homogen.

Tabel 6.1.2. Gini Rasio dan Persentase Pendapatan (Pengeluaran) Kabupaten Kebumen Dirinci Menurut Golongan Pendapatan Tahun 1993-2014

TAHUN	GOLONGAN PENDAPATAN			GINI RASIO
	RENDAH 40 %	SEDANG 40 %	TINGGI 20 %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1993	27,22	39,70	33,01	0,2000
1994	27,84	38,21	33,96	0,2100
1997	28,49	39,91	31,59	0,1900
2002	26,52	37,68	35,80	0,2300
2003	20,75	41,09	38,16	0,2800
2004	28,51	39,79	31,70	0,1900
2006	18,82	42,80	38,38	0,2300
2008	25,99	37,92	36,09	0,2290
2013	25,22	37,40	37,38	0,2584
2014	25,75	38,70	35,55	0,2352

Tabel 6.1.2. memperlihatkan kondisi distribusi pendapatan selama 21 tahun dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2014. Periode krisis tahun 1997 merupakan periode terbaik sepanjang 21 tahun terakhir yang ditunjukkan oleh Gini Ratio yang rendah dan juga persentase 40 persen penduduk berpenghasilan rendah mendapatkan bagian yang tinggi. Kondisi periode 1997 kemudian terulang lagi pada periode 2004. Hal ini membuktikan bahwa secara umum krisis ekonomi adalah krisis bagi kelompok penduduk berpendapatan tinggi.

Penduduk yang berpendapatan rendah menerima lebih besar 17 persen dari Pendapatan Regional Bruto menunjukkan bahwa menurut kriteria Bank Dunia tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Kebumen tahun 2014 tergolong rendah. Tabel 6.1.2 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan pada golongan 40 % berpendapatan rendah sebesar 0,53 persen pada tahun 2014 dari 25,22 persen pada tahun 2013 menjadi 25,75 % pada tahun 2014. Turunnya angka Gini Rasio dari 0,26 pada tahun 2013 menjadi 0,24 persen pada tahun 2014 menjadi indikator lain bahwa

pendapatan perkapita penduduk kabupaten Kebumen semakin merata meskipun belum semerata kondisi tahun 2008.

Dikaitkan dengan kontribusi PDRB tahun 2013, nampak terlihat bahwa kontribusi sektor jasa-jasa pada tahun 2013 yang sebesar 21,48 persen (Tabel 4.2.2), data suseda 2014 menunjukkan ada sebanyak 12,34 persen penduduk yang bekerja pada sektor ini. Dengan asumsi lapangan pekerjaan penduduk tahun 2013 dan 2014 belum terlalu banyak terjadi pergeseran maka dapat dikatakan nilai tambah sektor jasa-jasa Kabupaten Kebumen yang sebesar 21,48 hanya dinikmati oleh 12,34 persen penduduk Kabupaten Kebumen. Berikutnya untuk sektor pertanian kontribusi yang sebesar 32,56 persen dari total PDRB dinikmati oleh 35,22 persen penduduk Kabupaten Kebumen. Sedangkan, untuk sektor industri kontribusi yang sebesar 10,74 persen dari total PDRB dinikmati oleh 16,59 persen penduduk kemudian sektor perdagangan, hotel dan rumah makan kontribusi PDRB yang sebesar 11,84 persen dinikmati oleh 19,62 persen penduduk, artinya banyak tenaga kerja sektor industri maupun perdagangan, hotel dan rumah makan yang menerima upah/bayaran rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor industri maupun perdagangan, hotel dan rumah makan kelebihan tenaga kerja sehingga upah/gaji yang diterima pekerja sektor industri dan perdagangan, hotel dan rumah makan relatif paling rendah.

6.2. Perbandingan Distribusi Pendapatan Antar Kecamatan

Pada tabel 6.2.1 berikut terlihat bahwa tiga kecamatan dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan perkapita paling tinggi adalah Kecamatan Kebumen (0,33), Kecamatan Ambal (0,26), Kecamatan Pejagoan (0,24). Sedangkan tiga Kecamatan dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan rendah adalah Kecamatan Padureso (0,14), Kecamatan Karangsambung (0,14), dan Kecamatan Poncowarno (0,15), ketiganya merupakan kecamatan dengan tipologi wilayah daerah pegunungan (wilayah utara Kabupaten Kebumen).

Tabel 6.1.3 juga menunjukkan bahwa untuk tiga kecamatan dengan tingkat ketimpangan paling tinggi karena untuk Kecamatan Kebumen merupakan kawasan yang heterogen perpaduan antara daerah perkotaan dan pedesaan yang pola kehidupannya sangat berbeda, kemudian untuk kecamatan Ambal beberapa wilayah berkembang lebih pesat terutama setelah rehab pasar Ambal dan padatnya jalur selatan-selatan berdampak pada berputarnya roda ekonomi yang bergairah dan memunculkan usaha-usaha baru.

Sedangkan untuk kecamatan Pejagoan sebagai penyangga ibukota Kabupaten merupakan kawasan pengembangan disamping kehidupan yang sangat kontras antara pengusaha-pengusaha genteng menyatu dengan buruh-buruh industry genteng.

Tabel 6.2.1. Pemerataan Pendapatan Penduduk Kabupaten Kebumen Menurut Nilai Gini Ratio dan Kriteria Bank Dunia Tahun 2014

No	Kecamatan	Penduduk	Penduduk Perkapita	Gini Ratio	Kriteria Bank Dunia		
					40 % I	40 % II	20 % III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01.	Ayah	56.498	492.039	0,2092	27,14	38,85	34,01
02.	Buayan	55.074	462.972	0,2009	27,98	36,65	35,37
03.	Puring	52.873	432.661	0,1751	29,08	38,53	32,39
04.	Petanahan	53.327	540.321	0,2109	26,11	32,82	41,07
05.	Klirong	54.366	479.897	0,2170	22,34	41,06	36,59
06.	Buluspesantren	52.574	542.251	0,2231	26,10	33,34	40,56
07.	Ambal	54.757	542.932	0,2629	19,54	28,60	51,86
08.	Mirit	43.955	421.941	0,2278	23,04	39,86	37,10
09.	Bonorowo	18.537	511.891	0,2359	23,43	37,88	38,69
10.	Prembun	26.334	582.799	0,2323	23,41	38,53	38,05
11.	Padureso	13.343	358.331	0,1376	30,45	39,24	25,91
12.	Kutowinangun	42.197	493.286	0,2034	27,02	36,82	36,16
13.	Alian	54.069	439.422	0,1689	25,56	41,91	32,52
14.	Poncowarno	14.945	500.406	0,1528	27,63	37,70	31,92
15.	Kebumen	121.797	571.364	0,3340	19,74	36,10	44,16
16.	Pejagoan	48.924	462.230	0,2419	26,40	36,85	36,75
17.	Sruweng	53.477	433.884	0,1708	25,20	44,27	30,53
18.	Adimulyo	34.196	496.697	0,2293	25,28	36,96	37,76
19.	Kuwarasan	44.670	445.629	0,1593	29,54	39,54	30,92
20.	Rowokele	42.356	465.630	0,2280	24,71	39,40	35,89
21.	Sempor	59.205	537.996	0,2123	16,52	37,61	35,33
22.	Gombong	47.362	523.151	0,1758	25,73	42,78	31,49
23.	Karanganyar	34.090	398.865	0,2258	26,03	38,55	35,42
24.	Karanggayam	48.452	367.597	0,1713	27,57	42,25	30,19
25.	Sadang	18.163	378.908	0,1708	19,24	47,45	32,81
26.	Karangsambung	37.487	537.796	0,1385	27,60	43,19	29,21
Kab. Kebumen		1.183.028	486.232	0,2352	25,75	38,70	35,55

Sumber : SUSEDA Kabupaten Kebumen Tahun 2014

Pengolahan dengan menggunakan kriteria Bank Dunia memberikan hasil, seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen masuk kategori ketimpangan rendah karena 40% kelompok penduduk berpendapatan rendah menerima lebih dari 17 persen. Berdasarkan kategori Bank Dunia Kecamatan Padureso paling merata karena 40% kelompok penduduk berpendapatan rendah menerima bagian pendapatan sebesar 30,45 persen, disusul Kecamatan Kuwarasan (29,54 %), dan Kecamatan Puring (29,08 %). Kecamatan dengan kategori ketimpangan rendah tetapi dengan nilai paling rendah adalah Kecamatan Kebumen (20,64 %).

Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 1994 (data tersedia hingga tingkat kecamatan dengan 22 kecamatan), terlihat bahwa tahun 1994 kondisi pemerataan pendapatannya relatif lebih baik dibandingkan kondisi tahun 2014. Hal ini terlihat dari gini ratio tahun 1994 sebesar 0,21 persen, sedangkan tahun 2014 sebesar 0,24 persen. Golongan 40 % Rendah, pada tahun 1994 menerima 27,84% dari total pendapatan, sedangkan tahun 2014 hanya menerima 25,75 %. Terlihat bahwa untuk mencapai tingkat pemerataan menuju kondisi ideal seperti kondisi sebelum krisis 1998 diperlukan peran pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas dimana keterlibatan seluruh penduduk Kabupaten menjadi kunci pencapaian bukan hanya mengandalkan padat modal.

Menurut Kecamatan, terlihat bahwa berdasarkan angka gini ratio maupun kriteria Bank Dunia seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen masuk kategori ketimpangan rendah dengan gini ratio berkisar antara 0 sampai dengan 0,35 dan penduduk kelompok rendah menerima lebih dari 17 persen dari total pendapatan.

6.3. Penduduk Kategori Berpendapatan 40 persen Rendah

Tabel 6.3.1 menunjukkan penduduk kategori 40 persen berpendapatan rendah menurut sumber penghasilan utama rumah tangga dan status pekerjaan. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa terdapat 665.003 penduduk (56,21 %) yang masuk kategori berpendapatan rendah. Kemudian, berdasarkan status pekerjaannya diketahui bahwa 55,9 persen berstatus pengusaha (berusaha dibantu buruh tetap, berusaha dibantu buruh tidak tetap dan berusaha sendiri.), 42,0 persen berstatus buruh (tetap dan bebas), dan 2,0 persen berstatus penerima pendapatan. Sedangkan, berdasarkan lapangan pekerjaan utamanya 38,4 persen rumah tangga mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber penghasilan rumah tangganya, 17,6 persen mengandalkan sektor perdagangan, hotel dan

rumah makan, 17,1 persen mengandalkan sektor bangunan/konstruksi, 14,4 persen mengandalkan sektor industri pengolahan, 11,76 persen mengandalkan sektor bangunan/konstruksi, 4,8 persen mengandalkan sektor jasa-jasa, 2,0 persen sebagai penerima pendapatan dan sisanya 5,7 persen mengandalkan sektor di luar yang di atas. Tingginya penduduk yang berada pada 40 persen pendapatan rendah mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber utama penghasilan rumah tangga mengindikasikan bahwa sektor pertanian masih menjadi pilihan utama masyarakat meskipun dengan balas jasa rendah. Persoalan mendasar pada sektor pertanian adalah semakin menyempitnya lahan yang diusahakan yang mengakibatkan tidak seimbangnya antara biaya dan tenaga yang dikeluarkan dengan produksi yang dihasilkan, sehingga penduduk yang berasal dari rumah tangga yang berusaha dengan mengandalkan sektor pertanian banyak yang masuk ke dalam 40 persen berpendapatan rendah.

Tabel 6.3.1. Penduduk Kategori 40% Berpendapatan Rendah di Kabupaten Kebumen Menurut Sumber Penghasilan Utama Rumah Tangga dan Status Pekerjaan Tahun 2014

LAPANGAN USAHA	Penerima Pendapatan		Buruh		Berusaha		Total	
	Penduduk	%	Penduduk	%	Penduduk	%	Penduduk	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Pertanian	0	0	65.751	9,9	189.517	28,5	255.268	38,4
2. Pertambangan dan Penggalan	0	0	967	0,1	3.868	0,6	4.835	0,7
3. Industri Pengolahan	0	0	36.985	5,6	58.499	8,8	95.484	14,4
4. Listrik, Gas, dan Air Minum	0	0	967	0,1	0	0,00	967	0,1
5. Bangunan & Konstruksi	0	0	99.835	15,0	13.779	2,1	113.614	17,1
6. Perdagangan	0	0	30.942	4,6	86.298	13,0	117.240	17,6
7. Angkutan dan Komunikasi	0	0	16.196	2,4	7.735	1,2	23.931	3,6
8. Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0	0	967	0,2	0	0,0	967	0,2
9. Jasa-jasa	0	0	20.305	3,05	11.361	1,71	31.666	4,8
10. Lainnya	0	0	6.527	1,0	967	0,15	7.494	1,1
11. Penerima Pendapatan	13.537	2,0	0	0,0	0	0,00	13.537	2,0
Jumlah	13.537	2,0	279.442	42,0	372.024	55,9	665.003	100,0

Sumber : SUSEDA Kabupaten Kebumen Tahun 2014

BAB VII

KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan berdasarkan gambaran deskriptif Studi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2014 yang tercantum pada Bab V dan Bab VI adalah sebagai berikut:

- a. Terjadi peningkatan pemerataan pendapatan penduduk Kabupaten Kebumen yang ditunjukkan oleh Gini Ratio dari 0,26 tahun 2013 menjadi 0,24 pada tahun 2014. Sedangkan berdasar Kriteria Bank Dunia, jumlah pendapatan yang dinikmati oleh penduduk berpendapatan rendah meningkat dari 25,22 persen pada tahun 2013 menjadi 25,75 persen pada tahun 2014. Berdasarkan kondisi tersebut, maka strategi kebijakan yang berpihak pada masyarakat berpendapatan rendah perlu dilanjutkan diantaranya program Raskin, Jamkesmas, dan bedah rumah yang menjadi kebutuhan dasar penduduk.
- b. Seluruh kecamatan di kabupaten Kebumen pada tahun 2014 masuk kategori ketimpangan rendah menurut angka Gini ($G \leq 35\%$) dan menurut Kriteria Bank Dunia (40% rendah $\geq 17\%$). Namun demikian Kecamatan Kebumen (0,33) masih cukup tinggi dan mendekati angka 0,35.
- c. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, di Kabupaten Kebumen pada tahun 2014, 40% penduduk berpendapatan rendah menerima 25,75 % pendapatan dari total pendapatan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2013 yang sebesar 25,22 persen. Namun, pencapaian tahun 2014 ini masih di bawah pencapaian tahun 2008, dimana 40% penduduk berpendapatan rendah hanya menerima 25,99 persen pendapatan.
- d. Rata-rata pengeluaran perkapita per bulan tahun 2014 tercatat sebesar Rp.486.232 atau naik sebesar 14% dibanding kondisi tahun 2013 (Rp.426.518). Dari total pengeluaran per kapita sebesar Rp.486.232, sekitar 60,30 persen digunakan untuk pengeluaran makanan (Rp.293.198) atau menurun dibanding tahun 2013 (63,70 persen). Sedangkan untuk pengeluaran non makanan meningkat dari 36,30 persen di tahun 2013 menjadi 39,70 persen di tahun 2014. Persentase pengeluaran yang digunakan penduduk untuk makanan bervariasi antar kecamatan.

Pengeluaran untuk makanan yang terkecil terdapat di Kecamatan Kebumen (50,59 persen), sedangkan tertinggi di Kecamatan Poncowarno (77,86 persen).

2. Saran

- a. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diikuti oleh pemerataan pendapatan yang tinggi pula. Pembangunan ekonomi yang hanya mengejar pertumbuhan yang tinggi harus terus dievaluasi, sehingga perencanaan harus terus berpihak pada golongan bawah, tanpa meninggalkan golongan menengah keatas. Membuka lapangan kerja baru yang beorientasi padat karya dengan menampung penduduk-penduduk wilayah setempat sebagai tenaga kerjanya, secara kontinyu perlu terus dilakukan.
- b. Sektor Industri dan Perdagangan sangat rentan terhadap masalah ketimpangan pendapatan. Hal itu disebabkan sektor-sektor tersebut merupakan sektor padat modal dengan memberikan upah rendah terhadap buruh/tenaga kerjanya. Oleh karena itu untuk mengurangi risiko semakin memburuknya kondisi ketimpangan pendapatan perlu diupayakan terciptanya suatu mekanisme redistribusi pendapatan yang efektif, seperti masalah upah minimum regional yang selalu diperbaharui dengan memperhatikan gejolak harga yang terjadi (inflasi), jaminan social kehidupan tenaga kerja dan keluarganya, sistem perpajakan yang progresif dan lain-lain.

3. Rekomendasi

Investasi diperlukan untuk mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Namun demikian diperlukan kebijakan yang *pro poor* (berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah) ketika memberi ijin investasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberi ijin usaha kepada investor yang bersifat padat karya, bukan padat modal

DAFTAR PUSTAKA

1. Arsyad, Lincolin.1992. Memahami Masalah Kemiskinan di Indonesia:Suatu Pengantar. JEBI No.1Tahun VII 1992.
2. BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah, 1998. Laporan Pembangunan Manusia Propinsi (LPM-P). Bappeda Propinsi Jawa Tengah. Semarang.
3. BAPPEDA Tingkat I dan Kantor Statistik Propinsi Jawa Tengah, 1993. Pemerataan Pendapatan Jawa Tengah 1992/1993. Kantor Statistik Propinsi Jawa Tengah. Semarang.
4. BAPPEDA Tingkat II dan Kantor Statistik Kabupaten Kebumen, 1996. Pemerataan Pendapatan Di Kabupaten Kebumen 1994. Kantor Statistik Kabupaten Kebumen. Kebumen.
5. BPS, Bappenas, UNDP, 2001. Menuju Konsensus Baru (*Demokrasi dan Pembangunan Manusia Di Indonesia*). BPS, Bappenas, UNDP. Jakarta.
6. BPS dan World Bank Institute, 2002. Dasar-dasar Analisis Kemiskinan: Terjemahan. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
7. BPS Kab. Kebumen, 2006. Kebumen Dalam Angka 2005. Kebumen.
8. BPS Kab. Kebumen, 2006. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kebumen Tahun 2005. Kebumen.
9. BPS Kab. Kebumen, 2008. Kebumen Dalam Angka 2007. Kebumen.
10. BPS Kab. Kebumen, 2008. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kebumen Tahun 2007. Kebumen.
11. BPS Propinsi Jawa Tengah, 2002. Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 2002. BPS Propinsi Jawa Tengah. Semarang.
12. BPS Propinsi Jawa Tengah, 2003. Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 2003. BPS Propinsi Jawa Tengah. Semarang.
13. BPS Propinsi Jawa Tengah, 2004. Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 2004. BPS Propinsi Jawa Tengah. Semarang.

14. BPS Propinsi Jawa Tengah, 2005. Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 2005. BPS Propinsi Jawa Tengah. Semarang.
15. BPS Propinsi Jawa Tengah, 2006. Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 2006. BPS Propinsi Jawa Tengah. Semarang.
16. Brata, Aloysius Gunadi, 2002. Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Kajian Ekonomi Negara Berkembang Hal 113-122. JEP Vol 7, No. 2. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
17. Institut Pertanian Bogor. Strategi Pembangunan Untuk Pengantasan Kemiskinan di Propinsi Riau
18. Kantor Menko Kesra, 1992. Buku Panduan Penyusunan IKKA. Kantor Menko Kesra. Jakarta.
19. Ravallion, Martin.1997.Can High-Inequality Developing Countries Escape Absolute Poverty?.Economics Letters 56:51-57. Retrive: February 9, 2005 from <http://web.world>.
20. Sigit, Hananto, 1990. Masalah Penghitungan Distribusi Pendapatan Indonesia, Prisma, Jakarta. Januari.
21. Todaro, M.P. dan Stephen C.S. 2011. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan*. Erlangga. Jakarta.
22. Todaro, Michael P and Smith, Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.
23. Urai, Nursinah Amal, SE MA, 1997. Pemerataan Pembangunan Antar Daerah Di Indonesia (*Disampaikan pada acara Konsultasi Regional PDRB Wilayah Jawa, Solo 18-20 September 1997*). Bagian Neraca Regional, BPS. Jakarta.
24. Wie, Thee Kian, 1980. Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan (*Beberapa Alternatif Pendekatan*). LP3ES. Jakarta.

LAMPIRAN

Tabel : L.1.A.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk Perkapita

Menurut Kelompok Pengeluaran dan Makanan/Non Makanan Tahun 2014

Kabupaten Kebumen			Perkotaan + Perdesaan	
Kelompok Pengeluaran (Rupiah)	Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
Kurang dari 100.000	0	-	0,00	0,00
100.000-149.999	951	116.678,57	64,13	35,87
150.000-199.999	19.394	184.966,82	67,05	32,95
200.000-249.999	53.048	230.008,82	68,26	31,74
250.000-299.999	112.180	275.386,30	67,49	32,51
300.000-399.999	325.703	352.247,78	65,71	34,29
400.000-499.999	285.014	446.054,63	63,91	36,09
500.000-599.999	156.102	546.570,33	61,05	38,95
600.000-699.999	85.181	648.215,61	59,17	40,83
700.000-799.999	48.295	748.467,99	58,67	41,33
800.000 dan lebih	97.160	1.131.024,30	47,85	52,15
Total	1.183.028	486.232,35	60,30	39,70

Tabel : L.1.B.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk Perkapita

Menurut Kelompok Pengeluaran dan Makanan/Non Makanan Tahun 2014

Kabupaten Kebumen			Perkotaan	
Kelompok Pengeluaran (Rupiah)	Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
Kurang dari 100.000	0	0	0	0
100.000-149.999	951	116.678,57	64,13	35,87
150.000-199.999	3.993	187.363,10	59,55	40,45
200.000-249.999	15.971	228.537,03	67,38	32,62
250.000-299.999	32.133	278.258,85	64,91	35,09
300.000-399.999	95.258	354.705,16	62,52	37,48
400.000-499.999	93.547	446.797,39	61,18	38,82
500.000-599.999	51.717	543.750,27	58,04	41,96
600.000-699.999	32.703	651.500,76	56,63	43,37
700.000-799.999	16.542	748.750,01	55,56	44,44
800.000 dan lebih	53.428	1.164.877,56	47,04	52,96
Total	396.243	537.764,66	56,33	43,67

Tabel : L.1.C.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk Perkapita

Menurut Kelompok Pengeluaran dan Makanan/Non Makanan

Tahun 2014

Kabupaten Kebumen			Perdesaan	
Kelompok Pengeluaran (Rupiah)	Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
Kurang dari 100.000	0	-	0,00	0,00
100.000-149.999	0	-	0,00	0,00
150.000-199.999	15.401	184.345,56	69,03	30,97
200.000-249.999	37.077	230.642,82	68,64	31,36
250.000-299.999	80.047	274.233,19	68,55	31,45
300.000-399.999	230.445	351.231,98	67,03	32,97
400.000-499.999	191.467	445.691,73	65,25	34,75
500.000-599.999	104.385	547.967,53	62,53	37,47
600.000-699.999	52.478	646.168,34	60,76	39,24
700.000-799.999	31.753	748.321,07	60,29	39,71
800.000 dan lebih	43.732	1.089.664,45	48,90	51,10
Total	786.785	460.279,44	62,63	37,37

Tabel : L.1.1.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk Perkapita

Menurut Kelompok Pengeluaran dan Makanan/Non Makanan

Tahun 2014

Kecamatan Ayah				
Kelompok Pengeluaran (Rupiah)	Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
Kurang dari 100.000	0	0	0	0
100.000-149.999	0	0	0	0
150.000-199.999	0	-	0	0
200.000-249.999	1.326	241.030,95	57,13	42,87
250.000-299.999	3.443	275.457,99	59,81	40,19
300.000-399.999	16.288	352.034,14	64,14	35,86
400.000-499.999	17.540	437.004,27	61,37	38,63
500.000-599.999	9.359	556.974,55	60,79	39,21
600.000-699.999	2.426	658.854,40	57,09	42,91
700.000-799.999	2.139	755.267,96	57,61	42,39
800.000 dan lebih	3.977	1.183.207,49	49,85	50,15
Total	56.498	492.039,29	59,17	40,83

Tabel : L.1.2.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk Perkapita

Menurut Kelompok Pengeluaran dan Makanan/Non Makanan

Tahun 2014

Kecamatan Buayan				
Kelompok Pengeluaran (Rupiah)	Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
Kurang dari 100.000	0	0	0	0
100.000-149.999	0	0	0	0
150.000-199.999	0	0	0	0
200.000-249.999	2.523	237.026,34	58,76	41,24
250.000-299.999	4.503	282.943,90	60,27	39,73
300.000-399.999	19.833	350.715,23	59,66	40,34
400.000-499.999	11.474	444.889,71	57,31	42,69
500.000-599.999	6.287	549.466,29	53,42	46,58
600.000-699.999	4.917	637.089,37	46,98	53,02
700.000-799.999	2.131	736.854,81	50,31	49,69
800.000 dan lebih	3.406	1.000.552,98	56,30	43,70
Total	55.074	462.971,59	55,80	44,20

Tabel : L.1.3.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk Perkapita

Menurut Kelompok Pengeluaran dan Makanan/Non Makanan

Tahun 2014

Kecamatan Puring				
Kelompok Pengeluaran (Rupiah)	Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
Kurang dari 100.000	0	0	0	0
100.000-149.999	0	0	0	0
150.000-199.999	0	0	0	0
200.000-249.999	2.479	239.447,62	71,32	28,68
250.000-299.999	5.311	270.894,20	72,27	27,73
300.000-399.999	19.020	345.877,94	70,39	29,61
400.000-499.999	12.345	458.901,93	65,85	34,15
500.000-599.999	7.185	525.173,05	64,89	35,11
600.000-699.999	2.948	638.892,86	70,78	29,22
700.000-799.999	2.395	773.072,89	68,12	31,88
800.000 dan lebih	1.190	917.405,10	70,14	29,86
Total	52.873	432.661,26	68,40	31,60

Tabel : L.1.4.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk Perkapita

Menurut Kelompok Pengeluaran dan Makanan/Non Makanan

Tahun 2014

Kecamatan Petanahan				
Kelompok Pengeluaran (Rupiah)	Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
Kurang dari 100.000	0	0	0	0
100.000-149.999	0	0	0	0
150.000-199.999	0	0	0	0
200.000-249.999	1.376	204.389,88	56,96	43,04
250.000-299.999	923	297.638,10	55,49	44,51
300.000-399.999	15.815	366.132,86	69,09	30,91
400.000-499.999	11.099	433.167,75	65,66	34,34
500.000-599.999	9.411	553.263,67	51,63	48,37
600.000-699.999	4.613	649.701,19	57,07	42,93
700.000-799.999	995	754.562,10	56,79	43,21
800.000 dan lebih	9.095	957.118,70	58,74	41,26
Total	53.327	540.321,04	60,95	39,05

Tabel : L.1.5.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk

Perkapita

Menurut Kelompok Pengeluaran dan Makanan/Non Makanan

Tahun 2014

Kecamatan Klirong				
Kelompok Pengeluaran (Rupiah)	Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
Kurang dari 100.000	0	0	0	0
100.000-149.999	0	0	0	0
150.000-199.999	0	0	0	0
200.000-249.999	2.464	226.755,16	68,48	31,52
250.000-299.999	7.193	273.349,92	72,55	27,45
300.000-399.999	10.575	348.066,28	69,63	30,37
400.000-499.999	16.412	444.414,31	67,88	32,12
500.000-599.999	8.890	560.411,40	67,23	32,77
600.000-699.999	2.197	635.687,07	64,67	35,33
700.000-799.999	2.006	768.061,62	64,83	35,17
800.000 dan lebih	4.629	1.009.125,00	57,54	42,46
Total	54.366	479.897,22	66,93	33,07

Tabel : L.1.6.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk Perkapita

Menurut Kelompok Pengeluaran dan Makanan/Non Makanan

Tahun 2014

Kecamatan Buluspesantren

Kelompok Pengeluaran (Rupiah)	Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
Kurang dari 100.000	0	0	0	0
100.000-149.999	0	0	0	0
150.000-199.999	0	0	0	0
200.000-249.999	388	220.446,43	60,70	39,30
250.000-299.999	1.258	278.804,93	68,09	31,91
300.000-399.999	17.684	361.367,72	60,93	39,07
400.000-499.999	12.096	445.144,83	59,16	40,84
500.000-599.999	6.928	547.103,28	54,64	45,36
600.000-699.999	4.364	649.467,56	64,90	35,10
700.000-799.999	3.880	742.134,48	63,75	36,25
800.000 dan lebih	5.976	1.136.723,95	42,14	57,86
Total	52.574	542.251,31	57,45	42,55

Tabel : L.1.7.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk

Perkapita

Menurut Kelompok Pengeluaran dan Makanan/Non Makanan

Tahun 2014

Kecamatan Ambal

Kelompok Pengeluaran (Rupiah)	Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
Kurang dari 100.000	0	0	0	0
100.000-149.999	0	0	0	0
150.000-199.999	1.092	179854,38	65,50	34,50
200.000-249.999	1.427	242.846,94	56,67	43,33
250.000-299.999	5.708	271.646,68	70,57	29,43
300.000-399.999	10.471	343.411,78	61,01	38,99
400.000-499.999	12.653	451.099,47	64,07	35,93
500.000-599.999	8.726	542.873,87	55,09	44,91
600.000-699.999	4.145	643.950,89	38,48	61,52
700.000-799.999	3.518	757.042,24	47,54	52,46
800.000 dan lebih	7.017	1.177.518,94	41,83	58,17
Total	54.757	542.932,37	53,41	46,59

Tabel : L.1.8.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk Perkapita

Menurut Kelompok Pengeluaran dan Makanan/Non Makanan

Tahun 2014

Kecamatan Mirit

Kelompok Pengeluaran (Rupiah)	Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
Kurang dari 100.000	0	0	0	0
100.000-149.999	0	-	0,00	0,00
150.000-199.999	768	185502,9762	65,56	34,44
200.000-249.999	5.450	219.789,49	68,65	31,35
250.000-299.999	4.791	271.160,71	70,41	29,59
300.000-399.999	13.244	349.791,82	63,66	36,34
400.000-499.999	11.941	449.498,64	67,54	32,46
500.000-599.999	3.679	549.991,95	61,55	38,45
600.000-699.999	1.303	636.563,00	58,95	41,05
700.000-799.999	1.152	740.611,11	64,88	35,12
800.000 dan lebih	1.627	1.352.669,31	29,82	70,18
Total	43.955	421.940,51	61,34	38,66

Tabel : L.1.9.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk

Perkapita

Menurut Kelompok Pengeluaran dan Makanan/Non Makanan

Tahun 2014

Kecamatan Bonorowo

Kelompok Pengeluaran (Rupiah)	Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
Kurang dari 100.000	0	0	0	0
100.000-149.999	0	-	0,00	0,00
150.000-199.999	448	199.047,62	70,19	29,81
200.000-249.999	1.694	214.991,27	70,66	29,34
250.000-299.999	1.544	273.038,42	70,38	29,62
300.000-399.999	2.146	361.602,81	68,71	31,29
400.000-499.999	4.485	463.060,32	65,18	34,82
500.000-599.999	3.887	542.587,29	65,62	34,38
600.000-699.999	1.239	650.832,01	70,39	29,61
700.000-799.999	1.152	724171,7687	24,26	75,74
800.000 dan lebih	1.942	1.035.786,90	45,01	54,99
Total	18.537	511.891,18	59,47	40,53

Tabel : L.1.10.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk Perkapita

Menurut Kelompok Pengeluaran dan Makanan/Non Makanan

Tahun 2014

Kecamatan Prembun				
Kelompok Pengeluaran (Rupiah)	Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
Kurang dari 100.000	0	0	0	0
100.000-149.999	0	0	0	0
150.000-199.999	0	-	0,00	0,00
200.000-249.999	0	-	0,00	0,00
250.000-299.999	1.125	284.805,65	82,61	17,39
300.000-399.999	6.196	347.883,97	77,72	22,28
400.000-499.999	6.430	452.762,76	68,54	31,46
500.000-599.999	3.409	563.174,00	63,41	36,59
600.000-699.999	2.837	660.811,11	67,14	32,86
700.000-799.999	2.450	750.832,96	57,74	42,26
800.000 dan lebih	3.887	1.112.976,19	51,77	48,23
Total	26.334	582.798,68	62,65	37,35

Tabel : L.1.11.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk

Perkapita

Menurut Kelompok Pengeluaran dan Makanan/Non Makanan

Tahun 2014

Kecamatan Padureso				
Kelompok Pengeluaran (Rupiah)	Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
Kurang dari 100.000	0	0	0	0
100.000-149.999	0	0	0	0
150.000-199.999	0	0	0	0
200.000-249.999	543	245.591,07	66,98	33,02
250.000-299.999	3.899	275.889,61	60,32	39,68
300.000-399.999	5.844	340.653,14	59,42	40,58
400.000-499.999	1.779	448.462,70	52,51	47,49
500.000-599.999	777	547.444,10	52,89	47,11
600.000-699.999	275	639.501,69	51,42	48,58
700.000-799.999	148	731.126,19	56,30	43,70
800.000 dan lebih	78	950.366,54	42,89	57,11
Total	13.343	358.330,51	58,60	41,40

Tabel : L.1.12.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk Perkapita

Menurut Kelompok Pengeluaran dan Makanan/Non Makanan

Tahun 2014

Kecamatan Kutowinangun				
Kelompok Pengeluaran (Rupiah)	Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
Kurang dari 100.000	0	0	0	0
100.000-149.999	0	-	0,00	0,00
150.000-199.999	0	-	0,00	0,00
200.000-249.999	0	-	0,00	0,00
250.000-299.999	3.994	277.386,04	61,55	38,45
300.000-399.999	11.543	350.577,46	64,18	35,82
400.000-499.999	11.732	446.432,55	64,83	35,17
500.000-599.999	7.779	536.522,59	60,27	39,73
600.000-699.999	2.460	657.069,60	52,08	47,92
700.000-799.999	2.440	749.931,86	52,68	47,32
800.000 dan lebih	2.249	1.246.418,37	38,64	61,36
Total	42.197	493.285,57	56,72	43,28

Tabel : L.1.13.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk Perkapita

Menurut Kelompok Pengeluaran dan Makanan/Non Makanan

Tahun 2014

Kecamatan Alian				
Kelompok Pengeluaran (Rupiah)	Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
Kurang dari 100.000	0	0	0	0
100.000-149.999	0	-	0,00	0,00
150.000-199.999	0	-	0,00	0,00
200.000-249.999	0	-	0,00	0,00
250.000-299.999	6.977	280.833,33	69,18	30,82
300.000-399.999	22.444	359.183,26	65,85	34,15
400.000-499.999	11.477	434.497,99	58,65	41,35
500.000-599.999	5.866	546.458,33	60,91	39,09
600.000-699.999	2.805	642.353,68	58,54	41,46
700.000-799.999	2.641	729.058,63	53,15	46,85
800.000 dan lebih	1.859	978.320,63	47,37	52,63
Total	54.069	439.421,58	60,09	39,91

Tabel : L.1.14.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk Perkapita

Menurut Kelompok Pengeluaran dan Makanan/Non Makanan

Tahun 2014

Kecamatan Poncowarno				
Kelompok Pengeluaran (Rupiah)	Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
Kurang dari 100.000	0	0	0,00	0,00
100.000-149.999	0	0	0,00	0,00
150.000-199.999	0	0	0,00	0,00
200.000-249.999	0	-	0,00	0,00
250.000-299.999	977	289.800,31	79,50	20,50
300.000-399.999	3.268	356.579,48	79,41	20,59
400.000-499.999	3.440	445.805,22	73,91	26,09
500.000-599.999	3.300	540.678,07	79,35	20,65
600.000-699.999	2.364	632.989,29	79,29	20,71
700.000-799.999	1.343	735882,9365	78,33	21,67
800.000 dan lebih	253	899814,2857	66,48	33,52
Total	14.945	500.406,47	79,82	20,18

Tabel : L.1.15.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk Perkapita

Menurut Kelompok Pengeluaran dan Makanan/Non Makanan

Tahun 2014

Kecamatan Kebumen				
Kelompok Pengeluaran (Rupiah)	Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
Kurang dari 100.000	0	0	0,00	0,00
100.000-149.999	951	116678,5714	64,13	35,87
150.000-199.999	4.436	190.441,39	62,69	37,31
200.000-249.999	7.945	226.754,61	70,13	29,87
250.000-299.999	17.453	271.688,97	64,98	35,02
300.000-399.999	22.452	347.786,18	63,63	36,37
400.000-499.999	20.714	440.712,54	59,79	40,21
500.000-599.999	10.482	554.463,50	59,20	40,80
600.000-699.999	9.553	662.183,04	49,45	50,55
700.000-799.999	5.435	741.576,01	55,11	44,89
800.000 dan lebih	22.376	1.295.391,88	39,33	60,67
Total	121.797	571.363,85	50,59	49,41

Tabel : L.1.16.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk Perkapita

Menurut Kelompok Pengeluaran dan Makanan/Non Makanan

Tahun 2014

Kecamatan Pejagoan				
Kelompok Pengeluaran (Rupiah)	Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
Kurang dari 100.000	0	0	0	0
100.000-149.999	0	0	0	0
150.000-199.999	0	-	0,00	0,00
200.000-249.999	2.180	217.258,07	61,47	38,53
250.000-299.999	6.011	273.529,58	60,98	39,02
300.000-399.999	17.009	338.551,08	57,20	42,80
400.000-499.999	11.047	441.619,55	54,57	45,43
500.000-599.999	5.436	535.518,84	53,67	46,33
600.000-699.999	1.754	648.442,11	49,24	50,76
700.000-799.999	1.929	728.923,23	50,34	49,66
800.000 dan lebih	3.558	1.238.005,15	44,55	55,45
Total	48.924	462.230,37	53,75	46,25

Tabel : L.1.17.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk Perkapita

Menurut Kelompok Pengeluaran dan Makanan/Non Makanan

Tahun 2014

Kecamatan Sruweng				
Kelompok Pengeluaran (Rupiah)	Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
Kurang dari 100.000	0	0	0	0
100.000-149.999	0	0	0	0
150.000-199.999	0	-	0,00	0,00
200.000-249.999	3.303	228.109,69	74,86	25,14
250.000-299.999	4.072	281.547,62	75,06	24,94
300.000-399.999	16.486	347.839,40	70,36	29,64
400.000-499.999	19.263	448.372,56	68,88	31,12
500.000-599.999	5.693	528.268,80	68,37	31,63
600.000-699.999	1.945	622.197,92	69,46	30,54
700.000-799.999	627	753.576,19	73,88	26,12
800.000 dan lebih	2.088	1.073.429,89	57,71	42,29
Total	53.477	433.883,96	70,04	29,96

Tabel : L.1.18.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk Perkapita

Menurut Kelompok Pengeluaran dan Makanan/Non Makanan

Tahun 2014

Kecamatan Adimulyo				
Kelompok Pengeluaran (Rupiah)	Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
Kurang dari 100.000	0	0	0,00	0,00
100.000-149.999	0	0	0,00	0,00
150.000-199.999	1.453	186760,7143	63,47	36,53
200.000-249.999	1.484	225.572,12	70,50	29,50
250.000-299.999	1.188	277.592,99	73,10	26,90
300.000-399.999	8.318	351.578,22	68,48	31,52
400.000-499.999	10.233	450.039,02	69,42	30,58
500.000-599.999	3.961	548.703,97	68,34	31,66
600.000-699.999	2.641	648.462,80	69,39	30,61
700.000-799.999	2.509	731.321,49	69,67	30,33
800.000 dan lebih	2.409	1.161.715,48	41,10	58,90
Total	34.196	496.696,53	64,48	35,52

Tabel : L.1.19.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk Perkapita

Menurut Kelompok Pengeluaran dan Makanan/Non Makanan

Tahun 2014

Kecamatan Kuwarasan				
Kelompok Pengeluaran (Rupiah)	Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
Kurang dari 100.000	0	0	0,00	0,00
100.000-149.999	0	0	0,00	0,00
150.000-199.999	0	0	0,00	0,00
200.000-249.999	1.727	229.642,86	65,74	34,26
250.000-299.999	1.930	277.207,14	69,36	30,64
300.000-399.999	15.838	348.209,86	63,96	36,04
400.000-499.999	12.792	449.723,54	62,31	37,69
500.000-599.999	8.220	546.420,73	59,73	40,27
600.000-699.999	1.015	643.025,24	66,08	33,92
700.000-799.999	1.827	757.330,16	54,13	45,87
800.000 dan lebih	1.321	892.455,61	59,66	40,34
Total	44.670	445.628,82	61,79	38,21

Tabel : L.1.20.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk Perkapita

Menurut Kelompok Pengeluaran dan Makanan/Non Makanan

Tahun 2014

Kecamatan Rowokele				
Kelompok Pengeluaran (Rupiah)	Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
Kurang dari 100.000	0	0	0	0
100.000-149.999	0	-	0,00	0,00
150.000-199.999	1.453	184.518,27	67,49	32,51
200.000-249.999	1.484	233.866,80	73,32	26,68
250.000-299.999	1.188	272.607,58	69,21	30,79
300.000-399.999	8.318	350.906,22	67,72	32,28
400.000-499.999	10.233	429.991,01	67,11	32,89
500.000-599.999	3.961	565.073,50	59,40	40,60
600.000-699.999	2.641	649.939,33	63,47	36,53
700.000-799.999	2.509	705.111,23	62,60	37,40
800.000 dan lebih	2.409	805.666,11	55,70	24,00
Total	34.196	465.629,80	66,89	33,11

Tabel : L.1.21.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk

Perkapita

Menurut Kelompok Pengeluaran dan Makanan/Non Makanan

Tahun 2014

Kecamatan Sempor				
Kelompok Pengeluaran (Rupiah)	Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
Kurang dari 100.000	0	0	0	0
100.000-149.999	0	0	0	0
150.000-199.999	0	-	0,00	0,00
200.000-249.999	0	-	0,00	0,00
250.000-299.999	2.045	283.704,63	67,01	32,99
300.000-399.999	14.814	371.587,51	62,33	37,67
400.000-499.999	16.664	420.074,68	59,78	40,22
500.000-599.999	12.547	542.884,84	60,32	39,68
600.000-699.999	7.254	661.579,51	56,75	43,25
700.000-799.999	1.284	724.875,00	49,51	50,49
800.000 dan lebih	4.597	1.354.279,87	39,49	60,51
Total	59.205	537.995,70	55,93	44,07

Tabel : L.1.22.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk Perkapita

Menurut Kelompok Pengeluaran dan Makanan/Non Makanan

Tahun 2014

Kecamatan Gombong				
Kelompok Pengeluaran (Rupiah)	Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
Kurang dari 100.000	0	0	0	0
100.000-149.999	0	0,00	0,00	0,00
150.000-199.999	1.377	180.692,18	51,27	48,73
200.000-249.999	1.472	249.833,33	66,94	33,06
250.000-299.999	1.676	294.214,29	67,01	32,99
300.000-399.999	8.057	365.111,15	65,60	34,40
400.000-499.999	11.791	464.560,46	64,05	35,95
500.000-599.999	7.231	550.863,94	62,46	37,54
600.000-699.999	7.468	651.158,18	58,77	41,23
700.000-799.999	2.751	705.111,23	62,60	37,40
800.000 dan lebih	5.539	805.666,11	55,70	24,00
Total	47.362	523.151,38	61,79	38,21

Tabel : L.1.23.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk Perkapita

Menurut Kelompok Pengeluaran dan Makanan/Non Makanan

Tahun 2014

Kecamatan Karanganyar				
Kelompok Pengeluaran (Rupiah)	Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
Kurang dari 100.000	0	0	0	0
100.000-149.999	0	-	0,00	0,00
150.000-199.999	1.363	182.282,64	66,46	33,54
200.000-249.999	1.568	249.309,05	68,47	31,53
250.000-299.999	2.157	266.418,27	65,65	34,35
300.000-399.999	6.150	357.536,66	64,26	35,74
400.000-499.999	4.200	448.314,19	64,84	35,16
500.000-599.999	1.589	520.031,29	73,29	26,71
600.000-699.999	795	639.068,98	51,64	48,36
700.000-799.999	227	705.111,23	62,60	37,40
800.000 dan lebih	114	805.666,11	55,70	24,00
Total	18.163	378.907,55	64,87	35,13

Tabel : L.1.24.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk Perkapita

Menurut Kelompok Pengeluaran dan Makanan/Non Makanan

Tahun 2014

Kecamatan Karanggayam

Kelompok Pengeluaran (Rupiah)	Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
Kurang dari 100.000	0	-	0,00	0,00
100.000-149.999	0	-	0,00	0,00
150.000-199.999	2.510	173.958,24	69,62	30,38
200.000-249.999	3.954	236.401,47	69,68	30,32
250.000-299.999	7.335	273.924,71	71,34	28,66
300.000-399.999	20.462	345.504,58	70,34	29,66
400.000-499.999	9.766	440.876,39	71,65	28,35
500.000-599.999	1.351	528.958,81	76,63	23,37
600.000-699.999	965	684.487,16	69,80	30,20
700.000-799.999	193	705.111,23	62,60	37,40
800.000 dan lebih	1.916	805.666,11	55,70	24,00
Total	48.452	367.597,09	69,24	30,76

Tabel : L.1.25.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk Perkapita

Menurut Kelompok Pengeluaran dan Makanan/Non Makanan

Tahun 2014

Kecamatan Sadang

Kelompok Pengeluaran (Rupiah)	Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
Kurang dari 100.000	0	0	0	0
100.000-149.999	0	-	0,00	0,00
150.000-199.999	1.363	182.282,64	79,89	20,11
200.000-249.999	1.568	249.309,05	82,10	17,90
250.000-299.999	2.157	266.418,27	79,89	20,11
300.000-399.999	6.150	357.536,66	69,83	30,17
400.000-499.999	4.200	448.314,19	68,13	31,87
500.000-599.999	1.589	520.031,29	65,52	34,48
600.000-699.999	795	639.068,98	60,32	39,68
700.000-799.999	227	705.111,23	62,60	37,40
800.000 dan lebih	114	805.666,11	55,70	24,00
Total	18.163	378.907,55	69,94	30,06

Tabel : L.1.26.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk Perkapita

Menurut Kelompok Pengeluaran dan Makanan/Non Makanan

Tahun 2014

Kecamatan Karangsembung				
Kelompok Pengeluaran (Rupiah)	Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan	Persentase	
			Makanan	Non Makanan
Kurang dari 100.000	0	0	0	0
100.000-149.999	0	0	0	0
150.000-199.999	0	-	0,00	0,00
200.000-249.999	367	246.335,20	64,89	35,11
250.000-299.999	559	286.345,12	61,25	38,75
300.000-399.999	4.479	377.717,42	58,50	41,50
400.000-499.999	12.012	445.829,69	57,98	42,02
500.000-599.999	8.957	554.665,82	52,24	47,76
600.000-699.999	7.298	648.240,48	50,00	50,00
700.000-799.999	2.125	769.119,00	47,92	52,08
800.000 dan lebih	1.690	904.994,05	47,41	52,59
Total	37.487	537.796,92	53,14	46,86

Tabel : L.2.A.
Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk
Tahun 2014

Kabupaten Kebumen			Perkotaan+Perdesaan		
Jenis Pengeluaran					
Makanan			Non Makanan		
Komoditi	Perkapita	%	Komoditi	Perkapita	%
Padi2an	56.067,30	19,12	Perumahan	72.150,02	37,37
Umbi2an	2.621,31	0,89	Aneka Barang dan Jasa	46.289,68	23,98
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	9.964,25	3,40	Pendidikan	10.199,22	5,28
Daging	12.657,91	4,32	Kesehatan	22.387,66	11,60
Telur dan susu	18.923,63	6,45	Pakaian	15.298,18	7,92
Sayur2an	32.131,41	10,96	Barang tahan lama	13.309,95	6,89
Kacang2an	15.224,40	5,19	Pajak dan Asuransi	6.874,57	3,56
Buah2an	15.669,13	5,34	Keperluan Pesta	6.543,41	3,39
Minyak dan Lemak	13.254,98	4,52			
Bahan Minuman	15.632,17	5,33			
Bumbu2an	8.197,08	2,80			
Konsumsi Lainnya	8.112,67	2,77			
Makanan dan minuman jadi	51.016,53	17,40			
Tembakau dan Sirih	33.706,88	11,50			
Total	293.179,68	100,00		193.052,67	100,00
Persentase	60,30			39,70	
Rata-rata Pengeluaran	486.232,35				

Tabel : L.2.B.
Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk
Tahun 2014

Kabupaten Kebumen			Perkotaan		
Jenis Pengeluaran					
Makanan			Non Makanan		
Komoditi	Perkapita	%	Komoditi	Perkapita	%
Padi2an	55.362,29	20,26	Perumahan	94.182,37	40,10
Umbi2an	2.394,11	0,86	Aneka Barang dan Jasa	54.951,01	23,40
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	9.686,45	3,32	Pendidikan	13.086,18	5,57
Daging	14.918,46	3,36	Kesehatan	24.536,82	10,45
Telur dan susu	21.521,88	7,25	Pakaian	17.645,03	7,51
Sayur2an	32.071,03	10,73	Barang tahan lama	14.694,39	6,26
Kacang2an	15.015,21	5,47	Pajak dan Asuransi	8.386,58	3,57
Buah2an	16.046,75	4,38	Keperluan Pesta	7.382,80	3,14
Minyak dan Lemak	12.994,03	4,48			
Bahan Minuman	15.461,14	4,81			
Bumbu2an	8.526,00	3,44			
Konsumsi Lainnya	8.224,50	2,84			
Makanan dan minuman jadi	55.257,75	16,89			
Tembakau dan Sirih	35.419,87	11,92			
Total	302.899,48	100,00		234.865,18	100,00
Persentase	56,33			43,67	
Rata-rata Pengeluaran	537.764,66				

Tabel : L.2.C.
Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk
Tahun 2014

Kabupaten Kebumen			Perdesaan		
Jenis Pengeluaran					
Makanan			Non Makanan		
Komoditi	Perkapita	%	Komoditi	Perkapita	%
Padi2an	56.422,36	19,57	Perumahan	61.053,97	35,50
Umbi2an	2.735,74	0,95	Aneka Barang dan Jasa	41.927,63	24,38
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	10.104,16	3,50	Pendidikan	8.745,27	5,08
Daging	11.519,44	4,00	Kesehatan	21.305,30	12,39
Telur dan susu	17.615,08	6,11	Pakaian	14.116,25	8,21
Sayur2an	32.161,82	11,16	Barang tahan lama	12.612,72	7,33
Kacang2an	15.329,76	5,32	Pajak dan Asuransi	6.113,08	3,55
Buah2an	15.478,96	5,37	Keperluan Pesta	6.120,67	3,56
Minyak dan Lemak	13.386,40	4,64			
Bahan Minuman	15.718,31	5,45			
Bumbu2an	8.031,43	2,79			
Konsumsi Lainnya	8.056,35	2,79			
Makanan dan minuman jadi	48.880,55	16,96			
Tembakau dan Sirih	32.844,18	11,39			
Total	288.284,55	100,00		171.994,89	100,00
Persentase	62,63			37,37	
Rata-rata Pengeluaran	460.279,44				

Tabel : L.2.1.
Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk
Tahun 2014

Kecamatan Ayah			Jenis Pengeluaran		
Makanan			Non Makanan		
Komoditi	Perkapita	%	Komoditi	Perkapita	%
Padi2an	69.358,68	23,82	Perumahan	64.961,92	32,33
Umbi2an	1.802,16	0,62	Aneka Barang dan Jasa	65.242,95	32,47
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	14.259,13	4,90	Pendidikan	10.038,53	5,00
Daging	6.846,33	2,35	Kesehatan	14.606,23	7,27
Telur dan susu	15.100,72	5,19	Pakaian	16.334,30	8,13
Sayur2an	40.897,27	14,05	Barang tahan lama	14.782,55	7,36
Kacang2an	9.703,56	3,33	Pajak dan Asuransi	10.414,45	5,18
Buah2an	15.589,45	5,36	Keperluan Pesta	4.539,25	2,26
Minyak dan Lemak	12.082,74	4,15			
Bahan Minuman	14.567,03	5,00			
Bumbu2an	9.072,13	3,12			
Konsumsi Lainnya	5.986,82	2,06			
Makanan dan minuman jadi	47.190,18	16,21			
Tembakau dan Sirih	28.662,91	9,85			
Total	291.119,11	100,00		200.920,18	100,00
Persentase	59,17			40,83	
Rata-rata Pengeluaran	492.039,29				

Tabel : L.2.2.
Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk
Tahun 2014

Kecamatan Buayan

Jenis Pengeluaran					
Makanan			Non Makanan		
Komoditi	Perkapita	%	Komoditi	Perkapita	%
Padi2an	54.687,50	21,17	Perumahan	83.212,45	40,66
Umbi2an	3.139,03	1,22	Aneka Barang dan Jasa	56.381,38	27,55
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	14.036,99	5,43	Pendidikan	12.448,43	6,08
Daging	13.360,97	5,17	Kesehatan	19.410,44	9,49
Telur dan susu	20.006,38	7,74	Pakaian	14.902,13	7,28
Sayur2an	32.469,39	12,57	Barang tahan lama	11.129,71	5,44
Kacang2an	13.811,22	5,35	Pajak dan Asuransi	7.043,01	3,44
Buah2an	14.668,37	5,68	Keperluan Pesta	106,02	0,05
Minyak dan Lemak	12.776,15	4,95			
Bahan Minuman	13.041,45	5,05			
Bumbu2an	7.316,33	2,83			
Konsumsi Lainnya	6.065,05	2,35			
Makanan dan minuman jadi	31.154,34	12,06			
Tembakau dan Sirih	21.804,85	8,44			
Total	258.338,01	100,00	Total	204.633,58	100,00
Persentase	55,80			44,20	
Rata-rata Pengeluaran	462.971,59				

Tabel :L.2.3.
Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk
Tahun 2014

Kecamatan Puring

Jenis Pengeluaran					
Makanan			Non Makanan		
Komoditi	Perkapita	%	Komoditi	Perkapita	%
Padi2an	62.949,23	21,27	Perumahan	54.478,12	39,84
Umbi2an	812,34	0,27	Aneka Barang dan Jasa	35.248,10	25,78
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	9.061,97	3,06	Pendidikan	7.251,08	5,30
Daging	7.070,68	2,39	Kesehatan	25.615,45	18,73
Telur dan susu	19.289,45	6,52	Pakaian	7.358,54	5,38
Sayur2an	31.436,68	10,62	Barang tahan lama	2.368,20	1,73
Kacang2an	21.857,89	7,39	Pajak dan Asuransi	4.378,52	3,20
Buah2an	9.068,69	3,06	Keperluan Pesta	42,59	0,03
Minyak dan Lemak	12.556,62	4,24			
Bahan Minuman	19.001,62	6,42			
Bumbu2an	4.402,34	1,49			
Konsumsi Lainnya	9.022,40	3,05			
Makanan dan minuman jadi	62.417,62	21,09			
Tembakau dan Sirih	26.973,12	9,11			
Total	295.920,66	100,00	Total	136.740,60	100,00
Persentase	68,40			31,60	
Rata-rata Pengeluaran	432.661,26				

Tabel : L.2.4.
Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk
Tahun 2014

Kecamatan Petanahan					
Jenis Pengeluaran					
Makanan			Non Makanan		
Komoditi	Perkapita	%	Komoditi	Perkapita	%
Padi2an	57.041,89	17,32	Perumahan	70.830,86	33,57
Umbi2an	2.635,94	0,80	Aneka Barang dan Jasa	53.227,64	25,23
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	18.162,38	5,51	Pendidikan	11.830,54	5,61
Daging	7.792,88	2,37	Kesehatan	20.347,71	9,64
Telur dan susu	19.798,07	6,01	Pakaian	26.604,53	12,61
Sayur2an	34.232,33	10,39	Barang tahan lama	14.086,12	6,68
Kacang2an	16.673,50	5,06	Pajak dan Asuransi	7.411,33	3,51
Buah2an	21.435,99	6,51	Keperluan Pesta	6.646,22	3,15
Minyak dan Lemak	18.113,45	5,50			
Bahan Minuman	17.228,13	5,23			
Bumbu2an	10.475,61	3,18			
Konsumsi Lainnya	9.921,65	3,01			
Makanan dan minuman jadi	65.019,77	19,74			
Tembakau dan Sirih	30.804,50	9,35			
Total	329.336,09	100,00		210.984,96	100,00
Persentase	60,95			39,05	
Rata-rata Pengeluaran	540.321,04				

Tabel : L.2.5.
Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk
Tahun 2014

Kecamatan Klirong					
Jenis Pengeluaran					
Makanan			Non Makanan		
Komoditi	Perkapita	%	Komoditi	Perkapita	%
Padi2an	54.754,04	17,05	Perumahan	75.075,26	47,30
Umbi2an	2.459,57	0,77	Aneka Barang dan Jasa	35.849,92	22,59
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	13.733,15	4,28	Pendidikan	8.300,87	5,23
Daging	21.556,60	6,71	Kesehatan	12.543,45	7,90
Telur dan susu	22.803,23	7,10	Pakaian	10.488,17	6,61
Sayur2an	30.507,41	9,50	Barang tahan lama	7.257,21	4,57
Kacang2an	17.998,65	5,60	Pajak dan Asuransi	5.578,80	3,52
Buah2an	15.758,09	4,91	Keperluan Pesta	3.612,84	2,28
Minyak dan Lemak	14.036,39	4,37			
Bahan Minuman	19.070,08	5,94			
Bumbu2an	11.467,65	3,57			
Konsumsi Lainnya	10.927,22	3,40			
Makanan dan minuman jadi	30.559,30	9,51			
Tembakau dan Sirih	55.559,30	17,30			
Total	321.190,70	100,00		158.706,52	100,00
Persentase	66,93			33,07	
Rata-rata Pengeluaran	479.897,22				

Tabel : L.2.6.
Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk
Tahun 2014

Kecamatan Buluspesantren

Jenis Pengeluaran					
Makanan			Non Makanan		
Komoditi	Perkapita	%	Komoditi	Perkapita	%
Padi2an	53.630,34	17,21	Perumahan	75.110,58	32,56
Umbi2an	1.146,55	0,37	Aneka Barang dan Jasa	46.516,95	20,16
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	3.962,31	1,27	Pendidikan	27.754,86	12,03
Daging	12.445,97	3,99	Kesehatan	35.271,85	15,29
Telur dan susu	16.110,96	5,17	Pakaian	16.207,07	7,02
Sayur2an	29.403,80	9,44	Barang tahan lama	19.370,40	8,40
Kacang2an	18.177,12	5,83	Pajak dan Asuransi	6.180,68	2,68
Buah2an	13.409,07	4,30	Keperluan Pesta	4.295,57	1,86
Minyak dan Lemak	12.595,41	4,04			
Bahan Minuman	18.726,67	6,01			
Bumbu2an	8.307,33	2,67			
Konsumsi Lainnya	5.234,58	1,68			
Makanan dan minuman jadi	80.739,06	25,92			
Tembakau dan Sirih	37.654,19	12,09			
Total	311.543,36	100,00		230.707,96	100,00
Persentase	57,45			42,55	
Rata-rata Pengeluaran	542.251,31				

Tabel : L.2.7.
Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk
Tahun 2014

Kecamatan Ambal

Jenis Pengeluaran					
Makanan			Non Makanan		
Komoditi	Perkapita	%	Komoditi	Perkapita	%
Padi2an	40.968,70	14,13	Perumahan	64.269,28	25,41
Umbi2an	798,24	0,28	Aneka Barang dan Jasa	46.366,04	18,33
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	8.836,08	3,05	Pendidikan	7.678,28	3,04
Daging	6.326,12	2,18	Kesehatan	51.137,51	20,22
Telur dan susu	20.987,19	7,24	Pakaian	19.097,82	7,55
Sayur2an	18.846,90	6,50	Barang tahan lama	44.688,98	17,67
Kacang2an	16.050,09	5,53	Pajak dan Asuransi	7.140,00	2,82
Buah2an	16.152,53	5,57	Keperluan Pesta	12.575,52	4,97
Minyak dan Lemak	12.350,88	4,26			
Bahan Minuman	13.114,11	4,52			
Bumbu2an	5.845,48	2,02			
Konsumsi Lainnya	12.596,76	4,34			
Makanan dan minuman jadi	70.304,50	24,24			
Tembakau dan Sirih	46.801,37	16,14			
Total	289.978,94	100,00		252.953,43	100,00
Persentase	53,41			46,59	
Rata-rata Pengeluaran	542.932,37				

Tabel : L.2.8.
Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk
Tahun 2014

Kecamatan Mirit

Jenis Pengeluaran					
Makanan			Non Makanan		
Komoditi	Perkapita	%	Komoditi	Perkapita	%
Padi2an	58.938,40	22,77	Perumahan	61.011,92	37,40
Umbi2an	1.160,32	0,45	Aneka Barang dan Jasa	42.106,80	25,81
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	13.240,80	5,12	Pendidikan	2.817,83	1,73
Daging	12.726,14	4,92	Kesehatan	13.604,51	8,34
Telur dan susu	11.274,80	4,36	Pakaian	13.886,97	8,51
Sayur2an	27.207,74	10,51	Barang tahan lama	24.170,91	14,82
Kacang2an	11.500,31	4,44	Pajak dan Asuransi	5.524,20	3,39
Buah2an	12.454,77	4,81	Keperluan Pesta	0,00	0,00
Minyak dan Lemak	11.848,41	4,58			
Bahan Minuman	14.663,13	5,67			
Bumbu2an	7.273,55	2,81			
Konsumsi Lainnya	2.988,77	1,15			
Makanan dan minuman jadi	32.704,30	12,64			
Tembakau dan Sirih	40.835,93	15,78			
Total	258.817,37	100,00		163.123,14	100,00
Persentase	61,34			38,66	
Rata-rata Pengeluaran	421.940,51				

Tabel : L.2.9.
Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk
Tahun 2014

Kecamatan Bonorowo

Jenis Pengeluaran					
Makanan			Non Makanan		
Komoditi	Perkapita	%	Komoditi	Perkapita	%
Padi2an	58.546,66	19,23	Perumahan	79.073,51	38,11
Umbi2an	1.529,38	0,50	Aneka Barang dan Jasa	35.573,45	17,15
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	16.866,36	5,54	Pendidikan	24.320,54	11,72
Daging	9.055,30	2,97	Kesehatan	25.421,88	12,25
Telur dan susu	20.108,29	6,61	Pakaian	18.059,36	8,70
Sayur2an	27.705,07	9,10	Barang tahan lama	13.792,14	6,65
Kacang2an	10.270,16	3,37	Pajak dan Asuransi	5.182,49	2,50
Buah2an	16.337,56	5,37	Keperluan Pesta	6.054,21	2,92
Minyak dan Lemak	13.489,63	4,43			
Bahan Minuman	15.411,29	5,06			
Bumbu2an	5.816,82	1,91			
Konsumsi Lainnya	6.748,27	2,22			
Makanan dan minuman jadi	60.656,68	19,93			
Tembakau dan Sirih	41.872,12	13,76			
Total	304.413,59	100,00		207.477,58	100,00
Persentase	59,47			40,53	
Rata-rata Pengeluaran	511.891,18				

Tabel : L.2.10.
Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk
Tahun 2014

Kecamatan Prembun					
Jenis Pengeluaran					
Makanan			Non Makanan		
Komoditi	Perkapita	%	Komoditi	Perkapita	%
Padi2an	56.888,50	15,58	Perumahan	73.683,73	33,85
Umbi2an	3.438,54	0,94	Aneka Barang dan Jasa	42.167,22	19,37
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	16.031,56	4,39	Pendidikan	10.061,28	4,62
Daging	8.583,89	2,35	Kesehatan	18.332,39	8,42
Telur dan susu	18.853,41	5,16	Pakaian	18.489,63	8,49
Sayur2an	27.201,83	7,45	Barang tahan lama	11.474,13	5,27
Kacang2an	15.523,26	4,25	Pajak dan Asuransi	8.476,70	3,89
Buah2an	29.950,17	8,20	Keperluan Pesta	34.986,95	16,07
Minyak dan Lemak	14.514,12	3,98			
Bahan Minuman	18.664,04	5,11			
Bumbu2an	8.064,99	2,21			
Konsumsi Lainnya	9.721,35	2,66			
Makanan dan minuman jadi	92.790,70	25,41			
Tembakau dan Sirih	44.900,33	12,30			
Total	365.126,66	100,00		217.672,02	100,00
Persentase	62,65			37,35	
Rata-rata Pengeluaran	582.798,68				

Tabel : L.2.11.
Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk
Tahun 2014

Kecamatan Padureso					
Jenis Pengeluaran					
Makanan			Non Makanan		
Komoditi	Perkapita	%	Komoditi	Perkapita	%
Padi2an	55.780,69	26,57	Perumahan	64.211,56	43,28
Umbi2an	2.360,88	1,12	Aneka Barang dan Jasa	42.010,08	28,32
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	5.602,32	2,67	Pendidikan	3.628,81	2,45
Daging	8.626,80	4,11	Kesehatan	21.600,58	14,56
Telur dan susu	11.000,45	5,24	Pakaian	9.574,27	6,45
Sayur2an	20.007,54	9,53	Barang tahan lama	3.288,66	2,22
Kacang2an	11.791,66	5,62	Pajak dan Asuransi	4.049,66	2,73
Buah2an	14.828,91	7,06	Keperluan Pesta	0,00	0,00
Minyak dan Lemak	17.330,17	8,25			
Bahan Minuman	10.602,29	5,05			
Bumbu2an	1.657,72	0,79			
Konsumsi Lainnya	5.354,74	2,55			
Makanan dan minuman jadi	25.344,42	12,07			
Tembakau dan Sirih	19.678,29	9,37			
Total	209.966,88	100,00		148.363,63	100,00
Persentase	58,60			41,40	
Rata-rata Pengeluaran	358.330,51				

Tabel : L.2.12.
Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk
Tahun 2014

Kecamatan Kutowinangun

Jenis Pengeluaran					
Makanan			Non Makanan		
Komoditi	Perkapita	%	Komoditi	Perkapita	%
Padi2an	63.317,10	22,63	Perumahan	80.497,76	37,71
Umbi2an	1.201,15	0,43	Aneka Barang dan Jasa	43.120,89	20,20
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	6.808,14	2,43	Pendidikan	17.504,22	8,20
Daging	20.112,11	7,19	Kesehatan	36.978,55	17,32
Telur dan susu	13.721,01	4,90	Pakaian	15.148,85	7,10
Sayur2an	27.564,54	9,85	Barang tahan lama	11.499,88	5,39
Kacang2an	18.207,56	6,51	Pajak dan Asuransi	5.479,28	2,57
Buah2an	21.004,80	7,51	Keperluan Pesta	3.245,36	1,52
Minyak dan Lemak	12.518,90	4,47			
Bahan Minuman	16.647,98	5,95			
Bumbu2an	8.004,73	2,86			
Konsumsi Lainnya	9.126,84	3,26			
Makanan dan minuman jadi	29.481,10	10,54			
Tembakau dan Sirih	32.094,81	11,47			
Total	279.810,79	100,00		213.474,78	100,00
Persentase	56,72			43,28	
Rata-rata Pengeluaran	493.285,57				

Tabel : L.2.13.
Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk
Tahun 2014

Kecamatan Alian

Jenis Pengeluaran					
Makanan			Non Makanan		
Komoditi	Perkapita	%	Komoditi	Perkapita	%
Padi2an	63.741,91	24,14	Perumahan	58.697,45	33,47
Umbi2an	3.277,96	1,24	Aneka Barang dan Jasa	43.173,69	24,62
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	4.122,98	1,56	Pendidikan	5.852,20	3,34
Daging	10.376,68	3,93	Kesehatan	32.534,64	18,55
Telur dan susu	15.909,70	6,03	Pakaian	13.501,06	7,70
Sayur2an	26.681,60	10,11	Barang tahan lama	2.846,75	1,62
Kacang2an	17.166,11	6,50	Pajak dan Asuransi	5.903,83	3,37
Buah2an	14.860,51	5,63	Keperluan Pesta	12.873,96	7,34
Minyak dan Lemak	12.318,19	4,67			
Bahan Minuman	12.825,61	4,86			
Bumbu2an	8.240,90	3,12			
Konsumsi Lainnya	11.411,73	4,32			
Makanan dan minuman jadi	32.436,99	12,28			
Tembakau dan Sirih	30.667,12	11,61			
Total	264.038,01	100,00		175.383,57	100,00
Persentase	60,09			39,91	
Rata-rata Pengeluaran	439.421,58				

Tabel :L.2.14.
Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk
Tahun 2014

Kecamatan Poncowarno					
Jenis Pengeluaran					
Makanan			Non Makanan		
Komoditi	Perkapita	%	Komoditi	Perkapita	%
Padi2an	48.302,49	12,40	Perumahan	43.925,69	39,64
Umbi2an	8.803,20	2,26	Aneka Barang dan Jasa	25.226,53	22,77
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	10.946,44	2,81	Pendidikan	2.053,62	1,85
Daging	30.087,95	7,72	Kesehatan	10.854,99	9,80
Telur dan susu	37.933,48	9,74	Pakaian	12.557,22	11,33
Sayur2an	35.822,13	9,19	Barang tahan lama	7.477,90	6,75
Kacang2an	20.995,43	5,39	Pajak dan Asuransi	5.110,13	4,61
Buah2an	26.358,84	6,77	Keperluan Pesta	3.593,38	3,24
Minyak dan Lemak	20.924,58	5,37			
Bahan Minuman	10.670,12	2,74			
Bumbu2an	17.997,27	4,62			
Konsumsi Lainnya	7.349,58	1,89			
Makanan dan minuman jadi	85.630,20	21,98			
Tembakau dan Sirih	27.785,30	7,13			
Total	389.607,01	100,00		110.799,46	100,00
Persentase	77,86			22,14	
Rata-rata Pengeluaran	500.406,47				

Tabel : L.2.15
Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk
Tahun 2014

Kecamatan Kebumen					
Jenis Pengeluaran					
Makanan			Non Makanan		
Komoditi	Perkapita	%	Komoditi	Perkapita	%
Padi2an	46.124,85	15,96	Perumahan	108.933,34	38,59
Umbi2an	906,36	0,31	Aneka Barang dan Jasa	63.791,37	22,60
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	8.469,39	2,93	Pendidikan	18.823,42	6,67
Daging	14.346,34	4,96	Kesehatan	25.654,94	9,09
Telur dan susu	28.592,14	9,89	Pakaian	16.134,20	5,71
Sayur2an	19.180,67	6,64	Barang tahan lama	29.865,67	10,58
Kacang2an	10.966,39	3,79	Pajak dan Asuransi	6.486,60	2,30
Buah2an	18.331,33	6,34	Keperluan Pesta	12.630,78	4,47
Minyak dan Lemak	11.486,19	3,97			
Bahan Minuman	15.125,45	5,23			
Bumbu2an	4.549,82	1,57			
Konsumsi Lainnya	6.500,60	2,25			
Makanan dan minuman jadi	74.602,04	25,81			
Tembakau dan Sirih	29.861,94	10,33			
Total	289.043,52	100,00		282.320,33	100,00
Persentase	50,59			49,41	
Rata-rata Pengeluaran	571.363,85				

Tabel : L.2.16.
Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk
Tahun 2014

Kecamatan Pejagoan					
Jenis Pengeluaran					
Makanan			Non Makanan		
Komoditi	Perkapita	%	Komoditi	Perkapita	%
Padi2an	58.598,31	23,59	Perumahan	104.970,17	49,10
Umbi2an	5.360,98	2,16	Aneka Barang dan Jasa	45.866,04	21,45
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	5.419,35	2,18	Pendidikan	6.660,76	3,12
Daging	17.265,75	6,95	Kesehatan	24.353,68	11,39
Telur dan susu	15.494,62	6,24	Pakaian	15.547,79	7,27
Sayur2an	35.390,94	14,25	Barang tahan lama	5.187,10	2,43
Kacang2an	14.646,70	5,90	Pajak dan Asuransi	9.992,23	4,67
Buah2an	8.364,06	3,37	Keperluan Pesta	1.215,57	0,57
Minyak dan Lemak	7.857,14	3,16			
Bahan Minuman	12.835,64	5,17			
Bumbu2an	8.817,20	3,55			
Konsumsi Lainnya	9.784,18	3,94			
Makanan dan minuman jadi	28.279,57	11,38			
Tembakau dan Sirih	20.322,58	8,18			
Total	248.437,02	100,00		213.793,35	100,00
Persentase	53,75			46,25	
Rata-rata Pengeluaran	462.230,37				

Tabel : L.2.17.
Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk
Tahun 2014

Kecamatan Sruweng					
Jenis Pengeluaran					
Makanan			Non Makanan		
Komoditi	Perkapita	%	Komoditi	Perkapita	%
Padi2an	56.261,69	18,51	Perumahan	56.660,70	43,59
Umbi2an	2.926,95	0,96	Aneka Barang dan Jasa	31.542,64	24,27
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	9.365,26	3,08	Pendidikan	3.845,28	2,96
Daging	12.579,55	4,14	Kesehatan	14.429,50	11,10
Telur dan susu	14.378,57	4,73	Pakaian	13.635,23	10,49
Sayur2an	27.002,14	8,88	Barang tahan lama	3.233,11	2,49
Kacang2an	16.572,08	5,45	Pajak dan Asuransi	3.910,31	3,01
Buah2an	21.224,03	6,98	Keperluan Pesta	2.716,65	2,09
Minyak dan Lemak	13.193,18	4,34			
Bahan Minuman	15.502,60	5,10			
Bumbu2an	9.586,97	3,15			
Konsumsi Lainnya	7.398,70	2,43			
Makanan dan minuman jadi	58.402,60	19,22			
Tembakau dan Sirih	39.516,23	13,00			
Total	303.910,54	100,00		129.973,42	100,00
Persentase	70,04			29,96	
Rata-rata Pengeluaran	433.883,96				

Tabel : L.2.18.
Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk
Tahun 2014

Kecamatan Adimulyo

Jenis Pengeluaran					
Makanan			Non Makanan		
Komoditi	Perkapita	%	Komoditi	Perkapita	%
Padi2an	51.134,05	15,97	Perumahan	56.880,03	32,24
Umbi2an	927,47	0,29	Aneka Barang dan Jasa	41.366,69	23,45
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	10.602,59	3,31	Pendidikan	8.850,03	5,02
Daging	17.093,22	5,34	Kesehatan	11.734,60	6,65
Telur dan susu	17.564,81	5,48	Pakaian	10.230,55	5,80
Sayur2an	33.665,20	10,51	Barang tahan lama	12.796,89	7,25
Kacang2an	15.548,95	4,85	Pajak dan Asuransi	6.202,04	3,52
Buah2an	17.720,35	5,53	Keperluan Pesta	28.357,38	16,07
Minyak dan Lemak	14.205,74	4,44			
Bahan Minuman	16.701,05	5,21			
Bumbu2an	10.574,63	3,30			
Konsumsi Lainnya	8.422,50	2,63			
Makanan dan minuman jadi	71.323,22	22,27			
Tembakau dan Sirih	34.794,54	10,86			
Total	320.278,31	100,00		176.418,22	100,00
Persentase	64,48			35,52	
Rata-rata Pengeluaran	496.696,53				

Tabel : L.2.19.
Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk
Tahun 2014

Kecamatan Kuwarasan

Jenis Pengeluaran					
Makanan			Non Makanan		
Komoditi	Perkapita	%	Komoditi	Perkapita	%
Padi2an	52.329,06	19,00	Perumahan	65.007,28	38,18
Umbi2an	1.277,92	0,46	Aneka Barang dan Jasa	43.389,24	25,48
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	5.320,13	1,93	Pendidikan	6.560,22	3,85
Daging	9.553,25	3,47	Kesehatan	22.065,43	12,96
Telur dan susu	14.147,73	5,14	Pakaian	18.205,37	10,69
Sayur2an	31.330,52	11,38	Barang tahan lama	3.535,36	2,08
Kacang2an	21.399,35	7,77	Pajak dan Asuransi	5.925,27	3,48
Buah2an	5.090,26	1,85	Keperluan Pesta	5.593,73	3,28
Minyak dan Lemak	14.980,52	5,44			
Bahan Minuman	18.603,90	6,76			
Bumbu2an	6.816,23	2,48			
Konsumsi Lainnya	7.211,69	2,62			
Makanan dan minuman jadi	56.214,94	20,42			
Tembakau dan Sirih	31.071,43	11,28			
Total	275.346,92	100,00		170.281,90	100,00
Persentase	61,79			38,21	
Rata-rata Pengeluaran	445.628,82				

Tabel : L.2.20.
Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk
Tahun 2014

Kecamatan Rowokele

Jenis Pengeluaran					
Makanan			Non Makanan		
Komoditi	Perkapita	%	Komoditi	Perkapita	%
Padi2an	74.626,44	23,96	Perumahan	58.893,38	38,20
Umbi2an	1.987,63	0,64	Aneka Barang dan Jasa	42.379,31	27,49
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	8.465,82	2,72	Pendidikan	6.959,35	4,51
Daging	14.754,71	4,74	Kesehatan	19.594,48	12,71
Telur dan susu	23.035,44	7,40	Pakaian	8.686,66	5,63
Sayur2an	41.867,41	13,44	Barang tahan lama	12.266,23	7,96
Kacang2an	21.531,57	6,91	Pajak dan Asuransi	5.185,21	3,36
Buah2an	15.869,46	5,10	Keperluan Pesta	222,28	0,14
Minyak dan Lemak	16.798,07	5,39			
Bahan Minuman	18.455,48	5,93			
Bumbu2an	8.859,87	2,84			
Konsumsi Lainnya	9.285,06	2,98			
Makanan dan minuman jadi	26.091,54	8,38			
Tembakau dan Sirih	29.814,40	9,57			
Total	311.442,90	100,00		154.186,90	100,00
Persentase	66,89			33,11	
Rata-rata Pengeluaran	465.629,80				

Tabel : L.2.21.
Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk
Tahun 2014

Kecamatan Sempor

Jenis Pengeluaran					
Makanan			Non Makanan		
Komoditi	Perkapita	%	Komoditi	Perkapita	%
Padi2an	63.866,80	21,23	Perumahan	86.822,95	36,62
Umbi2an	1.317,21	0,44	Aneka Barang dan Jasa	66.617,62	28,10
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	10.866,13	3,61	Pendidikan	9.935,52	4,19
Daging	15.758,34	5,24	Kesehatan	26.993,04	11,38
Telur dan susu	21.957,98	7,30	Pakaian	14.488,49	6,11
Sayur2an	33.395,72	11,10	Barang tahan lama	16.966,83	7,16
Kacang2an	11.587,98	3,85	Pajak dan Asuransi	9.100,99	3,84
Buah2an	13.901,66	4,62	Keperluan Pesta	6.173,60	2,60
Minyak dan Lemak	10.855,65	3,61			
Bahan Minuman	15.844,29	5,27			
Bumbu2an	7.677,57	2,55			
Konsumsi Lainnya	6.880,25	2,29			
Makanan dan minuman jadi	36.919,00	12,27			
Tembakau dan Sirih	50.068,07	16,64			
Total	300.896,67	100,00		237.099,04	100,00
Persentase	55,93			44,07	
Rata-rata Pengeluaran	537.995,70				

Tabel : L.2.22.
Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk
Tahun 2014

Kecamatan Gombong

Jenis Pengeluaran					
Makanan			Non Makanan		
Komoditi	Perkapita	%	Komoditi	Perkapita	%
Padi2an	54.953,77	17,00	Perumahan	88.452,20	44,24
Umbi2an	1.956,19	0,61	Aneka Barang dan Jasa	48.518,95	24,27
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	6.389,52	1,98	Pendidikan	16.204,14	8,11
Daging	20.144,81	6,23	Kesehatan	20.701,04	10,35
Telur dan susu	18.953,45	5,86	Pakaian	9.929,93	4,97
Sayur2an	50.307,27	15,56	Barang tahan lama	7.621,76	3,81
Kacang2an	18.673,47	5,78	Pajak dan Asuransi	8.183,81	4,09
Buah2an	10.493,20	3,25	Keperluan Pesta	305,25	0,15
Minyak dan Lemak	18.965,76	5,87			
Bahan Minuman	14.705,26	4,55			
Bumbu2an	9.770,67	3,02			
Konsumsi Lainnya	2.804,76	0,87			
Makanan dan minuman jadi	54.407,82	16,83			
Tembakau dan Sirih	40.708,37	12,59			
Total	323.234,31	100,00		199.917,08	100,00
Persentase	61,79			38,21	
Rata-rata Pengeluaran	523.151,38				

Tabel : L.2.23.
Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk
Tahun 2014

Kecamatan Karanganyar

Jenis Pengeluaran					
Makanan			Non Makanan		
Komoditi	Perkapita	%	Komoditi	Perkapita	%
Padi2an	53.326,15	20,61	Perumahan	57.040,50	40,71
Umbi2an	2.210,24	0,85	Aneka Barang dan Jasa	27.915,94	19,92
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	12.991,91	5,02	Pendidikan	4.029,86	2,88
Daging	12.196,77	4,71	Kesehatan	19.233,60	13,73
Telur dan susu	21.993,26	8,50	Pakaian	8.591,40	6,13
Sayur2an	31.975,74	12,36	Barang tahan lama	9.033,31	6,45
Kacang2an	11.183,29	4,32	Pajak dan Asuransi	13.403,08	9,57
Buah2an	16.334,23	6,31	Keperluan Pesta	875,36	0,62
Minyak dan Lemak	14.237,87	5,50			
Bahan Minuman	12.976,42	5,02			
Bumbu2an	3.575,07	1,38			
Konsumsi Lainnya	6.700,81	2,59			
Makanan dan minuman jadi	40.819,41	15,78			
Tembakau dan Sirih	18.221,02	7,04			
Total	258.742,18	100,00		140.123,05	100,00
Persentase	64,87			35,13	
Rata-rata Pengeluaran	398.865,24				

Tabel : L.2.24.

Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk
Tahun 2014

Kecamatan Karanggayam

Jenis Pengeluaran					
Makanan			Non Makanan		
Komoditi	Perkapita	%	Komoditi	Perkapita	%
Padi2an	54.766,65	20,68	Perumahan	38.887,46	37,85
Umbi2an	5.940,24	2,24	Aneka Barang dan Jasa	24.973,28	24,31
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	5.250,43	1,98	Pendidikan	3.793,49	3,69
Daging	9.050,37	3,42	Kesehatan	9.637,50	9,38
Telur dan susu	15.405,52	5,82	Pakaian	11.234,66	10,94
Sayur2an	37.365,96	14,11	Barang tahan lama	3.676,60	3,58
Kacang2an	11.451,48	4,32	Pajak dan Asuransi	2.778,21	2,70
Buah2an	14.508,25	5,48	Keperluan Pesta	7.748,06	7,54
Minyak dan Lemak	12.857,14	4,85			
Bahan Minuman	15.766,65	5,95			
Bumbu2an	5.751,57	2,17			
Konsumsi Lainnya	13.755,26	5,19			
Makanan dan minuman jadi	38.103,59	14,39			
Tembakau dan Sirih	24.894,71	9,40			
Total	264.867,81	100,00		102.729,27	100,00
Persentase	72,05			27,95	
Rata-rata Pengeluaran	367.597,09				

Tabel : L.2.25.

Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk
Tahun 2014

Kecamatan Sadang

Jenis Pengeluaran					
Makanan			Non Makanan		
Komoditi	Perkapita	%	Komoditi	Perkapita	%
Padi2an	44.932,06	16,95	Perumahan	37.161,22	32,63
Umbi2an	9.345,50	3,53	Aneka Barang dan Jasa	24.259,80	21,30
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	10.859,32	4,10	Pendidikan	2.195,02	1,93
Daging	4.752,84	1,79	Kesehatan	16.137,12	14,17
Telur dan susu	16.141,27	6,09	Pakaian	14.540,51	12,77
Sayur2an	35.916,10	13,55	Barang tahan lama	7.248,81	6,36
Kacang2an	12.614,72	4,76	Pajak dan Asuransi	4.377,27	3,84
Buah2an	14.114,09	5,33	Keperluan Pesta	7.969,76	7,00
Minyak dan Lemak	12.910,13	4,87			
Bahan Minuman	17.274,34	6,52			
Bumbu2an	14.248,01	5,38			
Konsumsi Lainnya	7.460,12	2,81			
Makanan dan minuman jadi	37.363,62	14,10			
Tembakau dan Sirih	27.085,93	10,22			
Total	265.018,06	100,00		113.889,49	100,00
Persentase	69,94			30,06	
Rata-rata Pengeluaran	378.907,55				

Tabel : L.2.26.
Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk
Tahun 2014

Kecamatan Karangsambung					
Jenis Pengeluaran					
Makanan			Non Makanan		
Komoditi	Perkapita	%	Komoditi	Perkapita	%
Padi2an	50.135,03	17,54	Perumahan	82.512,09	32,74
Umbi2an	4.024,21	1,41	Aneka Barang dan Jasa	66.609,62	26,43
Ikan/ Udang/ Cumi/ Kerang	9.327,86	3,26	Pendidikan	10.568,93	4,19
Daging	1.314,18	0,46	Kesehatan	22.020,91	8,74
Telur dan susu	16.669,44	5,83	Pakaian	34.609,30	13,73
Sayur2an	43.380,90	15,18	Barang tahan lama	22.691,33	9,00
Kacang2an	9.878,88	3,46	Pajak dan Asuransi	8.179,87	3,25
Buah2an	18.397,58	6,44	Keperluan Pesta	4.815,01	1,91
Minyak dan Lemak	6.686,83	2,34			
Bahan Minuman	15.579,14	5,45			
Bumbu2an	7.979,89	2,79			
Konsumsi Lainnya	11.751,59	4,11			
Makanan dan minuman jadi	55.890,20	19,56			
Tembakau dan Sirih	34.774,14	12,17			
Total	285.789,86	100,00		252.007,05	100,00
Persentase	53,14			46,86	
Rata-rata Pengeluaran	537.796,92				

Tabel L.3.1
Wilayah Sampel Survei Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA) 2014

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	1- KOTA 2-DESA	NO. BLOK SENSUS	NOMOR KODE SAMPEL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	[010] AYAH	[002] KARANGDUWUR	2	007B	2027803
2	[010] AYAH	[005] JINTUNG	2	003B	2038104
3	[010] AYAH	[008] WATUKELIR	2	006B	2007604
4	[010] AYAH	[011] KALIPOH	2	011B	2022406
5	[010] AYAH	[012] AYAH	1	005B	2502805
6	[010] AYAH	[015] JATIJAJAR	2	006B	2028601
7	[010] AYAH	[016] DEMANGSARI	2	013B	2038305
8	[010] AYAH	[004] PASIR	2	007B	2028205
9	[020] BUAYAN	[004] RANGKAH	2	002B	2013703
10	[020] BUAYAN	[009] BUAYAN	2	004B	2036617
11	[020] BUAYAN	[012] ROGODONO	2	006B	2010505
12	[020] BUAYAN	[015] NOGORAJI	2	003B	2027102
13	[020] BUAYAN	[016] MERGOSONO	1	007B	2513405
14	[020] BUAYAN	[019] PURBOWANGI	1	009B	2515904
15	[020] BUAYAN	[019] PURBOWANGI	1	017B	2515902
16	[020] BUAYAN	[020] JATIROTO	2	005B	2027005
17	[020] BUAYAN	[013] BANYUMUDAL	2	013B	2029304
18	[030] PURING	[001] TAMBAKMULYO	2	010B	2006002
19	[030] PURING	[003] WALUYOREJO	2	005B	2031503
20	[030] PURING	[006] PURWOSARI	2	004B	2008105
21	[030] PURING	[009] KALENG	2	005B	2020202
22	[030] PURING	[012] BANJAREJA	2	010B	2026406
23	[030] PURING	[017] KEDALEMANWETAN	2	004B	2016301
24	[030] PURING	[021] MADUREJO	2	003B	2032306
25	[030] PURING	[021] MADUREJO	2	009B	2032307
26	[040] PETANAHAH	[002] KARANGGADUNG	2	005B	2028005
27	[040] PETANAHAH	[005] MUNGGU	1	003B	2507702
28	[040] PETANAHAH	[005] MUNGGU	2	005B	2507705
29	[040] PETANAHAH	[005] MUNGGU	3	008B	2507701
30	[040] PETANAHAH	[007] KARANGDUWUR	2	007B	2037203
31	[040] PETANAHAH	[011] GROGOLBENINGSARI	2	005B	2038906
32	[040] PETANAHAH	[014] SIDOMULYO	2	008B	2035606
33	[040] PETANAHAH	[020] JATIMULYO	2	002B	2008301
34	[050] KLIRONG	[001] JOGOSIMO	2	004B	2006606
35	[050] KLIRONG	[003] PANDANLOR	2	002B	2022704
36	[050] KLIRONG	[006] KLEGENREJO	2	005B	2009704
37	[050] KLIRONG	[008] KEDUNGSARI	2	009B	2026503
38	[050] KLIRONG	[011] KLIRONG	2	003B	2033205
39	[050] KLIRONG	[016] WOTBUWONO	2	002B	2019303
40	[050] KLIRONG	[019] GADUNGREJO	2	006B	2032501

Lanjutan Tabel L.3.1.

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	1- KOTA 2-DESA	NO. BLOK SENSUS	NOMOR KODE SAMPL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
41	[050] KLIRONG	[021] BUMIHARJO	2	007B	2014103
42	[050] KLIRONG	[023] PODOLUHUR	2	013B	2036306
43	[060] BULUSPESANTREN	[001] AYAMPUTIH	2	009B	2024205
44	[060] BULUSPESANTREN	[002] SETROJENAR	2	005B	2009306
45	[060] BULUSPESANTREN	[004] BANJURPASAR	2	002B	2014803
46	[060] BULUSPESANTREN	[008] WALUYO	2	004B	2008204
47	[060] BULUSPESANTREN	[010] MADURETNO	2	003B	2000406
48	[060] BULUSPESANTREN	[013] TAMBAKREJO	2	006B	2023501
49	[060] BULUSPESANTREN	[017] JOGOPATEN	2	006B	2023702
50	[060] BULUSPESANTREN	[019] SIDOMORO	2	009B	2021101
51	[070] AMBAL	[003] KENOYOJAYAN	2	003B	2014703
52	[070] AMBAL	[007] SUMBERJATI	2	003B	2023401
53	[070] AMBAL	[012] AMBALKLIWONAN	2	001B	2029002
54	[070] AMBAL	[017] BANJARSARI	2	004B	2032105
55	[070] AMBAL	[021] SINUNGREJO	2	004B	2003603
56	[070] AMBAL	[027] PRASUTAN	2	002B	2021406
57	[070] AMBAL	[031] DUKUHREJOSARI	1	005B	2513301
58	[070] AMBAL	[032] KEMBANGSAWIT	1	003B	2513305
59	[080] MIRIT	[003] MIRIT	2	004B	2024304
60	[080] MIRIT	[004] TLOGOPRAGOTO	1	003B	2510205
61	[080] MIRIT	[004] TLOGOPRAGOTO	2	006B	2510202
62	[080] MIRIT	[009] WERGONAYAN	2	005B	2015103
63	[080] MIRIT	[015] PATUKGAWEMULYO	2	001B	2025803
64	[080] MIRIT	[028] NGABEAN	2	002B	2029805
65	[080] MIRIT	[011] SITIBENTAR	2	005B	2004501
66	[081] BONOROWO	[001] PATUKREJO	2	005B	2018906
67	[081] BONOROWO	[006] ROWOSARI	1	002B	2507503
68	[081] BONOROWO	[006] ROWOSARI	2	003B	2507508
69	[081] BONOROWO	[008] SIRNOBOYO	2	007B	2014304
70	[081] BONOROWO	[003] PUJODADI	2	005B	2030302
71	[090] PREMBUN	[001] TERSOBO	1	003B	2507204
72	[090] PREMBUN	[002] PREMBUN	1	007B	2516103
73	[090] PREMBUN	[003] KABEKELAN	1	005B	2503806
74	[090] PREMBUN	[008] SEMBIRKADIPATEN	2	003B	2013204
75	[090] PREMBUN	[013] KABUARAN	2	005B	2034106
76	[091] PADURESO	[003] MERDEN	2	003B	2033302
77	[091] PADURESO	[007] RAHAYU	2	002B	2024803
78	[091] PADURESO	[009] PADURESO	2	004B	2022105
79	[100] KUTOWINANGUN	[003] KUWARISAN	1	008B	2513007
80	[100] KUTOWINANGUN	[005] LUNDONG	1	002B	2500507

Lanjutan Tabel L.3.1.

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	1- KOTA 2-DESA	NO. BLOK SENSUS	NOMOR KODE SAMPL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
81	[100] KUTOWINANGUN	[007] BABADSARI	2	010B	2021207
82	[100] KUTOWINANGUN	[008] UNGARAN	1	005B	2504304
83	[100] KUTOWINANGUN	[013] JLEGIWINANGUN	2	004B	2036204
84	[100] KUTOWINANGUN	[017] TUNJUNGSETO	2	004B	2031403
85	[100] KUTOWINANGUN	[004] KUTOWINANGUN	1	004B	2509703
86	[110] ALIAN	[011] BOJONGSARI	1	008B	2511105
87	[110] ALIAN	[014] JATIMULYO	1	009B	2507510
88	[110] ALIAN	[018] KALIJAYA	2	006B	2002502
89	[110] ALIAN	[020] SELILING	1	008B	2507507
90	[110] ALIAN	[027] KRAKAL	1	010B	2508002
91	[110] ALIAN	[015] TANUHARJO	2	005B	2019702
92	[111] PONCOWARNO	[002] LEREPKEBUMEN	2	001B	2012103
93	[111] PONCOWARNO	[004] PONCOWARNO	2	001B	2003106
94	[111] PONCOWARNO	[006] JEMBANGAN	2	005B	2003301
95	[111] PONCOWARNO	[009] TIRTOMOYO	2	002B	2032604
96	[111] PONCOWARNO	[010] SOKA	2	005B	2032603
97	[120] KEBUMEN	[001] MUKTISARI	1	005B	2503303
98	[120] KEBUMEN	[010] SELANG	1	004B	2508504
99	[120] KEBUMEN	[013] PANJER	1	013B	2500705
100	[120] KEBUMEN	[024] KEBUMEN	1	006B	2506305
101	[120] KEBUMEN	[026] BUMIREJO	1	013B	2509106
102	[120] KEBUMEN	[006] KALIBAGOR	2	009B	2038205
103	[120] KEBUMEN	[008] JATISARI	2	013B	2515401
104	[120] KEBUMEN	[013] PANJER	1	017B	2500703
105	[120] KEBUMEN	[028] KARANGSARI	1	007B	2517103
106	[130] PEJAGOAN	[001] LOGEDE	1	007B	2504605
107	[130] PEJAGOAN	[002] KUWAYUHAN	1	011B	2516501
108	[130] PEJAGOAN	[003] KEDAWUNG	1	007B	2514001
109	[130] PEJAGOAN	[003] KEDAWUNG	1	018B	2511002
110	[130] PEJAGOAN	[004] PEJAGOAN	1	014B	2514905
111	[130] PEJAGOAN	[005] KEBULUSAN	1	011B	2504202
112	[130] PEJAGOAN	[008] JEMUR	2	003B	2035103
113	[130] PEJAGOAN	[012] PENIRON	2	002B	2020601
114	[140] SRUWENG	[002] TRIKARSO	1	002B	2517006
115	[140] SRUWENG	[004] GIWANGRETNO	1	006B	2508805
116	[140] SRUWENG	[010] TANGGERAN	1	011B	2501304
117	[140] SRUWENG	[006] SRUWENG	1	008B	2513805
118	[140] SRUWENG	[012] KARANGPULE	1	007B	2516404
119	[140] SRUWENG	[014] PENGEMPON	2	002B	2002102
120	[150] ADIMULYO	[001] SUGIHWARAS	2	006B	2021803

Lanjutan Tabel L.3.1.

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	1- KOTA 2-DESA	NO. BLOK SENSUS	NOMOR KODE SAMPEL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
121	[150] ADIMULYO	[005] WAJASARI	2	004B	2027903
122	[150] ADIMULYO	[009] TEMANGGAL	2	001B	2018007
123	[150] ADIMULYO	[013] SEKARTEJA	2	004B	2001201
124	[150] ADIMULYO	[017] MELES	2	004B	2021603
125	[150] ADIMULYO	[021] ARJOSARI	2	002B	2020902
126	[150] ADIMULYO	[022] PEKUWON	2	001B	2022001
127	[160] KUWARASAN	[004] KALIPURWO	2	010B	2037603
128	[160] KUWARASAN	[007] KUWARASAN	1	002B	2501202
129	[160] KUWARASAN	[009] LEMAHDUWUR	1	009B	2501601
130	[160] KUWARASAN	[014] SERUT	2	004B	2028902
131	[160] KUWARASAN	[015] BANJAREJA	1	012B	2501208
132	[160] KUWARASAN	[022] SAWANGAN	2	002B	2004905
133	[160] KUWARASAN	[017] WONOYOSO	1	003B	2504401
134	[170] ROWOKELE	[003] PRINGTUTUL	2	003B	2005601
135	[170] ROWOKELE	[005] BUMIAGUNG	2	003B	2008408
136	[170] ROWOKELE	[009] GIYANTI	2	011B	2000105
137	[170] ROWOKELE	[011] WAGIRPANDAN	2	011B	2024501
138	[170] ROWOKELE	[005] BUMIAGUNG	2	011B	2008402
139	[170] ROWOKELE	[008] SUKOMULYO	2	003B	2017105
140	[170] ROWOKELE	[011] WAGIRPANDAN	2	004B	2006802
141	[180] SEMPOR	[001] SIDOHARUM	1	007B	2511503
142	[180] SEMPOR	[002] SELOKERTO	1	008B	2515002
143	[180] SEMPOR	[004] JATINEGORO	1	006B	2503908
144	[180] SEMPOR	[006] PEKUNCEN	1	002B	2504903
145	[180] SEMPOR	[008] SEMALI	2	006B	2004305
146	[180] SEMPOR	[015] KENTENG	2	008B	2036406
147	[180] SEMPOR	[005] BEJIRUYUNG	1	011B	2514106
148	[180] SEMPOR	[012] SAMPANG	2	006B	2032402
149	[190] GOMBONG	[001] KALITENGGAH	1	003B	2508402
150	[190] GOMBONG	[003] BANJARSARI	1	006B	2504705
151	[190] GOMBONG	[007] WERO	1	002B	2501705
152	[190] GOMBONG	[008] GOMBONG	1	014B	2513605
153	[190] GOMBONG	[010] SEMONDO	1	001B	2503603
154	[190] GOMBONG	[011] SEMANDING	1	012B	2505801
155	[190] GOMBONG	[014] KLOPOGODO	1	009B	2508701
156	[200] KARANGANYAR	[002] PANJATAN	1	004B	2517203
157	[200] KARANGANYAR	[003] KARANGANYAR	1	011B	2505105
158	[200] KARANGANYAR	[004] JATILUHUR	1	006B	2504805
159	[200] KARANGANYAR	[007] PLARANGAN	1	002B	2512203
160	[200] KARANGANYAR	[007] PLARANGAN	2	011B	2516701

Lanjutan Tabel L.3.1.

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	1- KOTA 2-DESA	NO. BLOK SENSUS	NOMOR KODE SAMPEL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
161	[200] KARANGANYAR	[011] POHKUMBANG	2	002B	2000605
162	[200] KARANGANYAR	[010] GRENGGENG	2	006B	2004404
163	[210] KARANGGAYAM	[002] KAJORAN	2	008B	2010003
164	[210] KARANGGAYAM	[006] KALIREJO	2	012B	2007906
165	[210] KARANGGAYAM	[010] KEBAKALAN	2	002B	2026901
166	[210] KARANGGAYAM	[013] KALIBENING	2	008B	2024402
167	[210] KARANGGAYAM	[017] GLONTOR	2	005B	2008604
168	[210] KARANGGAYAM	[019] GIRITIRTO	2	007B	2030803
169	[210] KARANGGAYAM	[017] GLONTOR	2	002B	2004801
170	[220] SADANG	[015] PUCANGAN	2	009B	2012402
171	[220] SADANG	[016] SEBORO	2	009B	2026305
172	[220] SADANG	[017] WONOSARI	2	003B	2030204
173	[220] SADANG	[018] SADANGKULON	2	009B	2016201
174	[220] SADANG	[021] KEDUNGGONG	2	005B	2010102
175	[221] KARANGSAMBUNG	[001] WIDORO	2	004B	2033405
176	[221] KARANGSAMBUNG	[006] PLUMBON	2	013B	2031906
177	[221] KARANGSAMBUNG	[008] WADASMALANG	2	004B	2029204
178	[221] KARANGSAMBUNG	[010] KALISANA	2	002B	2005504
179	[221] KARANGSAMBUNG	[013] KARANGSAMBUNG	2	001B	2029906
180	[221] KARANGSAMBUNG	[005] KALIGENDING	2	008B	2001301